

LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN 2018

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sistem manajemen strategis yang prosesnya dimulai dari penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang ditetapkan dalam suatu Rencana Strategis Jangka Menengah Organisasi. Rencana strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan ditetapkan komitmennya dalam Penetapan Kinerja (PK). Selama tahun berjalan dilakukan pengumpulan data dan pengukuran serta evaluasi atas kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja.

Keluaran utama dari Sistem Akuntabilitas Kinerja adalah Laporan Kinerja (Lapkin). Laporan Kinerja memuat informasi penting dan relevan bagi pengguna laporan, yaitu unsur pimpinan eksekutif, unsur pengawasan dan perencanaan.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 merupakan implementasi sistem akuntabilitas berupa pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban ini tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, maupaun upaya pemecahan permasalahan pelaksanaan pemerintahan daerah

melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan ini memuat tingkat capaian dan realisasi anggaran dari sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Pengukuran pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan antara rencana (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance Result*) yang dicapai. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak internal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri yaitu SKPD-SKPD yang melaksanakan program dan kegiatan dalam memberikan gambaran tentang pelaksanaan program dan kegiatan selaras dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017. Disisi lain juga pengukuran tersebut berguna bagi pembelajaran SKPD-SKPD untuk peningkatan kinerja yang lebih baik lagi di tahun berikutnya. Di pihak eksternal yaitu adanya masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pengawas jalannya roda pemerintahan, pengukuran kinerja bermanfaat sebagai bahan pengawasan jalannya roda pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengukur capaian tujuan pada tahun 2018, telah menetapkan indikator kinerja dalam setiap sasaran sebagai alat ukur atas keberhasilan atau kegagalan untuk merepresentasikan dari integritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 tahun ke depan (2017-2022).

Pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 dengan alat ukur indikator kinerja, adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

- a) 1. Sasaran Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan dengan capaian kategori **kurang Berhasil**, dengan capaian 22,29 %.
- b) Sasaran Meningkatnya produksi sub sektor perikanan dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan dengan capaian kategori **Kurang Berhasil** dengan capaian -85,26 %
- c) Sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan dengan indikator kinerja diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan dengan capaian kategori **Berhasil** dan Persentase peningkatan jumlah wisatawan capaian kategori **berhasil**,
- d) Sasaran meningkatnya produksi sektor pertambangan dengan Indikator Kinerja persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian dengan capaian kategori **sangat Berhasil**,
- e) Sasaran Meningkatnya produksi sektor perindustrian dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan dengan capaian kategori **Sangat Berhasil**,
- f) Sasaran terwujudnya kemandirian energi dengan indikator kinerja rasio elektrifikasi dengan capaian kategori **Berhasil**,

- g) Sasaran meningkatnya kemandirian fiskal dengan indiaktor kinerja rasio pendapatan asli daerah terhadap APBD dengan capaian kategori **Sangat Berhasil**,
- h) Sasaran menurunnya pengangguran dengan indikator kinerja persentase tingkat pengangguran terbuka dengan capaian kategori sangat berhasil,
- i) Sasaran menurunnya kemiskinan dengan indikator kinerja persentase penduduk miskin dengan capaian kategori **Berhasil**,
- j) Sasaran menurunnya inflasi dengan indikator kinerja angka inflasi dengan target capaian kategori **sangat Berhasil**,
- k) Sasaran terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan indikator kinerja persentase laju pertumbuhan penduduk dengan capaian kategori **sangat Berhasil**,
- l) Sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan tiga indikator kinerja rasio ketersediaan transportasi layak jalan dengan kategori sangat berhasil, indeks konektiviti kabupaten/kota dengan kategori berhasil dan persentase desa dengan konektivitas kecepatan 12 Mbps dengan capaian kategori **Berhasil**,
- m) Sasaran meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dengan dua idikator kinerja yaitu harapan lama sekolah dengan kategori capaian berhasil, indikator rata-rata lama sekolah dengan kategori capaian berhasil.
- n) Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan 4 indikator kinerja, yaitu angka harapan hidup dengan kategori capaian berhasil, indikator angka kematian ibu dengan kategori capaian cukup berhasil, angka kematian bayi perseribu kelahiran

- hidup dengan kategori capaian “sangat berhasil” dan angka stunting dengan kategori capaian sangat berhasil.
- o) Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan dua indikator kinerja yaitu opini audit BPK atas laporan keuangan dengan kategori capaian berhasil, dan indeks RB dengan kategori berhasil
 - p) Sasaran meningkatnya aspek kebebasan sipil dengan indikator kinerja skor aspek kebebasan sipil dengan kategori capaian berhasil,
 - q) Sasaran terpenuhinya hak-hak politik masyarakat dengan indikator kinerja skor aspek hak-hak politik dengan capaian kategori sangat berhasil,
 - r) Sasaran meningkatnya kualitas lembaga demokrasi dengan indikator kinerja skor aspek lembaga demokrasi dengan capaian kategori berhasil,
 - s) Sasaran birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja indeks integritas layanan publik dengan kategori capaian sangat berhasil,
 - t) Sasaran meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana dengan indikator kinerja indeks kapasitas bencana daerah dengan capaian kategori sangat berhasil,
 - u) Sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup dengan capaian kategori berhasil.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Kondisi perekonomian global termasuk Indonesia di tahun 2016 mengalami perlambatan, sehingga turut berpengaruh terhadap kondisi makro ekonomi

- menyebabkan kurangnya pendapatan masyarakat sehingga daya beli dan pengeluaran konsumsi rumah tangga berkurang.
2. Masih minimnya sarana dan prasarana pembangunan khususnya di daerah pelosok sehingga akses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih minim.
 3. Banyaknya usulan masyarakat bagi pembangunan daerah terkadang berbanding terbalik dengan jumlah anggaran daerah yang tersedia setiap tahunnya.
 4. Masih belum meratanya sarana, mutu, akses, dan relevansi pendidikan dan kesehatan antara perkotaan dan pedesaan.
 5. Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan lahan tempat tinggal juga semakin meningkat. Artinya masyarakat akan menebang hutan untuk lahan tempat tinggal. Luas hutan akan semakin berkurang yang pada akhirnya akan berdampak pada semakin berkurangnya daerah resapan air, sumber daya air semakin menipis di musim kemarau masyarakat akan sangat kesulitan air, dan areal perkebunan dan pertanian masyarakat semakin berkurang dan adanya penambangan timah rakyat beberapa tahun kebelakang telah merusak berbagai ekosistem baik darat maupun lautan.
 6. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi peruntukan tata ruang.
 7. Penataan asset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum terinventarisir dengan baik, sehingga sangat berpengaruh terhadap masi diperolehnya opini audit BPK yaitu WDP.
 8. Secara mendasar membiasakan diri untuk berperilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari hari di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat masih dirasakan kurang, ikut mempengaruhi terwujudnya pemerintahan yang demokratis.

Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian tujuan dilakukan terhadap 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan masing – masing bidang capaian.

yang masuk kategori **sangat berhasil** sasaran strategis atau diatas 100% yaitu sebesar **21%** dari keseluruhan persentase, kemudian capaiannya kurang dari 100% atau sama dengan 100% kategori **berhasil** sebanyak 74 % dari keseluruhan presentase, dan capaian kategori kurang dari 50% kategori **kurang berhasil** sebanyak **1 %**.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 ini merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan profesionalisme.

Adanya peningkatan kualitas penilaian Akuntabilitas menjadi motivasi bagi pemerintahan daerah untuk dapat lebih mensinergiskan fungsi-fungsi koordinasi, konsolidasi, efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan roda pemerintahan kedepannya.

Diharapkan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik sebagai informasi, evaluasi maupun parameter dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat merasakan manfaat yang lebih luas dari peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah.

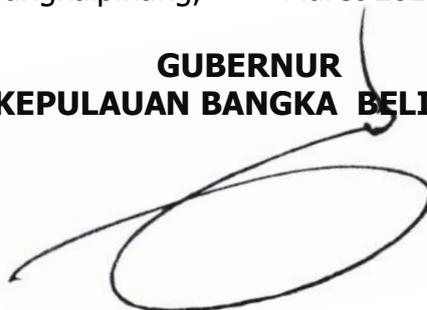
Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam menyusun Laporan Kinerja ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi

kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
tercinta ini.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Pangkalpinang, Maret 2019

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



ERZALDI ROSMAN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Kondisi Daerah	3
D. Kedudukan, Tugas Pokok,Kewenangan dan Kewajiban	37
E. Isu Strategis Daerah	41
F. Sistematika Penyajian	41
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	42
A. Rencana Strategis	44
B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	51
C. Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja.....	54
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	63
E. Program Untuk Pencapaian Sasaran	65
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	76
A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016	77
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	83
C. Realisasi Anggaran.....	176

BAB IV	PENUTUP	190
--------	---------------	-----

LAMPIRAN :

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2017
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	pembagian wilayah administrasi kab/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan serta luas provinsi tahun 2017	4
Tabel 1.2	pembagian wilayah administrasi kab/kota dan desa/kelurahan.	6
Tabel 1.3	pembagian wilayah administrasi kab/kota dan kelurahan	7
Tabel 1.4	pembagian wilayah administrasi kab/kota dan luas Provinsi.	8
Tabel 1.5	Jumlah Penduduk	9
Tabel 1.6	Luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk .	10
Tabel 1.7	Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin	11
Tabel 1.8	PDRB Tahun 2014-2018.....	13
Tabel 1.9	Perkembangan PDRB Tahun 2014-2018	14
Tabel 1.10	Perkembangan PDRB Tahun 2014-2018	16
Tabel 1.11	Distribusi sektor dalam PDRB	16
Tabel 1.12	Perkembangan Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun.....	17
Tabel 1.13	Perkembangan PDRB kabupaten/kota	18
Tabel 1.14	Perkembangan PDRB kabupaten/kota	19
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	37
Tabel 2.2	Target indikator kinerja tujuan RPJMD	41
Tabel 2.3	Sasaran Strategis dan IKU	44
Tabel 2.4	Perjajian Kinerja	58
Tabel 2.5	Rencana Kerja Pemerintah daerah	60
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2018.....	77
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.....	77
Tabel 3.3	Pencapaian Target Kinerja Sasaran	161

Tabel 3.4	Pencapaian target kinerja tahun 2018 dengan target nasional	161
Tabel 3.5	Pencapaian Target Kinerja Sasaran	167
Tabel 3.6	Pencapaian Target Kinerja Sasaran	93
Tabel 3.7	Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan akhir RPJMD	94
Tabel 3.8	Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional	94
Tabel 3.9	Pencapaian Target Kinerja Sasaran	96
Tabel 3.10	Realisasi Kinerja Tahunan	97
Tabel 3.11	Pencapaian target kinerja tahun 2018 dengan akhir RPJMD.	97
Tabel 3.12	Pencapaian Target Kinerja Nasional	98
Tabel 3.13	Pencapaian Target Kinerja Sasaran	100
Tabel 3.14	Realisasi Kinerja Tahunan	101
Tabel 3.15	Pencapaian Target Kinerja tahun 2018 dengan akhir RPJMD	101
Tabel 3.16	Pencapaian Target Kinerja Nasional	101
Tabel 3.17	Pencapaian target kinerja sasaran	103
Tabel 3.18	Realisasi Kinerja Tahunan	104
Tabel 3.19	Pencapaian Target akhir RPJMD	104
Tabel 3.20	Pencapaian Target Kinerja Sasaran	107
Tabel 3.21	Realisasi Kinerja Tahunan	108
Tabel 3.22	Pencapaian Target akhir RPJMD	108
Tabel 3.23	Pencapaian Target Kinerja Nasional	108
Tabel 3.24	Rasio Elektrifikasi per Kabupaten/kota	109
Tabel 3.25	Pencapaian Target Kinerja Sasaran	111
Tabel 3.26	Realisasi Kinerja Tahunan	111
Tabel 3.27	Pencapaian Target Kinerja akhir RPJMD	112
Tabel 3.28	Pencapaian Target Kinerja Nasional	112
Tabel 3.29	Realisasi Kinerja Tahunan	126
Tabel 3.30	Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan akhir RPJMD	126
Tabel 3.31	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	126
Tabel 3.32	Pencapaian Target Kinerja Sasaran	130

Tabel	3.33	Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan akhir RPJMD	131
Tabel	3.34	Pencapaian Target Kinerja dengan Target Nasional.....	131
Tabel	3.35	Luas Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung...	132
Tabel	3.36	Pencapaian Target Kinerja Sasaran	136
Tabel	3.37	Realisasi Kinerja Tahunan	137
Tabel	3.38	Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan akhir RPJMD	137
Tabel	3.39	Pencapaian Target Kinerja Sasaran	140
Tabel	3.40	Realisasi Kinerja tahunan	142
Tabel	3.42	Pencapaian Target Kinerja Tahu 2016 dengan Target Nasional	143
Tabel	3.43	Kondisi Jalan Provinsi di Wilayah Kab/Kota Kondisi mantap .	146
Tabel	3.44	Sistem Pelabuhan laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .	153
Tabel	3.45	Rasio elektrifikasi per Kab/Kota	156
Tabel	3.46	Pencapaian Target Kinerja Sasaran	161
Tabel	3.47	Realisasi Kinerja Tahunan	160
Tabel	3.47	Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan akhir RPJMD	160
Tabel	3.48	Pencapaian Target Kinerja Sasaran	166
Tabel	3.49	Realisasi Kinerja Tahunan	167
Tabel	3.50	Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan akhir RPJMD	167
Tabel	3.51	Pencapaian Taregt Kinerja Tahun 2016 dengan target Nasonal	168
Tabel	3.52	Penapaian Target Kinerja Sasaran	172
Tabel	3.53	Realisasi Kineja Tahunan.....	173
Tabel	3.54	Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan akhir RPJMD	173
Tabel	3.55	Pencapaian Taregt Kinerja Tahun 2016 dengan target Nasonal	174
Tabel	3.56	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dan Realisasi Dukungan Program.....	182

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8
Gambar 1.8	Jumlah Penumpang Berangkat dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandan Tahun 2015.....	19
Gambar 1.9	Jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.....	22
Gambar 1.10	Produksi timah (ton).. .. .	23
Gambar 1.11	Peta Geologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.. .. .	24
Gambar 1.13	Peta Tutupan Lahan.....	29
Gambar 1.14	Angka Melek Huruf Usia 15 + Tahun Kabupaten/Kota.....	31
Gambar 3.1	Perbandingan persentase skala pengukuran capaian indikator kinerja.. .. .	82
Gambar 3.2	Realisasi Kinerja Tahunan PDRB per Kapita selama 5 Tahun..	84
Gambar 3.3	Perbandingan Target RPJMD dengan realisasi capaian.. .. .	85
Gambar 3.4	Capaian PDRD perkapita menurut Kabupaten/kota.. .. .	87
Gambar 3.6	Realisasi capaian indikator Daya Beli Masyarakat dan Pengeluaran konsumsi rumah tangga.. .. .	92
Gambar 3.9	Persentase jumlah UMKM berdasarkan Kabupaten/Kota.. .. .	102
Gambar 3.11	Realisasi kinerja tahunan Indek Gini dan Williamsom.. .. .	104
Gambar 3.12	Persen Realisasi Kinerja Tahunan.. .. .	113
Gambar 3.13	Realisasi tahunan kinerja angka melek huruf, angka rata-rata sekolah dan angka harapan hidup.....	118
Gambar 3.14	Angka Melek Huruf Usia 15 + Tahun Kabupaten/Kota.....	119
Gambar 3.17	Program peningkatan angka rata-rata lama sekolah.....	122
Gambar 3.18	Angka Harapan Hidup.. .. .	123
Gambar 3.19	Program peningkatan angka harapan hidup.....	124
Gambar 3.20	Realisasi kinerja tahunan.....	127

Gambar 3.22	Peta Kawasan Hutan.....	135
Gambar 3.23	Realisasi capaian indikator RTRW.. ..	137
Gambar 3.24	Peta Rencana Pola Ruang.. ..	139
Gambar 3.25	Realisasi capaian eningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan.....	144
Gambar 3.29	Alur Pelayaran Penyeberangan Yang Melintasi.. ..	155
Gambar 3.30	Perbandingan Rasio Elektrifikasi per Kabupaten/Kota.....	157
Gambar 3.31	Babel Terang.....	158
Gambar 3.32	Capaian sasaran strategis berkembangnya kawasan ekonomi khusus wilayah strategis dan cepat tumbuh.....	161
Gambar 3.33	Trend Penilaian Akuntabilitas Kinerja.....	163
Gambar 3.35	Perkembangan Indeks Demokrasi.. ..	169
Gambar 3.36	Perkembangan Indeks Demokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	174

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas , dan azas Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media

pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

- kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Menjadikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif;
 3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
 4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap penyelenggara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Kondisi Geografi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2000. Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi ke-31. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya merupakan wilayah yang tergabung dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Bangka, Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Pangkalpinang.

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2003 dibentuklah daerah pemekaran yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten baru yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur, maka dengan demikian wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota. Dalam wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota terbagi dalam wilayah kecamatan, kelurahan/desa dengan rincian per kabupaten pada tahun 2016 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 1.1

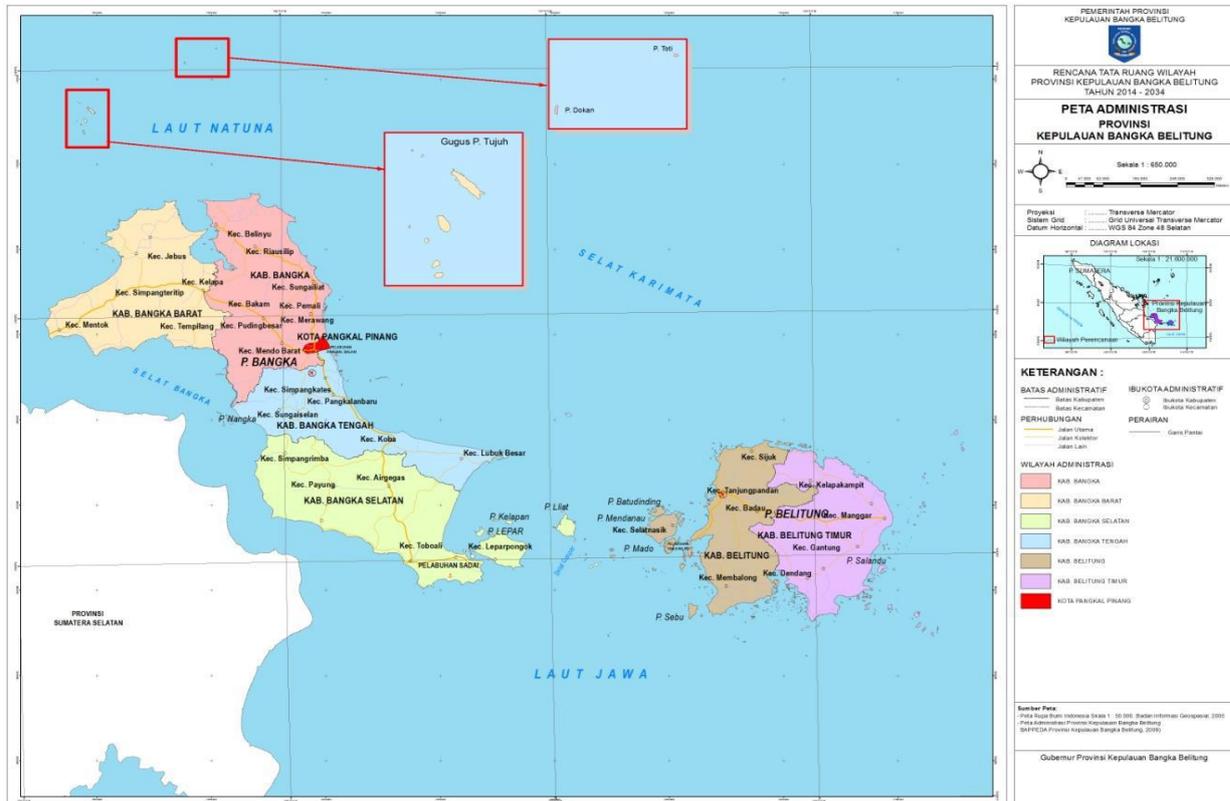
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan serta Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	Sungai Liat	8	62	19	2.950,69
Bangka Barat	Muntok	6	60	4	2.820,61
Bangka Tengah	Koba	6	56	7	2.126,36
Bangka Selatan	Toboali	8	50	3	3.607,08
Belitung	Tanjungpandan	5	42	7	2.293,69
Belitung Timur	Manggar	7	39	0	2.507,00
Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	0	42	118,80
Luas Daratan				16.424,23	
Luas Laut				65.301,00	
Provinsi Kep. Babel		47	309	82	81.725,23

Sumber: Indikator Sosial Ekonomi, BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung 2019

Gambar 1.1.

Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014- 2034

Secara Geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada $104^{\circ}50'$ sampai $109^{\circ}30'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}50'$ sampai $4^{\circ}10'$ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah di sebelah Barat dengan Selat Bangka, Di sebelah Timur dengan Selat Karimata, di sebelah Utara dengan Laut Natuna, dan di sebelah Selatan dengan Laut Jawa.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai $81.725,14 \text{ km}^2$. Luas daratan lebih kurang $16.424,14 \text{ km}^2$ atau 20,10 persen dari total wilayah

dan luas laut kurang lebih 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah Administrasi kecamatan yang paling banyak adalah Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah masing-masing kabupaten tersebut 8 kecamatan. Dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi kecamatannya adalah Kabupaten Belitung sebanyak 5 kecamatan. Total seluruh kecamatan yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 47 kecamatan.

Tabel 1.2

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Desa				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Bangka	Sungailiat	62	62	62	62	62
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	60	60	60	60	60
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	56	56	56	56	56
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	50	50	50	50	50
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	48	42	42	42	42
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	39	39	39	39	39
Pangkalpinang	Pangkalpinang	0	0	0	0	0
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		313	309	309	309	309

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2017

Dari Tabel di atas Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah Administrasi Desa yang paling banyak adalah Kabupaten Bangka dengan jumlah 62 Desa dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi Desa adalah Kabupaten Belitung Timur

sebanyak 39 desa. Total seluruh desa yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 309 Desa.

Tabel 1.3

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kelurahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

Nama Kota/Kabupaten (1)	Nama Ibu Kota (2)	Jumlah Kelurahan				
		2013 (3)	2014 (4)	2015 (5)	2016 (6)	2017 (7)
Kabupaten Bangka	Sungailiat	9	15	15	19	19
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	4	4	4	4	4
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	7	7	7	7	7
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	3	3	3	3	3
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	7	7	7	7	7
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	0	0	0	0	0
Pangkalpinang	Pangkalpinang	42	42	42	42	42
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		72	78	78	82	82

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2018

Dari Tabel II.1.c di atas Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah Administrasi Kelurahan yang paling banyak adalah Kota Pangkalpinang dengan jumlah 42 Kelurahan dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi Kelurahan adalah kabupaten Belitung Timur yang tidak memiliki wilayah kelurahan. Total seluruh kelurahan yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 78 kelurahan.

Tabel 1.4

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

Nama Kota/Kab	Nama Ibu Kota	Luas Wilayah				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungailiat	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00
Pangkalpinang	Pangkalpinang	118,80	118,80	118,80	118,80	118,80
Luas Daratan		16.424,23	16.424,2	16.424,2	16.424,2	16.424,2
Luas Laut		65.301,00	65.301,0	65.301,0	65.301,0	65.301,0
Provinsi Kepulauan		81.725,	81.725,	81.725,	81.725,	81.725,

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2017

Dari Tabel II.1.d di atas Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki Luas wilayah Administrasi yang paling besar adalah kabupaten Bangka Selatan dengan luas wilayah 3.607,08 Km² dan kabupaten yang paling kecil luas wilayah Administrasi adalah Kota pangkalpinang sebesar 118,8 Km². Total luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Luas lautan 65.301,23 Km² dan Luas daratan 16.424,23 Km².

2. Demografi

Kondisi Demografis Kepulauan Bangka Belitung secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan

Kesepakatan Pemuktahiran Data Kesehatan Tahun 2018 yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 mencapai 1.368.467 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 2,07 persen, menurun sebesar 0,04 persen bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2016. Dengan rasio jenis kelamin 105,86, dan rasio ketergantungan 46,20.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017*
Demografi						
1. Jumlah Penduduk	jiwa	1.315.123	1.343.881	1.372.81	.401.827	1.368.467
a. Laki-Laki	jiwa	682.653	697.897	713.223	728.580	703.733
b. Perempuan	jiwa	632.470	645.984	659.590	673.247	664.754
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	persen	2,22	2,19	2,15	2,11	2,07
3. Kepadatan Penduduk	Jiwa/km	80	82	84	85	87
4. Rasio Jenis Kelamin	persen	107,90	108	108,10	108,20	105,86
5. Rasio Ketergantungan	persen	46,83	46,40	46,06	45,74	46,05

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penduduk terbanyak pada tahun 2017 berada di Kabupaten Bangka yaitu sebesar 324.305 jiwa atau 22,66%, dan yang paling sedikit di Kabupaten Belitung Timur, sebanyak 124.587 jiwa atau 8,71% dari total penduduk Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, angka tertinggi berada di Kota Pangkalpinang, 1.720 orang/km², dan terendah di Kabupaten Belitung Timur 50 orang/km². Jumlah penduduk dan tingkat kepadatan kabupaten/kota tergambar pada Tabel 2

Tabel 1.6

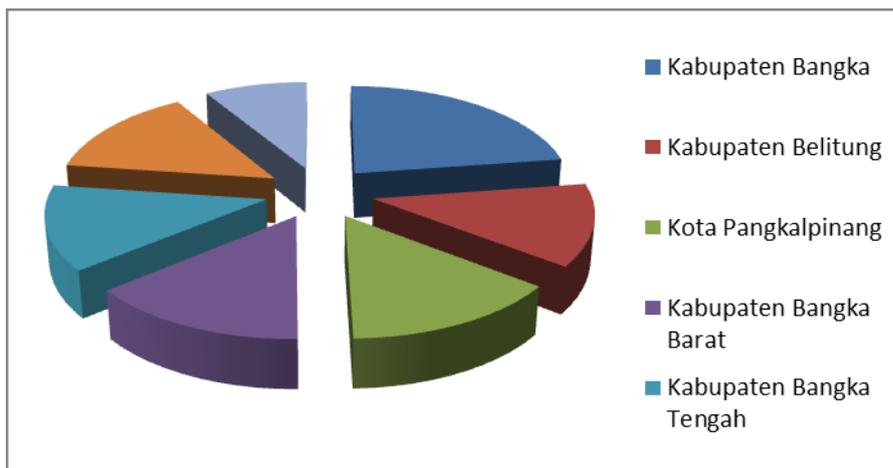
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah		Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk (org/km ²)
	Km ²	% luas Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah	% terhadap penduduk Kepulauan Bangka Belitung	
Kabupaten Bangka	2.950,69	17,97	324.305	22,66%	110
Kabupaten Belitung	2.293,69	13,97%	182.418	12,75%	80
Kota Pangkalpinang	118,80	0,72%	204.392	14,28%	1720
Kabupaten Bangka Barat	2.820,61	17,17%	204.778	14,31%	73
Kabupaten Bangka Tengah	2.126,36	12,95%	188.603	13,18%	89
Kabupaten Bangka Selatan	3.607,08	21,96%	201.782	14,10%	56

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Grafik II.1

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rasio jenis kelamin di Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2018 sebesar 106,91, yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih

banyak dibandingkan jumlah perempuan. Kepadatan penduduk juga menunjukkan peningkatan, dari 85 jiwa per km² pada tahun 2016 menjadi 87 jiwa per km². Sementara itu, meskipun Penduduk Bangka Belitung saat ini didominasi usia produktif, namun rasio ketergantungan masih terhitung tinggi (46,05). Pada tahun 2017 penduduk usia 0-14 tahun berjumlah 27,12%, usia 15-64 tahun berjumlah 68,47%, dan usia 65+tahun berjumlah 4,41 persen. Artinya saat ini di Bangka Belitung 2 orang usia produktif menanggung kurang dari 1 orang tidak produktif, atau dari 100 orang penduduk produktif harus menanggung beban tanggungan 46,05 orang penduduk usia nonproduktif.

Angka rasio ketergantungan menggambarkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memasuki era bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari jumlah penduduk usia tidak bekerja. Agar bonus demografi dapat menjadi keuntungan bagi daerah, maka dibutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, pengendalian penduduk, hingga kebijakan ekonomi yang agar bonus demografi dapat menjadi keuntungan bagi pembangunan di daerah.

Tabel 1.7

Jumlah Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017 (x1000)

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH			RASIO JENIS
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI +	
1	0-4	57.271	53.331	110.602	107,39%
2	5-9	67.373	63.440	130.813	106,20%
3	10-14	66.924	62.827	129.751	106,52%
4	15-19	57.019	54.804	111.823	104,04%
5	20-24	54.410	51.733	106.143	105,17%
6	25-29	60.678	59.389	120.067	102,17%
7	30-34	66.692	62.704	129.396	106,36%
8	35-39	64.354	58.088	122.442	110,79%
9	40-44	51.861	47.290	99.151	109,67%

10	45-49	41.760	38.644	80.404	108,06%
11	50-54	34.095	32.564	66.659	104,70%
12	55-59	29.622	28.136	57.758	105,28%
13	60-64	22.359	20.825	43.184	107,37%
14	65-69	13.591	13.171	26.762	103,19%
15	70-74	7.862	7.775	15.637	101,12%
16	74+	7.862	10.033	17.895	78,36%
JUMLAH		703.733	664.754	1.368.487	105,86%
ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY				46,05	

Sumber: Pemutahiran Data Kesehatan Tahun 2018

Di samping jumlah penduduk, juga diperlukan untuk mengetahui proyeksi parameter kependudukan, seperti struktur umur, angka kelahiran total, serta angka harapan hidup. Berdasarkan proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, yang disusun oleh Bappenas bekerja sama dengan BPS dan UNFPA (United Nations population Fund), proyeksi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 menggambarkan Piramida Penduduk Muda (Expansive), dimana sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda.

Tipe ini memiliki kebiasaan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi dan terdapat pada daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk cukup tinggi pula. Pertumbuhan ini disebabkan selisih antara tingkat kematian dan kelahiran yang cukup tinggi dimana penurunan tingkat kematian lebih cepat dibandingkan dengan tingkat kelahiran. Penduduk usia lanjut dan usia produktif termasuk usia angkatan kerja akan bertambah besar proporsinya. Sementara itu penduduk usia muda (bayi dan anak) jumlahnya meningkat.

Penduduk Bangka Belitung saat ini didominasi usia produktif, dengan angka ketergantungan 46,05. Pada tahun 2017 penduduk usia 0-14 tahun berjumlah 27,12%, usia 15-64 tahun berjumlah 68,47%, dan usia 65+tahun berjumlah 4,41 persen. Artinya Bangka Belitung saat ini dalam bonus demografi dimana 2 orang usia produktif menanggung kurang dari 1 orang tidak produktif.

3. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Gambaran perkembangan PDRB Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2013-2017 atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku, terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.8
PDRB Tahun 2014 –2018 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

No.	PDRB	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	56.373,6	60.992,1	65.048,2	69.861,2	73.069
2.	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	44.159,4	45.961,5	47.848,3	49.986,8	52.212

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas harga berlaku (ADHB) mencapai Rp.73.069 miliar dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp.52.212 miliar. Berdasarkan tabel II.10 menunjukkan bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2018 secara nominal nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) relatif lebih besar dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010.

Berdasarkan tabel II.1 menunjukkan bahwa ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 tumbuh 4,45 persen melambat dibanding capaian tahun 2017 sebesar 4,47 persen. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan ini dipengaruhi oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan,

Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Selanjutnya PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memberikan kontribusi sebesar 2,26 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,49 persen terhadap total PDRB 34 provinsi di Indonesia.

Perkembangan sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014–2018 ada 4 sektor lapangan usaha yang menggerakkan perekonomian meliputi (i) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (ii) Pertambangan dan Penggalian; (iii) Industri Pengolahan; (iv) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sementara dari ke empat pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tersebut, perkembangan sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2018 sebesar Rp.7.741,5 miliar mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar Rp.8.182,0 miliar, sedangkan sektor-sektor lainnya mengalami peningkatan.

Tabel 1.9

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2014–2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.748,3	12.060,4	13.117,1	13.135,7	13.159,5
Pertambangan dan Penggalian	7.622,8	7.735,4	7.743,3	8.182,0	7.741,5
Industri Pengolahan	12.877,3	12.888,4	13.074,0	14.237,9	15.078,7
Pengadaan Listrik dan Gas	42,0	51,1	66,5	79,4	86,7

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,4	12,1	13,1	15,04	14,81
Konstruksi	4.712,4	5.264,2	5.753,08	6.371,9	7.110,3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7702,4	8.634,1	9.621,63	10.840,52	11.471,23
Transportasi dan Pergudangan	2.125,6	2.461,8	2.642,1	2.900,0	3.104,7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.321,4	1.459,8	1.609,0	1.734,0	1.896,8
Informasi dan Komunikasi	849,1	941,7	1.034,0	1.135,3	1.254,8
Jasa Keuangan dan Asuransi	998,5	1.095,3	1.198,1	1.280,6	1.408,1
Real Estat	1.823,4	1.964,7	2.104,4	2.281,2	2.517,5
Jasa Perusahaan	154,0	169,6	176,3	196,7	217,2
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.025,6	3.471,6	3.781,6	4.116,3	4.372,0
Jasa Pendidikan	1.362,8	1.639,7	1.859,5	1.190,3	2.128,6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	629,9	710,7	759,8	845,2	905,7
Jasa lainnya	371,7	426,6	493,1	548,5	600,43
PDRB	56.373,6	60.987,3	65.048,2	69.861,2	73.069,3

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel 1.10

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013–2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Miliar)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan	7.557,7	8.254,3	8.743,5	9.116,9	9.083,8
Pertambangan dan Pencaharian	6.230,2	6.354,1	6.458,09	6.491,1	6.633,04
Industri Pengolahan	10.143,3	10.270,4	10.400,6	10.668,4	11.363,05
Pengadaan Listrik dan Gas	31,5	34,4	38,9	43,7	45,864
Pengadaan Air, Pengelolaan	7,3	7,7	8,1	8,6	9,406
Konstruksi	3.414,7	3.552,4	3.760,1	4.021,6	4.252,1
Perdagangan Besar dan Eceran:	5.846,6	6.140,7	6.402,1	6.727,7	7.259,8
Transportasi dan pergudangan	1.484,8	1.570,8	1.662,3	1.752,3	1.892,2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	931,0	1.000,6	1.034,8	1.084,5	1.136,5
Informasi dan Komunikasi	740,2	790,9	849,0	926,9	1.002,9

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Dengan demikian, distribusi keempat kategori terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi sangat dominan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.13, menunjukkan bahwa berdasarkan nilai PDRB ADHB, persentase distribusi keempat sektor terhadap PDRB mencapai sebesar 66,45 persen.

Tabel 1.11

Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013–2017 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)

N	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan	18,40	19,22	19,78	20,16	18,79
B.	Pertambangan dan Pencaharian	14,09	13,52	12,68	11,89	11,69
C.	Industri Pengolahan	23,99	22,84	21,13	20,11	20,40
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,0	0,0	0,0	0,10	0,1
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,0	0,0	0,0	0,02	0,0
F.	Konstruksi	8,2	8,3	8,6	8,84	9,1
G.	Perdagangan Besar dan	13,24	13,51	14,16	14,81	15,57
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,7	3,7	4,0	4,06	4,1
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan	2,2	2,3	2,3	2,47	2,4
J.	Informasi dan Komunikasi	1,5	1,5	1,5	1,59	1,6
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,7	1,7	1,8	1,83	1,8
L.	Real Estate	3,1	3,2	3,2	3,24	3,2
M, N.	Jasa Perusahaan	0,2	0,2	0,2	0,28	0,2

O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	5,2	5,3	5,6	5,81	5,8
P.	Jasa Pendidikan	2,3	2,4	2,6	2,86	2,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,1	1,1	1,1	1,17	1,2
R,S,T.	Jasa Lainnya	0,6	0,6	0,7	0,76	0,7
PDR		100,0	100,0	100,0	100,	100,00

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Selanjutnya, berdasarkan nilai PDRB ADHK Tahun 2010 sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.14, menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi keempat sektor terhadap PDRB mencapai sebesar 65,25 persen. Dari total persentase tersebut rata-rata sekitar 20,2 persen merupakan kontribusi dari kategori industri pengolahan sebagai sektor sekunder, sector primer yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 18,29 persen dan pertambangan dan penggalian sebesar 11,02 persen, Sedangkan untuk perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebagai sektor tersier memiliki kontribusi sekitar 15,74 persen.

Tabel 1.12
Perkembangan Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2017 Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)

NO	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
	((2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,91	18,69	19,03	19,06	18,29
B.	Pertambangan dan Penggalian	14,77	14,39	14,06	13,57	11,02
C.	Industri Pengolahan	24,04	23,26	22,63	22,29	20,2
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,09	0,11
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F.	Konstruksi	8,09	8,04	8,18	8,40	9,74
G.	Perdagangan Besar dan Eceran Motor	13,86	13,90	13,93	14,07	15,74
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,52	3,56	3,61	3,66	4,19
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,21	2,27	2,25	2,27	2,53
J.	Informasi dan Komunikasi	1,75	1,79	1,85	1,94	1,65
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,73	1,74	1,74	1,80	1,83
L.	Real Estate	3,11	3,18	3,14	3,12	3,38
M,	Jasa Perusahaan	0,26	0,26	0,26	0,25	0,29
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	4,77	4,87	5,08	5,20	6,17
P.	Jasa Pendidikan	2,14	2,19	2,31	2,39	2,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,13	1,13	1,16	1,17	1,22
R,S,T.	Jasa Lainnya	0,62	0,64	0,66	0,71	0,82
P		100,0	100,0	100,0	100,0	100,00

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2013–2017 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tren menunjukkan terus mengalami peningkatan. Besaran perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan besaran perekonomian nasional relatif kecil. Oleh karena itu, besaran perekonomian daerah kabupaten dan kota juga relatif kecil.

Tabel 1.13

Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2013–2017 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

Sekto (1)	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 (6)
Kabupaten Bangka	9.139.6	10.174.8	11.001.4	11.771.6	12.807.9
Kabupaten Bangka Barat	9.538.4	10.686.7	11.473.7	12.249.1	13.221.4
Kabupaten Bangka Tengah	6.198.2	6.690.2	7.056.1	7.468.6	7.971.9
Kabupaten Bangka Selatan	5.820.0	6.435.9	6.947.7	7.541.2	8.165.1
Kabupaten Belitung	6.000.3	6.731.1	7.328.1	8.001.8	8.738.1
Kabupaten Belitung Timur	5.082.8	5.666.8	6.125.9	6.604.0	7.151.8

Sumber: BBDA BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Selanjutnya, dilihat berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010 sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.16, juga menunjukkan bahwa besaran perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017 relatif lebih kecil dibandingkan dengan besaran perekonomian nasional. Dari besaran PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah Kabupaten Bangka Barat diikuti oleh Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

Tabel 1.14
Perkembangan PDRB Tahun Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Bangka	7.769.12	8.143.12	8.512.42	8.906,23	9.355.33
Kabupaten Bangka Barat	7.972.79	8.349.26	8.769.64	9.189.73	9.673.06
Kabupaten Bangka Tengah	5.178.28	5.255.77	5.271.87	5.432.80	5.620.43
Kabupaten Bangka Selatan	4.852.97	5.068.27	5.284.64	5.511.77	5.763.78
Kabupaten Belitung	4.934.00	5.167.07	5.400.94	5.669.54	5.969.54
Kabupaten Belitung Timur	4.258.05	4.487.30	4.675.21	4.873.90	5.110.24
Kota Pangkalpinang	6.951.02	7.247.50	7.555.02	7.945.99	8.358.48
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	40.104.9	42.190.9	44.159.4	49.986.8	52.212
Nasional	7.727.083.4	8.156.497.8	8.564.866.	8.982.511.	9.912.749.30

Sumber: BBDA BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

4. Kondisi Pemerintahan

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk sekretariat, unsur pengawas diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, maka telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

D. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi berdasarkan urusan yang dimiliki merupakan Daerah Otonom yang seluas-luasnya. Provinsi sebagai Daerah Otonom yang luas menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan.

Mengacu pada PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi meliputi : Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan persandian, ketahanan pangan,

pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, perpustakaan. Sedangkan urusan yang bersifat pilihan meliputi pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh seorang Gubernur yang dibantu seorang Wakil Gubernur. Asas penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri dari atas : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas.

Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Kepala Daerah :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
3. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.
4. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan atau dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah :

1. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang bersangkutan.
2. Dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah Gubernur mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - c. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kewajiban Gubernur sebagai Kepala Daerah :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
8. Melaksanakan prinsip dan tata pemerintahan yang bersih dan baik;
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;

10. Menjalani hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
11. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD;
12. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

E. ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis daerah merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategi yang sedang dihadapi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah dan sumber daya alam.
2. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup.
3. Ketersediaan Prasarana dan sarana yang belum memadai.
4. Kualitas SDM dan Kependudukan belum mantap.
5. Kondisi Pemerintahan dan Politik yang belum mantap.
6. Sosial Budaya yang dipengaruhi oleh meningkatnya kriminalitas, masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana dan belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 terdiri dari 4 Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan lakip, gambaran umum kondisi daerah , kedudukan , tugas pokok, wewenang dan kewajiban gubernur, isu strategis daerah , dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menegaskan kembali secara singkat melalui matriks keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2017 yang telah direvisi dari Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 di tahun 2016, dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

Dalam Bab ini menjelaskan :

- A. Capaian kinerja pemerintah daerah berupa, perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2016 dengan tahun 2017 dan tahun sebelumnya, pengukuran pencapaian kinerja, analisis pengukuran pencapaian kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, evaluasi akuntabilitas kinerja, keberhasilan dan kegagalan, hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil ,dan analisis program/kegiatan yang

menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- B. Realisasi Anggaran. Pada bab ini diukur dan dianalisis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016, apakah mengalami kenaikan/penurunan capaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum dari pencapaian kinerja tiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dan saran yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah pada masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah: "*Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi*". Pernyataan visi ini mengandung enam makna yaitu :

1. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. **Sejahtera** menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tingkat Pendapatan Masyarakatnya terus meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat relatif kecil.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam berinovasi untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung, sehingga unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.

5. **Efisien dan Cepat** dimaknai mampu mengelola anggaran pembangunan yang optimal dan hemat, dengan peningkatan penggunaan e-*Government* (TI) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. **Teknologi** dimaknai dengan penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (lima) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu :

1. **Meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;**

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. **pembangunan ekonomi** adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor.
- b. **Berbasis potensi daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan, serta industry pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.

2. **Mewujudkan Infrastruktur dan Konektivitas daerah yang berkualitas;** pernyataan misi ini mengandung makna :
 - a. **Infrastruktur** adalah pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.
 - b. **konektivitas daerah** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat,efisien dan berkualitas.
3. **Meningkatkansumber daya manusia unggul dan handal;**

Pernyataan misi ini mengandung makna :

 - a. **sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - b. **unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik diukur dari rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.
4. **Meningkatnya kesehatan masyarakat;**

Pernyataan misi ini mengandung makna :

 - a. **kesehatan masyarakat** adalah tingkat kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.
5. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;**

Pernyataan misi ini mengandung makna :

 - a. **tata kelola pemerintahan yang baik** adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

- b. **pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

6. **Meningkatnya pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;**

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **pengendalian bencana** adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana.
- b. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

3. **Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan misi masing-masing.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan RPJPD 2005-2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; RPJMD Nasional 2015-2019; visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih; RPJMD Provinsi

Tetangga yang berbatasan dan terdekat. Permasalahan yang ada, Isu-isu strategis,serta capaian kinerja urusan pemerintahan 5 tahun yang lalu (2012-2017), maka dengan menggunakan penyelarasan serta analisis SWOT, ditetapkan tujuan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat
3. Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas
4. Meningkatnya pendidikan masyarakat
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
6. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas
7. Terwujudnya pembangunan demokrasi
8. Meningkatnya tata kelola kebencanaan
9. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup

Untuk mencapai ke 9 (Sembilan) tujuan ini, maka ditetapkan sasaran sejumlah 22 (dua puluh dua) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya Produksi sub sektor pertanian,peternakan,perburuan dan jasa pertanian
2. Meningkatnya produksi sub sektor perikanan
3. Meningkatnya kunjungan wisatawan
4. Meningkatnya produksi sektor pertambangan
5. Meningkatnya pembangunan berbasis industry
6. Terwujudnya kemandirian energi
7. Meningkatnya belanja pemerintah daerah
8. Menurunnya angka pengangguran
9. Menurunnya angka kemiskinan
10. Menurunnya angka inflasi
11. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
12. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah
13. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat

14. Meningkatnya konektivitas antar wilayah
15. Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat
16. Meningkatnya pembangunan kesehatan masyarakat
17. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
18. Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien
19. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan public yang berkualitas
20. Meningkatnya kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi
21. Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana
22. Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup

Baik tujuan maupun sasaran, semuanya ditetapkan indikatornya, disertai target, target capaian selama 5 tahun (2017-2022), sehingga bisa diukur keberhasilan pencapaiannya, dan ditetapkan dalam RPJMD ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indicator tujuan dan indicator sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 dengan rincian sebagai berikut :

Misi I: Meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indicator kinerja tujuan :
 - a. Meningkatnya persentase pertumbuhan PDRB, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
 - Meningkatnya Produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian dengan indicator kinerja sasaran persentase Pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan
 - Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dengan indicator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan

- Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata dengan indicator kinerja sasaran jumlah kunjungan wisatawan domestic dan mancanegara
 - Meningkatnya produksi sektor pertambangan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian
 - Meningkatnya pembangunan berbasis industry dengan indicator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan produksi sektor industry pengolahan
 - Terwujudnya kemandirian energi dengan indikator kinerja sasaran persentase pertumbuhan produksi sub sektor ketenagalistrikan
2. Meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat dengan indicator tujuan sebagai berikut :
- a. Pengeluaran pemerintah perkapita yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
 - Meningkatnya belanja pemerintah daerah dengan indicator kinerja sasaran persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah
 - b. Pendapatan perkapita masyarakat yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
 - Menurunnya angka pengangguran dengan indikator kinerja sasaran persentase Angka Pengangguran
 - Menurunnya angka kemiskinan dengan indikator kinerja sasaran persentase Angka kemiskinan
 - Menurunnya angka inflasi dengan indikator kinerja sasaran Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan indikator kinerja sasaran persentase laju pertumbuhan penduduk

Misi II: Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas, yang dijabarkan

dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas dengan indikator tujuan persentase pertumbuhan subsector jasa konstruksi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

- Terbangunnya Daerah Irigasi (ha)
- Ketersediaan Air Baku (M3)
- Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi

b. Meningkatnya Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

- Persentase akses jalan lingkungan yang memadai
- Persentase kawasan permukiman yang tertata
- Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi

c. Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dengan indikator kinerja kinerja sasaran sebagai berikut :

- Persentase Kunjungan Kapal di pelabuhan laut
- Persentase armada pengangkutan
- Persentase jalan kondisi mantap

Misi III: Meningkatnya Sumber daya manusia unggul dan handal, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya lama sekolah masyarakat dengan indicator tujuan Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat dengan indikator kinerja sasaran

- b. Angka harapan lama sekolah (Angka harapan lama sekolah, Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)

Misi IV: Meningkatkan kesehatan masyarakat, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indicator tujuan Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup laki-laki, Angka Usia Harapan Perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka kesehatan Masyarakat;

Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berkualitas dengan indicator tujuan Pertumbuhan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :
 - Opini Audit BPKK atas Laporan Keuangan
 - Tingkat kematangan Maturitas SPIP
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat
 - Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat
 - b. Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :
 - Indeks Profesionalitas ASN
 - Nilai Rata-rata delapan area perubahan
 - c. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Pelayanan public yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

- Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (KSM)
 - Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
2. Terwujudnya pembangunan demokrasi dengan indicator tujuan indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
- Skor aspek kebebasan sipil
 - Skor aspek kebebasan politik
 - Skor aspek lembaga demokrasi

Misi VI : Meningkatkan Pengendalian Bencana dan kualitas lingkungan hidup, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola kebencanaan dengan indikator tujuan Indeks Resiko Bencan (IRB), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut
 - a. Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana dengan indicator kinerja sasaran Indeks Kapasitas Bencana Daerah
2. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dengan indicator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja sasaran indeks kapasitas daerah sasaran sebagai berikut:
 - Indeks Kualitas Air Sungai
 - Indeks Udara
 - Indeks Tutupan Lahan
 - Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Keterkaitan dan konsistensi antara visi, misi, tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, sasaran dan Indikator kinerja sasaran beserta target selama 5 tahun digambarkan seperti pada Tabel V.1 berikut ini

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator
Kinerja Sasaran RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visi

"Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan cepat Berbasis Teknologi"

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5
Misi 1. Meningkatkan Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah				
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1 Persentase Pertumbuhan PDRB	1 Meningkatkan Produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan 2 Meningkatkan Produksi sub sektor perikanan 3 Meningkatkan pengembangan pembangunan pariwisata 4 Meningkatkan produksi sektor pertambangan 5 meningkatnya pembangunan berbasis industry 6 Terwujudnya Kemandirian Energy	1 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian,peternakan dan jasa perkebunan 1 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan 1 Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara 1 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertambangan dan penggalian 1 Persentase pertumbuhan produksi sub sektor Industri pengolahan
2	Meningkatnya pendapatan pemerintah dan Masyarakat	1 pengeluaran pemerintah perkapita 2 Pendapatan Perkapita Masyarakat	1 Meningkatkan Belanja Pemerintah Daerah 1 menurunnya angka pengangguran 2 Menurunnya angka kemiskinan 3 Menurunnya angka inflasi 4 Terkendalinya Laju Pertumbuhan penduduk	1 Persentase pertumbuhan belanja pemerintah daerah 1 Persentase Angka Pengangguran 1 Persentase Angka Kemiskinan 1 Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas

3	Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas daerah yang berkualitas	1 Pertumbuhan subsector jasa konstruksi	1 Pembangunan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	1 Terbangunan Daerah Irigasi (ha) 2 Ketersediaan air baku (m3)
			2 Meningkatkan pemenuhan Infrastruktur dasar masyarakat	1 Persentase akses jalan lingkungan yang memadai 2 Persentase kawasan Permukiman yang tertata 3 Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
			3 Meningkatkan Konektivitas antar wilayah	1 Persentase Kunjungan kapal di Pelabuhan Laut 2 persentase armada pengangkutan 3 Persentase jalan kondisi mantap

Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal

4	Meningkatnya Lama Sekolah Masyarakat	1 Rata-rata lama sekolah	1 Meningkatkan pendidikan bagi masyarakat	1 Angka harapan lama sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lam sekolah perempuan)
---	--------------------------------------	--------------------------	---	---

Misi IV. Meningkatkan kesehatan bagi masyarakat

5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Angka Usia Harapan Hidup (Angka Usia Harapan Hidup Gabungan, Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	1 Meningkatkan kesehatan masyarakat	1 Angka Kesehatan Masyarakat
---	---	---	-------------------------------------	------------------------------

Misi V. Mewujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi

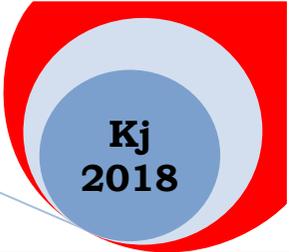
6	Terwujudnya Reformasi birokrasi yang berkualitas	1 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi	1 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan 2 Tingkat Kematangan Maturitas SPIP
---	--	---------------------------------------	---	--

			2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi
			3 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	4 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
7	Terwujudnya Pembangunan Demokrasi	1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	1 Meningkatnya Kebebasan Sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat	1 Nilai rata-rata delapan area perubahan
Misi VI. Pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup				2 Indeks Profesionalitas ASN
8	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	1 Indeks Resiko Bencana	1 Meningkatnya Kapasitas terhadap penanggulangan bencana	1 Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
9	Meningkatnya tat kelola lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(ILKH)	1 Peningkatan pengendalian lingkungan Hidup	2 Nilai Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat
				1 aspek kebebasan sipil
				2 Skor aspek hak-hak politik
				3 Skor aspek lembaga demokrasi
				1 Indeks kapasitas Bencana Daerah
				1 Indeks Kualitas air sungai
				2 Indeks kualitas udara
				3 Indeks tutupan
				4 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

**Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Tujuan RPJMD 2017-2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB	4,11	4,30	4,40	4,50	4,60	4,70	4,70
2	Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan Masyarakat	Pengeluaran pemerintah perkapita (dalam ribuan)	1.864	1.890	1.940	1.980	2.020	2.060	2.060
3	Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas	Pertumbuhan subsector jasa konstruksi	6,90	6,95	7,00	7,10	7,20	7,30	7,30
4	Meningkatnya lama sekolah masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan)	7,68 L=8,90 P=7,76	7,76 L=7,90 P=6,76	7,83 L=7,94 P=6,98	7,89 L=7,96 P=6,99	7,92 L=7,98 P=7,00	8,00 L=8,00 P=7,05	8,00 L=8,00 P=8,10
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki,Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	69,97 L=68,17 P=71,96	69,98 L=68,24 P=72,00	70,16 L=68,37 P=72,12	70,23 L=68,40 P=72,23	70,36 L=68,50 P=72,30	70,48 L=68,60 P=72,30	70,48 L=68,60 P=72,45
6	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	63,15	64,08	65,39	67,41	68,43	69,50	69,50

Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Kj
2018

7	Terwujudnya pembangunan demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	83,10	74,77	75,24	75,65	75,83	76,00	76,00
8	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	162	159	156	153	150	147	147
9	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,59	59,76	60,96	62,18	63,42	64,69	64,69

B. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan atas tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, selanjutnya untuk memperjelas capaian tujuan dan sasaran dimaksud maka disusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Perda Nomor 14 tahun 2017 tentang RPJMD Tahun 2017-2022. Indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 tahun 2017 – 2022.

Bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan tujuan, sasaran strategis dan yang diimplementasikan kedalam perjanjian kinerja. Adapun gambaran sasaran strategis sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3

Sasaran Startegis dan Indikator Kinerja Utama serta Target

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PD
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	$Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$ <p>dengan Y :Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan. X_t : Nilai produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan pada tahun ini X_{t-1} : Nilai produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan pada tahun lalu</p>	Dinas Petanian
2	Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan	$Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$ <p>dengan Y :Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan. X_t : Nilai produksi sub sektor perikanan pada tahun ini X_{t-1} : Nilai produksi produksi sub sektor perikanan pada tahun lalu</p>	Dinas Kelautan dan Perikanan

3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (Tamu Asing dan Indonesia)	Jumlah orang yang datang dengan tujuan untuk menginap di hotel dan atau mempergunakan fasilitas atau jasa-jasa hotel yang telah disediakan. (RUMUS)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan tahun ini dikurangi jumlah wisatawan tahun lalu dibagi jumlah wisatawan tahun lalu dikali 100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Meningkatnya produksi sektor pertambangan	Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian	$Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$ <p>dengan</p> <p>Y :Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian</p> <p>X_t : Nilai produksi sektor pertambangan dan penggalian pada tahun ini</p> <p>X_{t-1} : Nilai produksi sektor pertambangan dan penggalian pada tahun lalu</p>	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Meningkatnya produksi sector perindustrian	Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan	$Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$ <p>dengan</p> <p>Y :Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan</p> <p>X_t : Nilai produksi sektor industri pengolahan pada tahun ini</p> <p>X_{t-1} : Nilai produksi sektor industri pengolahan pada tahun lalu</p>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

6	Terwujudnya kemandirian energi	Rasio Elektrifitas	$\frac{\text{Jumlah pelanggan}}{\text{jumlah rumah tangga}} \times 100 \%$	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7	Meningkatnya kemandirian fiscal	Rasio Pendapatan Asli (PAD) Daerah terhadap APBD	Total Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	Badan Keuangan Daerah
8	Menurunnya pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase penduduk yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dari sejumlah angkatan kerja yang ada. $TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja
9	Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	<i>Headcount Index</i> (HCI – P ₀) yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan. <i>Headcount index</i> secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin. $P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$ Dimana: P ₀ = Persentase penduduk miskin (<i>head count index</i>) z = Garis kemiskinan y _i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3, ..., q); y _i < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk	Dinas Sosial

10	Menurunnya Inflasi	Angka Inflasi	<p>Merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Hitungan perubahan harga tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau <i>Consumer Price Index (CPI)</i>. Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi.</p> <p>Rumusnya:</p> $INF_n = \frac{(IHK_n - IHK_{n-1})}{IHK_{n-1}} \times 100$ <p>Dimana:</p> <p>INF_n : inflasi atau deflasi pada waktu (bulan atau tahun) (n) IHK_n : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n) IHK_{n-1} : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n-1)</p>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	<p>Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>Rumus:</p> $r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$ <p>Metode Geometri</p> <p>r : laju pertumbuhan penduduk P_t : jumlah penduduk pada tahun t P₀ : jumlah penduduk pada tahun awal t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)</p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Kependudukan Catatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

12	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Rasio ketersediaan transportasi layak jalan	Jumlah ketersediaan angkutan dibagi jumlah penduduk	Dinas Perhubungan
		indeks konektiviti kabupaten/kota	<u>Jumlah jaringan jalan provinsi</u> jumlah kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	<u>Jumlah Desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps x 100%</u> Jumlah desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	<p>Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.</p> $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana: HLS_a^t =Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (a, a+1, ..., n)</p>	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	Dinas Pendidikan

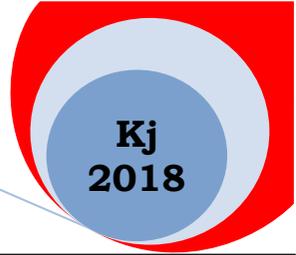
			$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$ <p>dengan:</p> <p>P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas</p> <p>Lama sekolah penduduk ke-i =</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak pernah sekolah = 0 b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 	
15	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu	<p>jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun</p> <p style="text-align: right;">_____ x 100.000</p> <p>Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama</p>	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi	$AKB = \frac{D_{0-1th}}{\Sigma \text{ Lahir Hidup}} \times 1000$ <p>Dimana :</p> <p>D_{0-1th} = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.</p>	Dinas Kesehatan

			ΣLahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	
		Angka Stunting	<p>Angka Stunting = $(\frac{\Sigma \text{Balita sangat pendek}}{\Sigma \text{Balita}}) \times 100\% + (\frac{\Sigma \text{Balita pendek}}{\Sigma \text{Balita}}) \times 100\%$</p> <p>Dimana :</p> <p>ΣBalita sangat pendek = jumlah balita sangat pendek pada waktu tertentu</p> <p>ΣBalita pendek = jumlah balita sangat pendek pada waktu tertentu</p> <p>ΣBalita = Jumlah balita pada waktu tertentu</p>	Dinas Kesehatan
16	Meningkatnya Tata kelola pemerintah yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	Badan Keuangan Daerah
		Indek Reformasi Birokrasi	Penilaian Nilai Indeks yang dikeluarkan oleh KEMENPANRB terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi
17	Meningkatnya aspek kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	Nilai skor aspek kebebasan sipil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang terdiri dari variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
18	terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	Nilai skor aspek hak-hak politik Indeks Demokrasi Indonesia yang terdiri dari variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19	meningkatnya kualitas lembaga	Skor aspek lembaga demokrasi	Nilai skor aspek lembaga demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia yang terdiri dari variabel pemilu yang bebas dan adil, peran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	demokrasi		DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peran peradilan yang independen	
20	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	$C = V \times H/R$ $R = H \times V/C$ R= Risiko V= vulnerability (kerentanan) H= Hazard (bahaya) C= Kapasitas (kemampuan) Risiko (kerugian) berbanding lurus dengan besarnya ancaman (bahaya) dan kerentanan Kerentanan berbanding terbalik dengan kemampuan (kapasitas)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH \text{ Provinsi} = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ IKLH = indeks kualitas Lingkungan Hidup IKA =Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup Daerah

C. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA

Strategis dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan Upaya pencapaiannya tujuan dan sasaran dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.



1. Strategi & Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan misi yaitu:

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4
Misi I. Meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah			
1.	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan	1. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan 2. Meningkatnya produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan 3. Mengembangkan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan
		2. Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	4. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil 5. Meningkatnya produksi dan pengolahan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya 6. Mengembangkan kawasan sentra kelautan dan perikanan
		3. Meningkatnya kunjungan wisatawan	7. Meningkatnya sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata 8. Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata 9. Mengembangkan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
		4. Meningkatnya produksi pertambangan	10. Meningkatnya hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan
		5. Meningkatnya pembangunan berbasis industry	11. Mengembangkan kawasan industri berbasis potensi daerah
		6. Terwujudnya kemandirian energy	12. Meningkatnya produksi dan pasokan energy listrik di daerah
2.	Meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat	7. Meningkatnya belanja pemerintah daerah	13. Meningkatnya pendapatan asli daerah
		8. Menurunnya angka pengangguran	14. Meningkatnya pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan
		9. Menurunnya angka kemiskinan	15. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin

			secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.
		10. Menurunnya angka inflasi	16. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi
		11. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	17. Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
Misi II. Mewujudkan Infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas			
3.	Meningkatnya Infrastruktur dan Konektifitas daerah yang berkualitas	12. Meningkatnya pembangunan infrastruktur pengembangan potensi daerah	18. Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
			19. Meningkatnya ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur air baku
		13. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	20. Meningkatnya ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat
			21. Meningkatnya penataan kawasan permukiman
			22. Meningkatnya ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
		14. Meningkatnya konektifitas antar wilayah	23. Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut
			24. Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat
			25. Meningkatnya aksesibilitas
Misi III. Meningkatnya sumber daya manusia unggul dan handal			
4.	Meningkatnya Lama sekolah masyarakat	15. Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat	26. Meningkatnya partisipasi sekolah untuk masyarakat
			27. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
Misi IV. Meningkatnya kesehatan masyarakat			
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	16. Meningkatnya kesehatan masyarakat	28. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi			
6.	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	17. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	29. Meningkatnya tata kelola asset dan laporan keuangan daerah
			30. Meningkatnya tata kelola pengawasan
			31. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja
			32. Meningkatnya tata kelola penataan peraturan perundang-undangan
			33. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa
		18. Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	34. Meningkatnya factor pengungkit dan factor hasil pencapaian Reformasi Birokrasi
			35. Meningkatnya tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah
		19. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Pelayanan public yang berkualitas	36. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
	7. Terwujudnya pembangunan demokrasi	20. Meningkatnya Kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat	37. Menciptakan Iklim berdemokrasi yang kondusif
			38. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat
			39. Meningkatnya pengembangan lembaga demokrasi
Misi VI. Meningkatnya pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup			
8.	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	21. Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	40. Meningkatnya kemampuan pencegahan dan penanggulangan bencana melalui penambahan sarana, SDM dan Pelatihan
			41. Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana
9.	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	22. Meningkatnya Kualitas Lingkungan	42. Meningkatnya kualitas air
			43. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan hutan
			44. Meningkatnya Pengendalian terhadap Lingkungan

Indikator kinerja utama (IKU) kepala daerah adalah indikator impact/dampak hal ini terlihat dari konsep Jenis-jenis indikator kinerja yang dihubungkan dengan struktur organisasi dari pemerintah daerah. Indikator impact itu sendiri ketika dikaitkan dengan perencanaan kinerja yang tertuang didalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih, yang kemudian diturunkan kedalam tujuan dan sasaran RPJMD yang dilengkapi dengan parameter pengukurnya yang dinamakan dengan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran.

Dua indikator kinerja tersebut sama dengan indikator impact/dampak dalam konsep jenis-jenis indikator kinerja yang juga mencerminkan indikator kinerja utama (IKU) dari seorang kepala daerah. Dimana dalam pencapaian iku dari seorang kepala daerah dapat dicapai jika Indikator Kinerja Utama (IKU) dari setiap kepala perangkat daerahnya (OPD) dicapai dengan cara bekerja secara bersama-sama/simultan antar kepala perangkat daerah (OPD) untuk pencapaian iku dari seorang kepala daerah. Dalam hal ini iku dari seorang kepala perangkat daerah (OPD) jika dikaitkan dengan konsep struktur indikator kinerja mencerminkan indikator benefit/manfaat yang tertuang didalam indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran Renstranya Perangkat Daerah (OPD).

Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran yang mencerminkan indikator impact atau dampak yang terjadi jika pembangunan daerah yang dilakukan berhasil dalam mensejahterakan masyarakat. Indikator-indikator impact/dampak tersebut, yang mempunyai kapasitas secara independent dalam mengukurnya secara priodik adalah institusi BPS yang dalam bekerjanya juga mereka dipayungi oleh undang-undang. Dalam mereka mengukur indikator-indikator kinerja dampak yang mencerminkan keberhasilan pembangunan dari suatu daerah juga harus dapat dibandingkan dengan capain daerah-daerah lainnya dengan menggunakan konsep dan metode yang sama.

Dalam pengukurannya, antara indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran merupakan indikator yang mempunyai hubungan keterkaitan langsung yang sangat kuat, dimana indikator kinerja tujuan merupakan hasil dari perhitungan secara matematika yang menggunakan indikator kinerja sasaran sebagai penyebut atau pun pembilang yang tertuang dalam rumus matematika yang terstandar dan terformulasi secara baku. Bila kita ilustrasikan indikator kinerja tujuan tersebut sebagai motornya dan komponen-komponen dari motornya sebagai indikator kinerja sasarannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran merupakan sama-sama indikator impact/dampak yang saling terkait secara hirarki, yang keduanya juga mencerminkan indikator kinerja utama dari seorang kepala daerah. Sehingga dalam penyusunan perjanjian kinerja kepala daerah yang paling tepat untuk mempayungi semua indikator kinerja yang berada dibawahnya adalah indikator kinerja tujuan yang merupakan dampak paling makro dari pembangunan daerah yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah yang tertuang didalam indikator kinerja tujuan RPJMD.

Hal diatas dilakukan adalah mengingat indikator sasaran yang ada pada sasaran strategis belum SMART sehingga perlu dilakukan perubahan IKU yang menyebabkan perubahan RPJMD Perovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sampai saat Laporan Kinerja ini ditulis revisi RPJMD sedang dalam proses perubahan yang bersifat mutattis mutandis yaitu merubah Peraturan Daerah tentang RPJMD 2017-2022.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar

evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2017 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi pada tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah. Adapun rincian mengenai Perjanjian Kinerja Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	4,80
2	Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan	3,80
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (Tamu Asing dan Indonesia)	400.050
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,09
4	Meningkatnya produksi sektor pertambangan	Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,53
5	Meningkatnya produksi sektor perindustrian	Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan	2,63
6	Terwujudnya kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi	100,%
7	Meningkatnya kemandirian fiskal	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	0,27
8	Menurunnya pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	3,70
9	Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	5,10
10	Menurunnya Inflasi	Angka Inflasi	6,42
11	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	2,09

12	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Rasio ketersediaan transportasi layak jalan	0,00038
		Indeks konektiviti kabupaten/kota	12,16
		Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,20
13	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	11,84
		Rata-rata lama sekolah	7,85
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,59
		Angka Kematian Ibu	89,85 (39/KH)
		Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	7,2/1000 KH
		Angka Stunting	26,5
15	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	67,5
16	Meningkatnya aspek kebebasan sipil	skor aspek kebebasan sipil	87,75
17	Terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	skor aspek hak-hak politik	81,72
18	meningkatkan kualitas lembaga demokrasi	skor aspek lembaga demokrasi	80,30
19	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Integritas Pelayanan publik	8,0
20	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	Rendah (0,15)
21	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,60

E. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, perlu upaya untuk pencapaian sasaran yang dirumuskan dalam program prioritas daerah. Adapun program prioritas masing-masing untuk mencapai sasaran 2017 sebagai berikut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018	program	Pagu (RKPD)
1				5	6
1	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSENTASE PERTUMBUHAN PDRB	4,30	1. program pengembangan prasarana, sarana pertanian dan penyuluhan pertanian	4,551,447,720.00
				2. program peningkatan pelayanan teknis pengawasan dan sertifikasi mutu benih	441,573,000.00
				3. program peningkatan pelayanan teknis proteksi tanaman	368,380,000.00
				4. program peningkatan pelayanan teknis pengembangan benih pertanian	5,288,106,200.00
				5. program pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	1,552,435,000.00

Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LKj
2018L

				6. program pengembangan perkebunan	4,088,978,500.00
				7. program pengembangan peternakan dan kesehatan hewan	3,649,402,000.00
				8. program peningkatan tata kelola hutan	1,493,071,813.00
				9. program peningkatan tata kelola lingkungan hidup	1,510,118,000.00
				10. program pengembangan informasi dan komunikasi publik	3,029,205,000.00
				11. program peningkatan pelayanan teknis latihan kerja industri	1,026,251,000.00
				12. program pengembangan pelatihan dan penempatan tenaga kerja	204,179,000.00
				13. program peningkatan pelayanan teknis pengembangan produktivitas tenaga kerja	149,533,000.00
				14. program peningkatan dan pengembangan pelayanan pendidikan kejuruan	30,227,149,000.00
				15. program peningkatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi	695,168,900.00
				16. program peningkatan pelayanan teknis latihan perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah	2,947,276,745.00

				17. program peningkatan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hub. industrial dan jaminan sosial	30,970,000.00
				18. program peningkatan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi	926,477,178.00
				19. program peningkatan pemberdayaan usaha kecil	12,588,078,444.00
				20. program pengembangan sumberdaya, fasilitasi dan akses industri	4,205,920,500.00
				21. program peningkatan pelayanan teknis sertifikasi dan pengendalian mutu produk	861,512,000.00
				22. program peningkatan koordinasi kebijakan sumber daya alam	315,389,923.00
				23. program peningkatan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal	337,595,000.00
				24. program peningkatan promosi penanaman modal	840,735,000.00
				25. program peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi	72,960,000.00
				26. program pengembangan pendayagunaan sda, teknologi tepat guna dan pelatihan masyarakat	745,884,000.00

Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LKj
2018L

				1. program pengembangan pengelolaan ruang laut	Rp. 7.741.034.000
				2. program peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Rp. 1.061.719.000
				3. program pengembangan dan pembangunan perhubungan laut	Rp. 2.994.865.200
				4. program peningkatan pelayanan teknis latihan kerja industri	Rp. 1.026.251.000
				5. program pengembangan pelatihan dan penempatan tenaga kerja	Rp. 204.179.000
				6. program peningkatan pelayanan teknis pengembangan produktivitas tenaga kerja	Rp. 149.533.000
				7. program peningkatan dan pengembangan pelayanan pendidikan kejuruan	Rp. 30.227.149.000
				8. program peningkatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi	Rp. 695.168.900
				9. program peningkatan pemberdayaan usaha kecil	Rp.12.588.078.444
				10. program peningkatan pelayanan teknis latihan perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah	Rp. 2.947.276.745
				11. program pengembangan sumberdaya, fasilitasi	Rp. 4.205.920.500

Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LKj
2018L

				dan akses industri	
				12. program pengembangan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan	Rp. 3.016.263.000
				13. program pengembangan perikanan tangkap	Rp. 8.052.255.900
				14. program peningkatan pelayanan teknis pembenihan ikan air payau	Rp. 3.012.052.400
				15. program peningkatan pelayanan teknis pembenihan ikan laut	Rp. 1.776.696.000
				16. program peningkatan pelayanan teknis pembenihan ikan air tawar	Rp. 431.665.000
				17. program peningkatan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hub. industrial dan jaminan sosial	Rp. 30.970.000
				18. program peningkatan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi	Rp. 926.477.178
				19. program peningkatan pelayanan teknis laboratorium pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan	Rp. 718.746.000
				20. program peningkatan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal	Rp. 337.595.000
				21. program peningkatan promosi penanaman modal	Rp. 840.735.000
				22. program peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi	Rp. 72.960.000
				23. program pengembangan wilayah dan	Rp. 791.388.000

Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LKj
2018L

				pengawasan industri	
				24. program peningkatan tata kelola lingkungan hidup	Rp. 1.510.118.000
				25. program penataan ruang dan pertanahan	Rp. 4.394.670.000
				26. program kebinamargaan	Rp. 187.644.025.376
				27. program pengembangan sumber daya air	Rp. 17.190.830.000
				1. program pengembangan pemasaran pariwisata	3,694,524,000.00
				2. program pengembangan destinasi pariwisata	5,848,597,000.00
				3. program pengembangan sumber daya pariwisata, ekonomi kreatif dan kelembagaan kepariwisataan	2,064,009,000.00
				4. program pelestarian budaya	4,563,010,000.00
				5. program peningkatan pemberdayaan usaha kecil	12,588,078,444.00
				6. program peningkatan dan pengembangan pelayanan pendidikan kejuruan	30,227,149,000.00
				7. program pengembangan informasi dan komunikasi publik	3,029,205,000.00
				8. program pengembangan pelatihan dan penempatan tenaga kerja	204,179,000.00
				9. program peningkatan pelayanan teknis latihan	

Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LKj
2018L

				kerja industri	1,026,251,000.00
				10. program peningkatan pelayanan teknis pengembangan produktivitas tenagakerja	149,533,000.00
				11. program peningkatan dan pengembangan pelayanan pendidikan kejuruan	30,227,149,000.00
				12. program peningkatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi	695,168,900.00
				13. program peningkatan pembudayaan dan peningkatan prestasi olah raga	4,062,630,300.00
				14. program peningkatan pemberdayaan usaha kecil	12,588,078,444.00
				15. program pengembangan sumberdaya, fasilitasi dan akses industri	4,205,920,500.00
				16. program peningkatan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal	337,595,000.00
				17. program peningkatan promosi penanaman modal	840,735,000.00
				18. program peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan sistem informasi	72,960,000.00
				19. program pengembangan dan pembangunan perhubungan laut	2,994,865,200.00
				20. program pengembangan dan pembangunan perhubungan darat	10,394,063,300.00
				1. pengembangan pertambangan mineral bukan logam dan batuan	1.410.000.000

Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LKj
2018L

				2. pengembangan pertambangan mineral logam	2.743.944.000
				3. peningkatan pengelolaan geologi dan air tanah	2.180.259.000
				program penataan ruang dan pertanahan	4,394,670,000.00
				program kebinamargaan	187,644,025,376.00
				program pengembangan sumber daya air	17,190,830,000.00
				program pengembangan wilayah dan pengawasan industri	791,388,000.00
				program pengembangan dan pembangunan perhubungan laut	2,994,865,200.00
				program peningkatan tata kelola hutan	Rp. 1.493.071.813
				program pengembangan dan pembangunan perhubungan darat	10,394,063,300.00
				program peningkatan tata kelola lingkungan hidup	Rp. 1.510.118.000
				1. pengembangan sumber daya energi	9.724.914.500
2	MENINGKATNYA PENDAPATAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT	PENGELUARAN PEMERINTAH PERKAPITA (DALAM RIBUAN)	1.890	program peningkatan tata kelola pendapatan pajak daerah	12,841,233,203.00
				program peningkatan tata kelola retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah	587,572,600.00
				program pengembangan pelatihan dan penempatan tenaga kerja	204,179,000.00

**Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



				program peningkatan pelayanan teknis laboratorium lingkungan	1,383,820,000.00
				program pelayanan teknis laboratorium kesehatan	1,208,586,700.00
				program pengembangan sumber daya manusia asn	6,970,478,360.00
				program penataan ruang dan pertanahan	4,394,670,000.00
				program pengawasan dan peralatan	1,138,490,000.00
				program pengembangan pertambangan mineral logam	1,262,441,000.00
				program pengembangan sumber daya energi	14,361,100,000.00
				program peningkatan pengelolaan geologi dan air tanah	2,832,610,000.00
				program peningkatan pelayanan teknis pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan	718,746,000.00
				program pengembangan perikanan tangkap	8,052,255,900.00
				program peningkatan pelayanan teknis pembenihan ikan air payau	3,012,052,400.00
				program peningkatan pelayanan teknis pembenihan ikan laut	1,776,696,000.00
				program peningkatan pelayanan teknis pembenihan ikan air tawar	431,665,000.00
				program peningkatan pengendalian operasional dan kebandarudaraan	8,542,608,000.00
				program pengembangan pelatihan dan penempatan	

Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LKj
2018L

				tenaga kerja	204,179,000.00
				program pengembangan sumber daya, fasilitasi dan akses industri	4,205,920,500.00
				program peningkatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda	3,417,253,250.00
				program pengembangan perikanan tangkap	8,052,255,900.00
				program pengembangan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan	3,016,263,000.00
				program pengembangan informasi dan komunikasi publik	3,029,205,000.00
				program kebinamargaan	187,644,025,376.00
				program pengembangan sumber daya air	17,190,830,000.00
				program peningkatan pemberdayaan usaha kecil	12,588,078,444.00
				program pengembangan pendayagunaan sda, teknologi tepat guna dan pelatihan masyarakat	745,884,000.00
				program peningkatan kualitas hidup perempuan	893,442,500.00
				program penanganan fakir miskin	10,721,557,500.00
				program pembangunan perumahan	16,490,960,000.00
				program peningkatan dan pengembangan pelayanan pendidikan menengah atas	19.523.659.000,00
				program peningkatan dan pengembangan pelayanan pendidikan kejuruan	30.227.149.000,00
				program pelayanan kesehatan	20,377,246,333.00

Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



				program kesehatan masyarakat	8,714,855,570.00
				program peningkatan kualitas hidup perempuan	893,442,500.00
				program penanganan fakir miskin	10,721,557,500.00
				program pengembangan perdagangan	6,474,577,500.00
				program pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	1,552,435,000.00
				program pengembangan informasi dan komunikasi publik	3.029.205.000,00
				program pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1.479.604.250,00
				program peningkatan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hub. industrial dan jaminan sosial	30,970,000.00
				program perlindungan konsumen dan kemetrolgian	1,186,872,000.00
				program pengembangan dan perdagangan	6,474,577,500.00
				program peningkatan koordinasi kebijakan dan perekonomian	451,210,114.00
				program pengembangan perhubungan laut	2,994,865,200.00
				program kebinawargaan	

Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LKj
2018L

					187,644,025,376.00
				program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam	647,212,000.00
				program penelitian dan pengembangan	1,194,003,000.00
				program pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	1,552,435,000.00
				program pengembangan perikanan tangkap	8,052,255,900.00
				program pengembangan distribusi, stabilitas, dan cadangan pangan	752,752,455.00
				1. program pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil	1.648.170.500,00
				2. program peningkatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1.479.604.250,00
3	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIFITAS DAERAH YANG BERKUALITAS	PERTUMBUHAN SUB JASA KONSTRUKSI	6,95	1. program pengembangan sumber daya air	17,190,830,000.00
				2. program penataan ruang dan pertanahan	4,394,670,000.00
				1. program pengembangan sumber daya air	17,190,830,000.00
				program pengembangan perhubungan laut	2,994,865,200.00
				program pengembangan perhubungan darat	Rp 966.446.000

Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LKj
2018L

				program peningkatan pengendalian, oprasional dan kebandarudaraan	8,542,608,000.00
				program kebinamargaan	Rp 23.053.000.000
4	MENINGKATNYA LAMA SEKOLAH MASYARAKAT	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	7,76	1. program peningkatan dan pegembangan pelayanan pendidikan menengah atas	19.523.659.000,00
				2. program peningkatan dan pengembangan pelayanan pendidikan kejuruan	30.227.149.000,00
				3. program peningkatan dan pengembangan pelayanan pendidikan khusus	9.588.890.000,00
				4. program peningkatan dan pengembangan kuantitas dan kualitas guru serta tenaga kependidikan	4.123.508.000,00
				5. program peningkatan pembudayaan dan peningkatan prestasi olah raga	4.062.630.300,00
				6. program peningkatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda	3.417.253.250,00
				7. program pengembangan sumber daya perpustakaan	598.070.540,00
				8. program pengembangan bahan pustaka dan layanan perpustakaan	1.082.289.900,00
				9. program pengembangan standarisasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga	829.195.000,00
				10. program pengembangan dan pembangunan perhubungan darat	7.548.819.300,00
				11. program pengembangan informasi dan	3.029.205.000,00

				komunikasi publik	
				12. program peningkatan penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi	6.166.250.000,00
				13. program peningkatan koordinasi kebijakan pendidikan, kb, dan pemuda	1.189.854.500,00
				14. program pengelolaan bantuan operasional sekolah (bos) (dak non fisik)	57.864.700.000,00
				15. program peningkatan pembinaan keagamaan	8.196.096.400,00
5	MENINGKATNYA DERAJAD KESEHATAN MASYARAKAT	ANGKA USIA HARAPAN HIDUP	69,98	program kesehatan masyarakat	8,714,855,570.00
				proram pencegahan dan pengendalian penyakit	4,783,341,300.00
				program peningkatan konsumsi dan keamanan pangan	1,215,153,500.00
				program pelayanan kesehatan	20,377,246,333.00
				program pelayanan teknis laboratoruim kesehatan	1,208,586,700.00
				program peningkatan pelayanan teknis medis dan penunjang medis	15,237,587,000.00
				program peningkatan pelayanan teknis keperawatan	3,696,455,600.00
				program peningkatan sarana prasarana rumah sakit umum	95,129,647,440.00

Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LKj
2018L

				program peningkatan pelayanan teknis keperawatan jiwa dan napza	966,203,283.00
				program peningkatan pelayanan teknis medis kejiwaan dan napza	7,148,906,550.00
				program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa	15,900,952,317.00
				program pengembangan sumber daya kesehatan	3,885,536,434.00
6	TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI YANG BERKUALITAS	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	64,08	program peningkatan pelayanan verifikasi dan perbendaharaan	307,701,000.00
				program peningkatan pelayanan akutansi dan pelaporan	1,107,655,142.00
				program peningkatan tata kelola aset daerah	1,441,326,800.00
				program penanganan fakir miskin	10,721,557,500.00
				program pengawasan dan pembinaan pembangunan sosial, ekonomi dan budaya	393,400,000.00
				program pengawasan dan pembinaan pemerintahan dan aparat	264,170,000.00
				program pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah	4,135,488,000.00
				program peningkatan dan pengembangan kinerja pemerintah daerah	1,025,000,000.00

Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LKj
2018L

				program perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah	2,692,375,500.00
				program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam	647,212,000.00
				program perencanaan infrastruktur dan pengembangan kewilayahan	393,056,000.00
				program perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan	457,307,750.00
				program penelitian dan pengembangan	1,194,003,000.00
				program peningkatan kualitas hidup perempuan	893,442,500.00
				program penganggaran pembangunan daerah	3,288,755,400.00
				program peningkatan pemberdayaan tik, statistik dan persandian	534,926,107.00
				program pengembangan otonomi daerah	1,658,969,374.00
				program peningkatan dan pengembangan tata laksana pemerintah daerah	725,737,615.00
				program peningkatan pelayanan pemerintah	9,966,208,880.00
				program pengadaan pegawai, mutasi, promosi, dan	

**Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



				kepangkatan	1,536,947,100.00
				program penilaian kinerja, disiplin, informasi dan kesejahteraan asn	1,781,824,050.00
				program pengembangan sumber daya manusia asn	6,970,478,360.00
				program penilaian dan pemetaan kompetensi asn	1,406,571,320.00
				program peningkatan dan pengembangan tata laksana pemerintah daerah	725,737,615.00
7	TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN DEMOKRASI	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI	74,77	program bina ideologi dan wawasan kebangsaan	1,579,414,360.00
				program penguatan kewaspadaan nasional	363,158,040.00
				program ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan	325,131,620.00
				program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1,752,684,100.00
				program perlindungan masyarakat	91,341,500.00
				program pembinaan dan pengembangan personil satpol pp	317,113,000.00
				program penegakan perda dan perkada	301,552,600.00
				program peningkatan kualitas hidup perempuan	893,442,500.00
				program pembinaan politik dalam negeri	

Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LKj
2018L

					783,445,360.00
				program pembinaan politik dalam negeri	783,445,360.00
8	MENINGKATNYA TATA KELOLA KEBENCANAAN	INDEKS KAPASITAS BENCANA DAERAH	0,15	program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	1,308,247,280.00
				program perlindungan dan jaminan sosial	1,025,666,000.00
				program pengembangan distribusi, stabilitas, dan cadangan pangan	-
				program pengembangan informasi dan komunikasi publik	3,029,205,000.00
				program pencegahan dan pengendalian penyakit	4,783,341,300.00
				program peningkatan perlindungan masyarakat	91,341,500.00
				program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana	2,917,520,000.00
				program pencegahan dan pengendalian penyakit	4,783,341,300.00
				program peningkatan pelayanan teknis medis dan penunjang medis	7,148,906,550.00
				program pengembangan sumber daya air	17,190,830,000.00
				program perumahan rakyat	16,490,960,000.00
				program kebinamargaan	

Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LKj
2018L

					187,644,025,076.00
				program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana	506,942,500.00
				proram pencegahan dan pengendalian penyakit	4,783,341,300.00
				program peningkatan pelayanan teknis medis kejiwaan dan napza	966,203,283.00
9	MENINGKATNYA TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	59,76	1. program peningkatan pengendalian dan penataan lingkungan hidup	447,880,000.00
				2. program peningkatan perlindungan dan konservasi sda dan ekosistem	1,992,122,000.00
				1. program peningkatan pengendalian dan penataan lingkungan hidup	298,355,000.00
				2. program peningkatan perlindungan dan konservasi sda dan ekosistem	1,992,122,000.00
				1. program peningkatan perlindungan dan konservasi sda dan ekosistem	1,992,122,000.00
				2. program peningkatan pengelolaan das dan pemberdayaan masyarakat	2,856,998,000.00
				3. program peningkatan pelayanan teknis tata kelola kehutanan	1,867,122,000.00
				1. program peningkatan tata kelola lingkungan hidup	1,510,118,000.00
				2. program peningkatan pengendalian dan penataan	

**Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



				lingkungan hidup	192,295,000.00
				3. program peningkatan pengolahan sampah, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup	987,808,000.00
				4. program peningkatan pengelolaan das dan pemberdayaan masyarakat	2,856,998,000.00
				5. program peningkatan pelayanan teknis laboratorium lingkungan	1,383,820,000.00
				6. program pengembangan pertambangan mineral logam	1,262,441,000.00
				7. program peningkatan pengelolaan geologi dan air tanah	2,832,610,000.00
				8. program peningkatan pelayanan teknis tata kelola kehutanan	1,867,122,000.00
				9. program pengembangan dan pembangunan perhubungan darat	7,548,819,300.00
				10. program peningkatan pengendalian, oprasional dan kebandarudaraan	8,542,608,000.00
				11. program peningkatan pengolahan sampah, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup	987,808,000.00
				12. program kecipta karya dan permukiman	5,924,398,000.00
				13. program kebinamargaan	187,644,025,076.00

Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



LKj
2018L

				14. program penataan ruang dan pertanahan	4,394,670,000.00
				15. program pengembangan sda	17,190,830,000.00

Sumber: RKPD Perubahan Tahun 2018

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Pertanggungjawaban kinerja sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukuran. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran yang prosesnya adalah sejauhmana program dan kegiatan dilaksanakan dengan guna mencapai sasaran.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

A. Capaian Indikator Kinerja 2018

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan realisasi. Setelah dilakukan penghitungan dengan membandingkan target dan realisasi maka akan diketahui tercapai atau tidak tercapaian indikator yang sudah ditetapkan. Selanjutnya capaian tersebut dievaluasi guna mengetahui tingkat keberhasilan dan mendapatkan strategi yang tepat untuk kegagalan peningkatan kinerja. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja 2018

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2	75% sampai 100%	Berhasil
3	55% sampai 75%	Cukup Berhasil
4	Kurang dari 50%	Kurang Berhasil

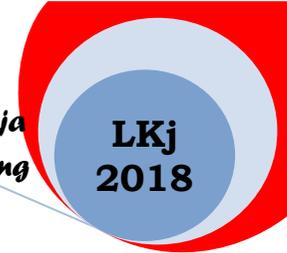
Berdasarkan data yang disampaikan dari satuan kerja perangkat daerah, hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	4,80	1,07*	22,29
2	Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan	3,80	-3,24*	-85,26
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (Tamud Asing dan Indonesia)	400.050	369.422	92,34
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,09	0,09	100
4	Meningkatnya produksi sektor pertambangan	Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,53	2,22*	418,0
5	Meningkatnya produksi sektor perindustrian	Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan	2,63	6,22*	236,5
6	Terwujudnya kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi	100,%	100%	100



7	Meningkatnya kemandirian fiskal	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	0,27	0,33	122,2
8	Menurunnya pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	3,70	3,65	101,40
9	Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	5,10	5,25	97,14
10	Menurunnya Inflasi	Angka Inflasi	6,42	3,18	201,8
11	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	2,09	2,08	100,48
12	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Rasio ketersediaan transportasi layak jalan	0,00038	0,0136	3578,9
		Indeks konektiviti kabupaten/kota	12,16	11,43	93,99
		Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,20	0,20	100
13	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	11,84	11,83*	99
		Rata-rata lama sekolah	7,85	7,78*	99,10
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,59	69,95*	97,7
		Angka Kematian Ibu	89,85 (39/KH)	167,24	53,72
		Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	7,2/1000 KH	6,31	114,10

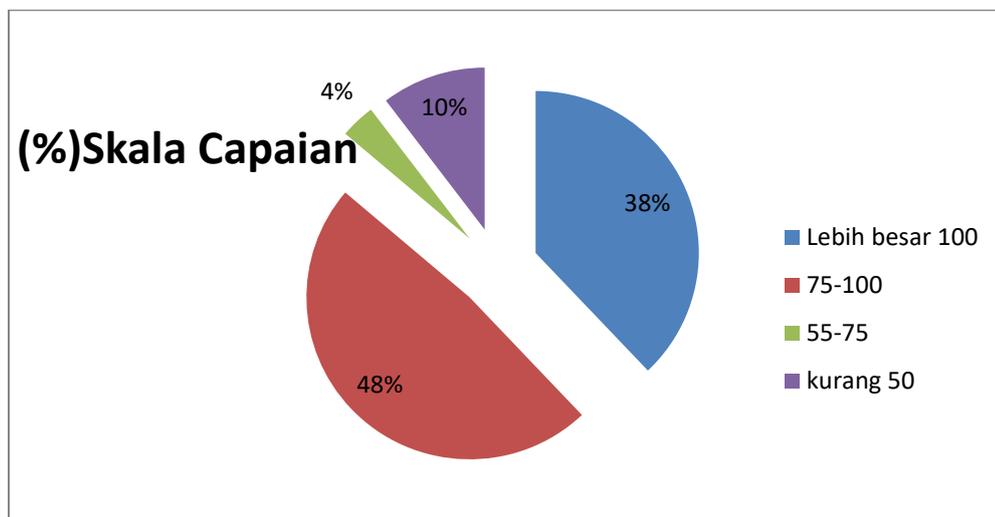


		Angka Stunting	26,5	10,65	248,8
15	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP*	100
		Indeks Reformasi Birokrasi	67,5	65,49*	97,02
16	Meningkatnya aspek kebebasan sipil	skor aspek kebebasan sipil	87,75	83,07*	94,66
17	Terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	skor aspek hak-hak politik	81,72	82,30*	100,7
18	meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	skor aspek lembaga demokrasi	80,30	72,89*	90,7
19	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Integritas Pelayanan publik	8,0	8,10*	101,2
20	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	Rendah (0,15)	0,26	173,3
21	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,60	62,53	91,15

Berdasarkan indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berjumlah sebanyak 29 indikator, dapat diamati berdasarkan kriteria skala pengukuran capaian sasaran indikator kinerja, menggambarkan 11 indikator dikategorikan sangat berhasil atau (38%), 14 indikator dikategorikan berhasil atau (24%), 1 indikator yang dikategorikan cukup berhasil atau (3,5%) dan 3 indikator kinerja kurang berhasil (10%) yaitu Untuk lebih jelasnya disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 3.1.

Perbandingan persentase skala pengukuran capaian indikator kinerja



Sumber : Hasil analisa, 2016

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan seluruh target sasaran RPJMD tahun 2017-2022.

Pengukuran analisis capaian kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil

pengukuran kinerja sasaran tersebut diatas, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap tujuan dan sasaran strategis RPJMD pada Tahun 2018 dengan capaian sebagai berikut :

a. Misi Pertama :

Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah

Tujuan Pertama : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Sasaran Strategis

meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan.

Indikator Kinerja : Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang vital di dunia. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan program sustainable development Goals (SDG's) yang kedua yaitu tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada Triwulan II 2018 mencapai 4,51 % tumbuh menguat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 2,53 %. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didorong oleh membaiknya kinerja sektor usaha utama yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor industri pengolahan. Sektor pertanian menyumbang sebesar 1,54% terhadap pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada Triwulan II 2018.

Peningkatan kinerja sektor pertanian disebabkan oleh pertumbuhan pada sub sektor perkebunan dan sektor peternakan. Pertumbuhan kinerja sektor perkebunan disebabkan oleh mulai masuknya periode panen kelapa sawit lebih awal yaitu pada bulan Juni 2018. Pertumbuhan sektor peternakan didorong oleh tingginya permintaan daging ayam dan telur selama periode ramadhan dan idul fitri sehingga membuat produsen meningkatkan kapasitas produksinya.

Tabel 3.3

Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan.	Persentase pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan.	N.A	4,80	1,07	1,07*	N.A	22,3

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran, indikator kinerja Persentase pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan realisasi capaian tahun 2018 sebesar 1,07 atau mencapai 22,3 %. Berdasarkan skala capaian kinerja dikategorikan "kurang berhasil".

Tabel 3.4

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan.	Persentase pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan.	1,07*	9,93	-8,86

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Realisasi kinerja Persentase pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan tahun 2018 sebesar 1,07 masih berada jauh dari realisasi nasional yang mencapai 9,93.

Gambar 3.2

Perbandingan Target RPJMD dengan realisasi capaian



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Berdasarkan grafik diatas bahwa pada capaian indikator Persentase pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan pada tahun 2018 sebesar 1,07 sama dengan dengan tahun 2017. Sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan merupakan salah satu sektor ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pertumbuhan yang cukup baik, karena memiliki potensi sektor perkebunan khususnya kelapa sawit yang cukup baik, dan setiap tahun sub sektor ini mengalami perkembangan luas lahan. Terkait hal ini, beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit menginformasikan kendala yang dihadapi terkait pembebasan lahan ataupun kerjasama inti-plasma dengan masyarakat sekitar. Dari sisi ketersediaan lahan, masih terdapat potensi lahan perkebunan kelapa sawit baik di Pulau Bangka maupun Pulau Belitung.

Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan selanjutnya berdampak terhadap pertumbuhan sektor lainnya khususnya sektor industri pengolahan. Sektor pertanian khususnya komoditas kelapa sawit merupakan bahan baku untuk industri pengolahan CPO dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat beberapa perusahaan pengolahan CPO selain perusahaan perkebunan kelapa sawit. Mayoritas CPO dijual di dalam negeri atau dikirim ke *head quarter* perusahaan industri pengolahan dimaksud

untuk sebagian diekspor. Khususnya pada saat panen raya akan semakin tinggi pula hasil panen kelapa sawit.

Namun intervensi program dan kegiatan yang sudah direncanakan belum dapat mendorong peningkatan produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan.

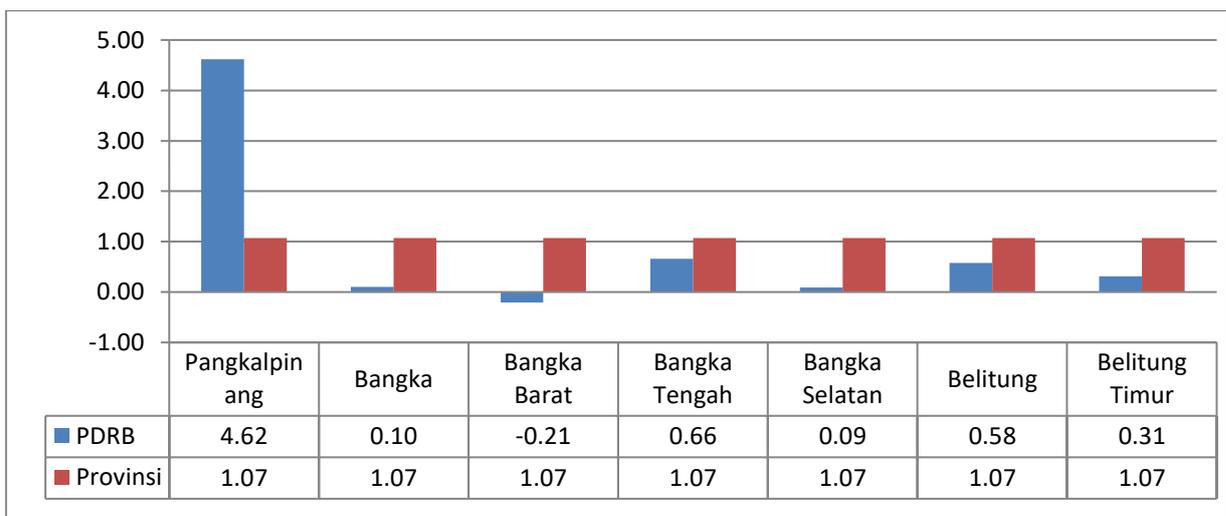
- ✓ Hambatan dan kendala yang dihadapi
 1. Sebagian besar komoditas pangan strategis didatangkan dari luar wilayah Bangka Belitung seperti beras, cabai merah, sayur-sayuran, daging ayam, telur ayam, dan daging sapi. Oleh sebab itu, gagal panen atau kematian ternak yang terjadi di wilayah pemasok komoditas pangan tersebut akan berdampak pada harga pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- ✓ Usulan upaya pemecahan masalah
 1. Menyikapi keterbatasan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyediakan bahan pangan strategis tersebut, maka sejak tahun 2018 pemerintah daerah sudah mulai fokus untuk mendorong masyarakat melakukan budidaya komoditas hortikultura (sayur kangkung, sawi, bayam), komoditas pangan (beras, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam).
 2. Disamping itu anggota TPID dan Satgas Pangan telah menetapkan roadmap program TPID jangka pendek dan jangka menengah hingga tahun 2024.
 3. Adapun pada tahun 2019 s.d 2021, TPID Bangka Belitung akan fokus pada kegiatan restructuring yaitu implementasi program peningkatan produktivitas, ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, perikanan dan peternakan, sehingga dapat menjaga ketersediaan stok dan harga pangan tetap berada pada rentang harga acuan dan harga eceran tertinggi.
 4. Peningkatan produksi pertanian (tanaman pangan), melalui pengaturan pola tanam pertanian, pemertaan daerah sentra produksi, pengaturan waktu tanam untuk komoditas strategis antar daerah, dan penerapan Good

Agriculture Practices (GAP) secara konsisten sehingga meningkatkan hasil produksi dan kualitas tanaman.

5. Pembangunan infrastruktur pertanian khususnya melalui pembangunan irigasi di beberapa lokasi strategis (lahan produktif), gudang yang dekat dengan sentra produksi khususnya untuk komoditas lada, serta sarana jalan di wilayah pertanian.
6. Peningkatan program ekstensifikasi pertanian, melalui program cetak sawah dan pemetaan lahan produktifitas pertanian. dukungan kepada kelompok tani melalui bantuan teknis dan pendampingan, bantuan sarana produksi pertanian, dan alat atau mesin pertanian.
7. Pelatihan industri pengolahan hasil pertanian untuk menciptakan nilai tambah hasil pertanian dan mendorong petani atau pelaku UMKM untuk berfikir inovatif dan memenuhi kebutuhan dasar.
8. Pembiayaan sektor pertanian melalui optimalisasi kredit program dan sistem resi gudang.

Gambar 3.3

Capaian persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan menurut Kabupaten/kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018



Sumber : BPS Prop. Kep. Babel, 2019

Kontribusi kategori Pertanian, berasal dari dan juga beberapa komoditas perkebunan seperti lada, kelapa sawit dan karet.

Sebagai wilayah yang dikelilingi laut, potensi laut di Pulau Bangka masih sangat mungkin untuk dikembangkan dan jika berhasil dikembangkan maka kontribusi perikanan terhadap perekonomian di Pulau Bangka akan semakin besar dari tahun ke tahun. Di sisi lain, beberapa komoditas perkebunan seperti lada, kelapa sawit dan karet juga harus diperhatikan terutama dalam hal kebijakan penentuan harga pasar karena yang menjadi salah satu kendala bagi usaha perkebunan adalah rendahnya harga jual komoditas perkebunan yang mengakibatkan masyarakat enggan untuk menanam.

Jika dilihat berdasarkan letak geografis, kedua pulau terpisah, menyebabkan karakteristik struktur ekonomi sedikit berbeda, meskipun 5 (lima) penopang ekonomi terbesar masih disumbangkan oleh 5 (lima) kategori yang sama dengan di Pulau Bangka. Jika di Pulau Bangka penopang terbesar adalah kategori Industri Pengolahan, di Pulau Belitung penopang terbesar berasal dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Perekonomian di Pulau Belitung lebih didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan khususnya pada lapangan usaha Perkebunan dan Perikanan.

B. Misi Kesatu

Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah

Tujuan Pertama : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Sasaran Strategis :
meningkatnya produksi sub sektor perikanan.

Indikator Kinerja : Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan.

Tabel 3.6
Pencapaian Target Kinerja Sasaran`

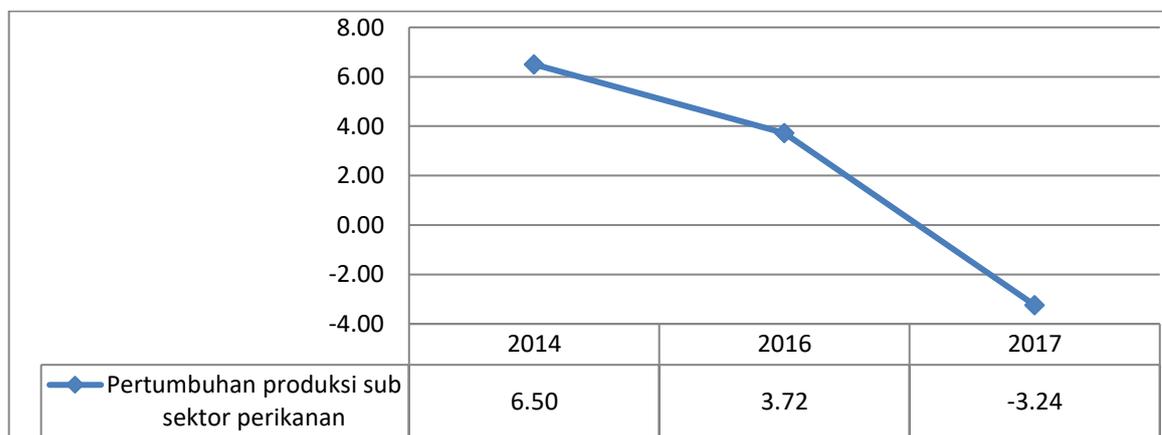
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan		3,80	-3,24	-3,24*		

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.2 pada tabel Capaian target sasaran indikator Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan. capaian tahun 2018 sebesar $-3,24$. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis meningkatnya konsumsi masyarakat, dengan indikator daya beli masyarakat dikategorikan "**kurang berhasil**".

Gambar 3.4

Perbandingan realisasi capaian tahunan



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dilihat dari tren pertumbuhan produksi sub sektor perikanan setiap tahun mengalami penurunan yang sangat tajam hingga mencapai minus 87,1 %.

Tabel 3.7

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (persen)
1	2	3	4	5
meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan	4,69	-3,24	-69,100

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel 3.8

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan	-3,24	3,7	-

✓ Analisa capaian **Indikator persentase pertumbuhan produksi sub sector perikanan**

Pertumbuhan produksi sub sektor perikanan dapat berkontribusi positif karena didukung oleh :

1. Pembinaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa :
 - a. Pengembangan sarana fisik untuk perikanan tangkap berupa perbaikan 6 PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) yang sudah menjadi aset Provinsi Pengembangan Balai Pemuliaan Ikan sebagai sumber benih unggul untuk perikanan budidaya.
 - b. Pengadaan sarana prasarana peralatan untuk perikanan tangkap, budi daya pengolahan dan pemasaran seperti pengadaan kapal dan alat tangkap, alat budidaya, alat pengolahan dan pemasaran.

- c. Pengawasan pada pelaku usaha agar melaksanakan kegiatan usaha perikanan yang taat aturan.
 - d. Bimbingan dan pendampingan untuk memperluas usaha perikanan dan bekerjasama dengan para penyuluh.
2. Bantuan langsung dari pemerintah pusat berupa bantuan langsung :
- a. Perikanan tangkap : kapal, alat tangkap, asuransi nelayan.
 - b. Perikanan budidaya : bantuan benih/induk ikan unggul, pakan, mesin pakan, excavator dan bioflok.
 - c. Pengolahan ikan : ice flake, cold storage, kendaraan berpendingin dan cool box.
 - d. Pemasaran : sentra kuliner
 - e. Pengawasan dengan pengerahan kapal pengawasan Hiu.
3. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melarang kapal asing menangkap ikan di perairan Indonesia. Hal ini memberi dampak masyarakat sumber daya ikan meningkat dan produktifitas perikanan tangkap meningkat.
4. Pengembangan sektor perikanan tangkap melalui :
- Peningkatan kelembagaan kelompok nelayan yang bermanfaat untuk memudahkan nelayan mendapatkan informasi, mendapatkan bantuan baik dari pemerintah maupun pihak swasta, meningkatkan posisi tawar nelayan di pasar, pemanfaatan cold storage secara berkelompok secara efisien.
 - Peningkatan pembiayaan produktif bagi nelayan sebagai contoh pembelian kapal dengan ukuran yang lebih besar sehingga memiliki kemampuan menangkap ikan yang lebih jauh. Selanjutnya kepada nelayan tersebut perlu diberikan pelatihan peningkatan kapasitas terkait teknis operasional kapal.
 - Pelatihan pengolahan hasil perikanan sebagai mata pencaharian substitusi (alternatif) selama nelayan tidak melaut (cuaca, paceklik ikan) dan sebagai salah satu makanan (oleh-oleh) khas Bangka Belitung.
 - Penyediaan infrastruktur cold storage di wilayah Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pengembangan pasar sentra/lelang hasil pertanian dan perikanan.
 - Pengembangan sistem informasi harian konsumen dan produsen hasil perikanan.

b. Misi Kesatu

Meningkatkan Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah

Tujuan Pertama : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Sasaran Strategis 1.3

meningkatnya kunjungan wisatawan

Indikator Kinerja Utama :

1. Jumlah Kunjungan wisatawan
2. Persentase peningkatan jumlah wisatwan

Tabel 3.9
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Jumlah kunjungan wisatawan	N.A	400.050	369.422	369.422	-	92,40
	2. Persentase peningkatan jumlah wisatawan.	N.A	0,9	N.A	0,9	-	100

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis meningkatnya kunjungan wisatawan dengan 2 (dua) indikator sasaran strategis yaitu Jumlah kunjungan wisatawan dan persentase peningkatan jumlah wisatawan. Sebagaimana target Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2018 sebesar 400.050 dengan realisasi capaian tahun 2018 sebesar 425.942 bila dibandingkan realisasi dengan target, maka capaian realisasi sebesar 92,40%. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2018 sebesar 425.942 dan capaian realisasi tahun 2017 sebesar 369.422, terdapat peningkatan capaian dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis meningkatnya kunjungan wisatawan, dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan dikategorikan "**berhasil**".

Sedangkan persentase peningkatan jumlah wisatawan dari target tahun 2018 sebesar 0,9 atau realisasi capaian sebesar 100%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis meningkatnya kunjungan wisatawan, dengan indikator persentase peningkatan jumlah wisatawan dikategorikan "berhasil".

Realisasi kinerja jumlah kunjungan wisatawan dan persentase peningkatan jumlah wisatawan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		
		2016	2017	2018
1	2			
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	300.725	369.422	425.942
	Persentase peningkatan jumlah wisatawan.	N.A	0,9	0,9

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2019

Tabel 3.11
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2017 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (persen)
1	2	3	4	5
3.Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	477.181	425.942	89,3
	Persentase peningkatan jumlah wisatawan.	-	0,9	-

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2019



Tabel 3.12

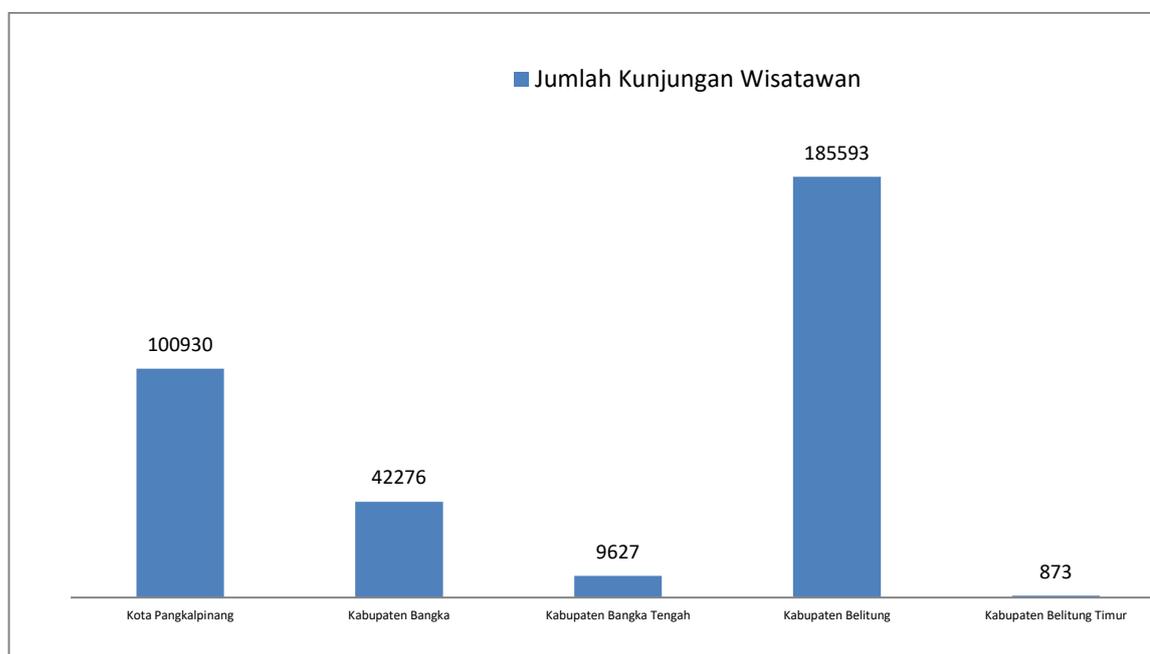
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
3. Meningkatkan kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	425.942	N.A	
	Persentase peningkatan jumlah wisatawan.	0,9	N.A	

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Koperasi 2019

Perbandingan Jumlah kunjungan wisatawan se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel berikut.

Gambar 3.5
Capaian Jumlah kunjungan wisatawan se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019

Untuk mendukung peningkatan pertumbuhan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan diupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengembangan akses transportasi (aksesibilitas) antara lain, menyediakan angkutan umum melalui koperasi taxi, memperluas jangkauan taxi khususnya sampai ke lokasi Pariwisata Tanjung Kelayang, menambah jam operasional bandara, pembukaan izin penerbangan malam, fasilitasi perizinan pembukaan rute penerbangan internasional secara regular dari negara Korea Selatan, Malaysia dan China, percepatan perluasan landasan pacu dan pembangunan bandara H.A.S Hanandjoeddin.
2. Pengembangan Amenitas, antara lain mencakup percepatan pembangunan marina, penyediaan TIC pada lokasi yang strategis, penyusunan standarisasi fasilitas umum tempat wisata, penyediaan fasilitas penukaran uang asing, penyediaan fasilitas kapal patroli untuk pengawasan keamanan laut, serta penambahan jumlah homestay berstandar internasional.
3. Pengembangan konsep wisata (atraksi), antara lain mencakup penambahan atraksi wisata dengan menonjolkan pada aktivitas budaya dan kehidupan masyarakat melalui desa wisata seperti Desa Nelayan Tanjung Binga, upaya konservasi bawah laut sebagai bagian dari atraksi wisata, penambahan paket wisata dan atraksi water sport, wisata budaya, wisata konservasi, wisata artificial, pemberdayaan sanggar seni budaya, serta penyelenggaraan event berskala internasional secara rutin.
4. Pembuatan sentra UMKM terpadu, peningkatan kompetensi SDM khususnya pemandu wisata dan menyediakan penjaga pantai, peningkatan sadar wisata masyarakat, fasilitasi pembangunan sekolah vokasi kepariwisataan.
5. Pengembangan strategi promosi wisata antara lain melalui penerapan branding atau ciri khas pariwisata Bangka Belitung, perluasan jangkauan

pasar global para pelaku biro wisata, promosi wisata di daerah pintu masuk wisman.

c. Misi Pertama

Meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah

Tujuan Pertama : meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Sasaran Strategis

meningkatnya produksi sektor pertambangan dan penggalian

Indikator Kinerja Utama :

persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah:

Tabel 3.13
Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya produksi sektor pertambangan dan penggalian	persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian	N.A	0,53	N.A	2,22	-	418,9

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis meningkatnya produksi sektor pertambangan dengan indikator sasaran strategis yaitu persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian. Sebagaimana target persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian tahun 2018 sebesar 0,53 dengan realisasi capaian tahun 2018 sebesar 2,22, bila dibandingkan realisasi dengan target, maka capaian realisasi sebesar 418,9%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian indikator persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian dikategorikan "**sangat berhasil**".

Untuk mengetahui realisasi tahunan indikator kinerja persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian disajikan tabel berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		
		2016	2017	2018
1	2			
meningkatnya produksi sektor pertambangan dan penggalian	persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,50	2,22	2,22*

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel 3.15
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (persen)
1	2	3	4	5
meningkatnya produksi sektor pertambangan dan penggalian	persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,73	2,22	304,1

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel 3.16
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target Nasional

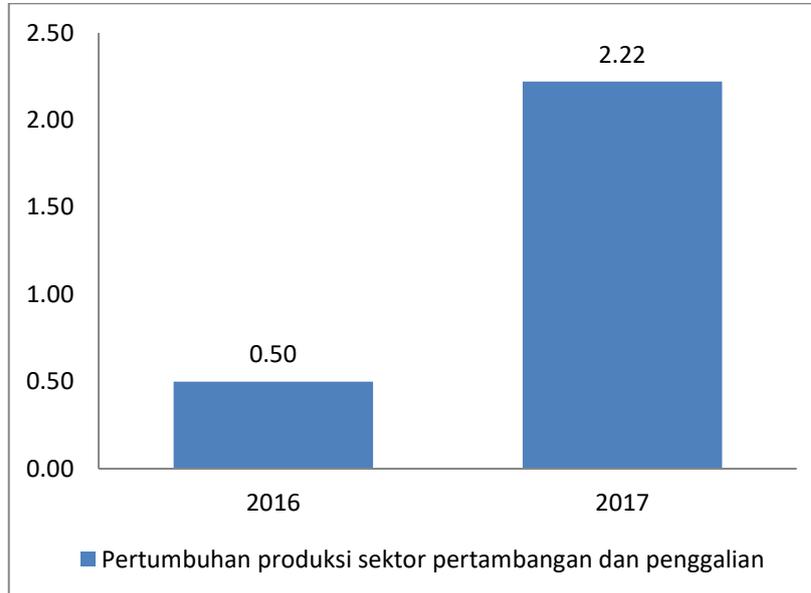
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatnya produksi sektor pertambangan dan penggalian	persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian	2,22	0,74	300

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Jika di dilihat dari perbandingan Realisasi nasional, pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah jauh diatas rata-rata nasional yang mencapai 300%.

Gambar 3.6

Realisasi kinerja tahunan



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian dari tahun ke tahun kontribusinya mengalami penurunan. Pada tahun 2012 kontribusi kategori ini mencapai 15,48 persen dan terus turun hingga menjadi 2,22 persen pada tahun 2018.

Timah merupakan komoditas utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akan tetapi mengingat bijih timah termasuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat dapat habis, maka eksploitasi timah harus dikontrol agar tidak mengganggu kelestarian lingkungan dan keberadaan timah di Pulau Bangka itu sendiri.

Semakin ketatnya peraturan pemerintah yang mengatur tentang eksploitasi sumber daya alam dan juga kondisi perekonomian global yang melemah mengakibatkan turunnya permintaan luar negeri akan komoditas timah ini. Karena sebagaimana kita ketahui sebagian besar dari hasil olahan timah ini diekspor ke luar negeri untuk memenuhi permintaan asing. Dilihat menurut kabupaten/kota, kontributor terbesar bagi PDRB kategori

Pertambangan dan Penggalian di Pulau Bangka berasal dari Kabupaten Bangka Selatan yakni sebesar 29,11 persen.

- ✓ **Analisa capaian** persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian
persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 sebesar 0,50, sedangkan tahun 2017 naik menjadi 2,22.
- ✓ Hambatan dan Kendala perkembangan indikator persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian

d. Misi Kesatu

Meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah

Tujuan Pertama : meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Sasaran Strategis

meningkatnya produksi sektor perindustrian

Indikator Kinerja Utama :

persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah:

Tabel 3.17
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya produksi sektor perindustrian	persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan	N.A	2,63	2,62	6,22*	-	236,5

Sumber : BPS Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis meningkatnya produksi sektor perindustrian dengan indikator sasaran persentase pertumbuhan produksi sektor

industri pengolahan target tahun 2018 sebesar 2,63 dengan realisasi capaian tahun 2018 sebesar 6,22, bila dibandingkan realisasi dengan target, maka capaian realisasi sebesar 236,5 %. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis sasaran strategis meningkatnya produksi sektor perindustrian dengan indikator sasaran persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan tahun 2018 "**sangat berhasil**".

Tabel 3.18
Realisasi Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		
		2016	2017	2018
1	2			
meningkatnya produksi sektor perindustrian	persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan	2,69	6,22	6,22*

Sumber : BPS Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

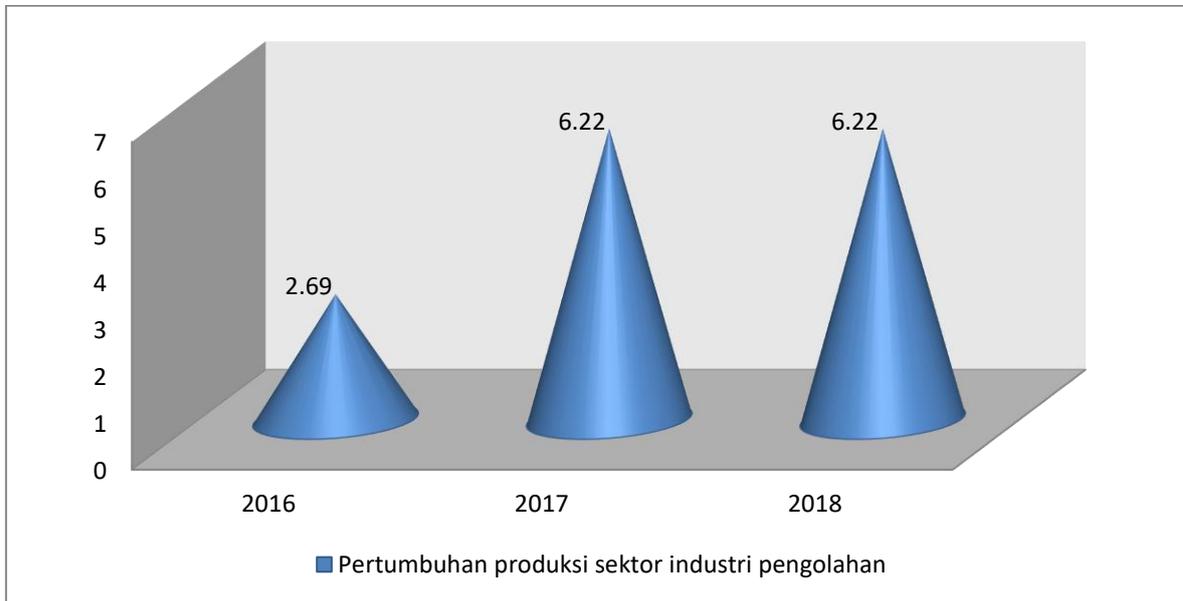
Tabel 3.19
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (persen)
1	2	3	4	5
meningkatnya produksi sektor perindustrian	persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan	2,86	6,22	217,5%

Sumber : BPS Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Gambar 3.6

Persentase Realisasi Kinerja Tahunan



Sumber : BPS Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Sektor industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Kepulauan Bangka Belitung. Disamping komoditi timah, minyak kelapa sawit dan karet juga berperan besar pada industri pengolahan. Perkembangan aktivitas perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan maupun perkebunan rakyat, didukung oleh keberadaan pabrik *Crude Palm Oil* (CPO), untuk menghasilkan minyak kelapa sawit.

Terdapat dua kawasan industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Jelitik (Kabupaten Bangka) dan Ketapang (Kota Pangkalpinang). Di kawasan industri inipaling banyak di bangun industri smelter logam timah. Sementara untuk industri lainnya, belum berkembang baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Permasalahan yang menjadi tantangan umum saat ini adalah, kebanyakan industri terkonsentrasi pada produksi barang mentah atau setengah jadi (industri hulu). Barang industri yang dihasilkan ditujukan untuk ekspor, memenuhi kebutuhan luar negeri. Akibatnya, nilai tambah dan uang yang diciptakan di sektor industri banyak yang lari ke luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peran pemerintah daerah untuk mengentaskan masalah ini sangat besar. Membina industri hulu yang ada untuk menyebarkan bisnis ke arah hilir merupakan salah satu solusi yang mungkin untuk diterapkan. Apalagi sektor industri pengolahan sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja ahli dan terampil. Dengan demikian TPT SMA keatas semakin berkurang.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, 5 (lima) kategori penopang terbesar perekonomian Pulau Bangka yaitu 1. Industri Pengolahan, 2. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 3. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 4. Pertambangan dan Penggalian, dan ke-5 Konstruksi. Meskipun kategori Industri Pengolahan merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian Pulau Bangka, akan tetapi dalam 5 (lima) tahun terakhir kontribusinya cenderung menurun.

Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap perekonomian di Pulau Bangka pada tahun 2012 sebesar 26,13 persen terus turun hingga menjadi 6,22 persen pada tahun 2018. kategori ini mengalami pergerakan yang searah mengingat kontributor terbesar bagi kategori Industri Pengolahan berasal dari industri logam dasar yang bahan bakunya berasal dari hasil pertambangan bijih timah. Timah merupakan komoditas utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akan tetapi mengingat bijih timah termasuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat dapat habis, maka eksploitasi timah harus dikontrol agar tidak mengganggu kelestarian lingkungan dan keberadaan timah di Pulau Bangka itu sendiri.

Semakin ketatnya peraturan pemerintah yang mengatur tentang eksploitasi sumber daya alam dan juga kondisi perekonomian global yang melemah mengakibatkan turunnya permintaan luar negeri akan komoditas timah ini. Karena sebagaimana kita ketahui sebagian besar dari hasil olahan timah ini diekspor ke luar negeri untuk memenuhi permintaan asing. Dilihat menurut kabupaten/kota, kontributor terbesar bagi PDRB kategori Industri

Pengolahan di Pulau Bangka berasal dari Kabupaten Bangka Barat yakni sebesar 48,29 persen.

e. Misi Kesatu

Meningkatkan Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah

Tujuan Pertama : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Sasaran Strategis
terwujudnya kemandirian energi.

Indikator Kinerja Utama :
Rasio elektrifikasi

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut

Tabel 3.20
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi.	97,75	100	100	100	102,30	100

Sumber : Dinas ESDM, 2019

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis terwujudnya kemandirian energi dengan target indikator kinerja capaian rasio elektrifikasi sebesar 100 %, terealisasi sebesar 100% atau tercapai capaian sebesar 100%. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2018 sebesar 100% dan capaian realisasi tahun 2017 sebesar 102,30%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan dengan indikator rasio elektrifikasi dikategorikan "**berhasil**"

Tabel 3.21

Realisasi Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		
		2016	2017	2018
1	2			
Terwujudnya kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi.	98,18	100	100

Sumber : Dinas ESDM 2019

Tabel 3.22

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (persen)
1	2	3	4	5
Terwujudnya kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi.	97,75	100	102,30

Sumber : Dinas ESDM, 2019

Tabel 3.23

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
Terwujudnya kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi.	100	98,30	1,70

✓ Rasio elektrifikasi (%)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat memerlukan ketersediaan energi listrik guna mendukung perekonomian daerah. Berdasarkan rasio elektrifikasi provinsi sudah mencapai 100 %. Realisasi rasio elektrifikasi melebihi dari target yang ditetapkan. Capaian ini merupakan keseriusan pemerintah daerah dan PT. PLN untuk mewujudkan rasio elektrifikasi 100%. Upaya sinergi PT. PLN dalam

mendukung program “Babel Terang”, diwujudkan dengan membangun infrastruktur listrik, dengan salah satu contohnya menambahkan kapasitas mesin pembangkit, penambahan Jaringan Tegangan Menengah (JTM), dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR). Data rasio elektrifikasi per Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel berikut :

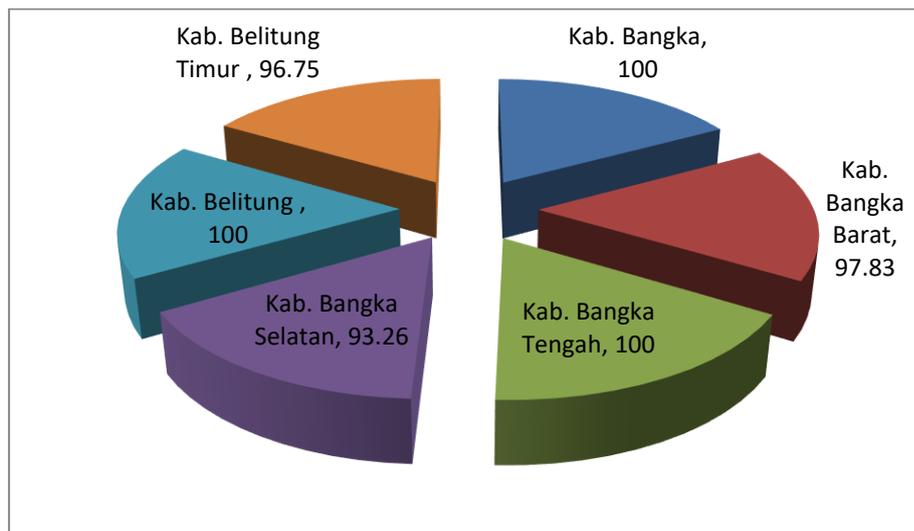
Tabel 3.24
Rasio elektrifikasi per Kabupaten/Kota se
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Kabupaten/Kota	% elektrifikasi
1	Kabupaten Bangka	100
2	Kabupaten Bangka Barat	97,83
3	Kabupaten Bangka Tengah	100
4	Kabupaten Bangka Selatan	93,26
5	Kabupaten Belitung	100
6	Kabupaten Belitung Timur	96,75
7	Pangkalpinang	100
8	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100

Sumber : Data diolah, 2019

Gambar 3.7

Perbandingan Rasio Elektrifikasi per Kabupaten/Kota



Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya untuk meningkatkan ketercapaian rasio elektrifikasi 100% dengan melakukan pendekatan berupa :

1. Mengusahakan sumber pendanaan dan pembiayaan infrastruktur melalui pembiayaan luar negeri.
2. Melakukan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan BUMN untuk pembiayaan pengembangan pengadaan listrik.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2014, PT. PLN (persero) Wilayah Bangka Belitung berkoordinasi dengan Distamben mengenai data Rumah Tangga Sasaran (RTS) di pedesaan yang belum dialiri listrik untuk bantuan pemasangan listrik gratis berdaya 450V.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi anggaran program efisien terhadap pencapaian sasaran staretgis meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan dengan indikator Rasio Elektrifikasi.

Program/kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.

f. Misi Kesatu

Meningkatkan Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah

Tujuan Kedua :Meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat

Sasaran Strategis

meningkatnya kemandirian fiskal

Indikator Kinerja Utama :

Rasio pendapatan asli Daerah terhadap PDRB



Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut

Tabel 3.25
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya kemandirian fiskal	Rasio PAD terhadap APBD	N.A	0,27	0,31	0,33	N.A	122,2

Sumber : Dinas ESDM, 2019

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis meningkatnya kemandirian fiskal dengan target indikator kinerja capaian Rasio PAD terhadap APBD sebesar 0,27 terealisasi sebesar 0,33 % atau tercapai capaian sebesar 122,2%. Bila dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar 0,33 dan realisasi tahun 2017 sebesar 0,31. Terjadi peningkatan sebesar 0,02 point. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis meningkatnya kemandirian fiskal dengan indikator rasio PAD terhadap APBD dikategorikan "**sangat berhasil**"

Tabel 3.26
Realisasi Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		
		2016	2017	2018
1	2			
meningkatnya kemandirian fiskal	Rasio PAD terhadap APBD	0,29	0,31	0,33

Sumber : BPS dan Bakuda 2019

Tabel 3.27

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (persen)
1	2	3	4	5
meningkatnya kemandirian fiskal	Rasio PAD terhadap APBD	N.A	0,33	-

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 3.28

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatnya kemandirian fiskal	Rasio PAD terhadap APBD	0,33	-	belum ada

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Untuk meningkatkan PAD khususnya dalam sektor pajak Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan beberapa upaya seperti mendekatkan layanan pajak dengan samling, bukti pembayaran pajak menjadi salah satu syarat untuk mengurus perizinan. Selain itu PAD akan diupayakan dari perimbangan DAU, DAK dan bagi hasil.

g. Misi Kesatu

Meningkatkan Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah

Tujuan Kedua :Meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat

Sasaran Strategis
menurunnya pengangguran

Indikator Kinerja Utama :
Persentase tingkat pengangguran terbuka



Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut

Tabel 3.29
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
menurunnya pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka	N.A	3,70	N.A	3,65	N.A	101,40

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis menurunnya pengangguran dengan target indikator kinerja capaian persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,70 terealisasi sebesar 3,65 atau tercapai capaian sebesar 101,40%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis menurunnya pengangguran dengan indikator persentase tingkat pengangguran terbuka dikategorikan **“sangat berhasil”**

Tabel 3.30
Realisasi Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		
		2016	2017	2018
1	2			
menurunnya pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka	2,60	3,78	3,65

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019

Tabel 3.31

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (persen)
1	2	3	4	5
menurunnya pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka	N.A	3,65	-

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 3.32

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
menurunnya pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka	3,65	5,34	1,690

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Salah satu potensi besar yang dimiliki wilayah adalah angkatan kerja. Semakin tinggi angkatan kerja, maka semakin banyak pula jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja, memproduksi barang dan jasa di wilayah tersebut. Sayangnya tidak semua angkatan kerja terserap oleh lapangan kerja yang ada, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kelompok umur 35-39 tahun paling mendominasi struktur pekerja baik laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, jika dikaji menurut lapangan pekerjaan utama, sektor pertanian dan sektor pertambangan menempati dua posisi teratas yang paling banyak menyerap tenaga kerja laki-laki, sedangkan tenaga kerja perempuan mayoritas bekerja di sektor perdagangan dan sektor perikanan.

Melihat sektor dominan ini, struktur ekonomi dan lapangan pekerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepertinya belum terlalu membutuhkan *skilled labour* sebagai hal utama. Tidak mengherankan jika angka TPT angkatan kerja lulusan

SMA yang bertengger di angka 6,38 persen. Kondisi ini sejalan dengan skema ekonomi lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum menerapkan skema ekonomi industri yang membutuhkan *skilled labour* seperti di Provinsi Kepulauan Riau.

h. Misi Kesatu

Meningkatkan Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah

Tujuan Kedua :Meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat

Sasaran Strategis
menurunnya kemiskinan

Indikator Kinerja Utama :
Persentase penduduk miskin

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut

Tabel 3.33
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin	N.A	5,10	5,20	5,25,	-	97,14

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis menurunnya kemiskinan dengan target indikator kinerja capaian persentase penduduk miskin sebesar 5,10 terealisasi sebesar 5,25 atau tercapai capaian sebesar 97,14%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis menurunnya kemiskinan dengan indikator persentase penduduk miskin dikategorikan "**berhasil**"

Tabel 3.34

Realisasi Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		
		2016	2017	2018
<i>1</i>	<i>2</i>			
menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin	5,22	5,20	5,25

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019

Tabel 3.35

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (persen)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin	5,0	5,25	95,30-

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 3.36

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin	5,25	9,66 (data per Sept 2018)	4,41

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jika dibandingkan dengan realisasi Nasional maka Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 4,41 % di atas realisasi nasional dengan persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,66 %.

Kemiskinan masih menjadi isu kompleks yang mencuri perhatian banyak kalangan. Fokus pembangunan saat ini tidak hanya tentang bagaimana manurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga mempersempit jurang antara si

kaya dan si miskin. Sekilas kondisi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Salah satu potensi besar yang dimiliki wilayah adalah angkatan kerja. Semakin tinggi angkatan kerja, maka semakin banyak pula jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja, memproduksi barang dan jasa di wilayah tersebut. Sayangnya tidak semua angkatan kerja terserap oleh lapangan kerja yang ada, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kelompok umur 35-39 tahun paling mendominasi struktur pekerja baik laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, jika dikaji menurut lapangan pekerjaan utama, sektor pertanian dan sektor pertambangan menempati dua posisi teratas yang paling banyak menyerap tenaga kerja laki-laki, sedangkan tenaga kerja perempuan mayoritas bekerja di sektor perdagangan dan sektor perikanan.

Melihat sektor dominan ini, struktur ekonomi dan lapangan pekerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepertinya belum terlalu membutuhkan *skilled labour* sebagai hal utama. Tidak mengherankan jika angka TPT angkatan kerja lulusan SMA yang bertengger di angka 6,38 persen. Kondisi ini sejalan dengan skema ekonomi lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum menerapkan skema ekonomi industri yang membutuhkan *skilled labour* seperti di Provinsi Kepulauan Riau.

i. Misi Kesatu

Meningkatkan Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah

Tujuan Kedua :Meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat

Sasaran Strategis
menurunnya inflasi

Indikator Kinerja Utama :
angka inflasi

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.37
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
menurunnya inflasi	angka inflasi	N.A	6,42	3,13	3,18	-	201,8

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis menurunnya inflasi dengan target indikator kinerja capaian angka inflasi sebesar 6,42 terealisasi sebesar 3,18 atau tercapai capaian sebesar 201,8%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis menurunnya kemiskinan dengan indikator persentase penduduk miskin dikategorikan "**sangat berhasil**".

Tabel 3.38
Realisasi Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahunan		
		2016	2017	2018
1	2			
menurunnya inflasi	angka inflasi	6,75	3,13	3,18

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019

Tabel 3.39
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (persen)
1	2	3	4	5
menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin	6,02	3,18	-

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 3.40

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
menurunnya inflasi	angka inflasi	3,18	3,13	belum ada

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum, dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan orang banyak, kondisi inflasi ini sangat di hindari oleh negara. Kenaikan harga yang terus menerus dapat memicu terjadinya krisis ekonomi ringan hingga berat. Di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, inflasi dihitung di dua kota, yaitu Tanjung pandan dan Pangkalpinang.

Jika dibandingkan inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di angka 3,18 dengan angka inflasi nasional yang mencapai 3,13 maka angka inflasi provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih di atas angka inflasi nasional sebanyak 0,05 poin.

Kebijakan yang akan diupayakan untuk mengendalikan inflasi adalah sebagai berikut :

1. Pemetaan lahan dan produktifitas pertanian, perikanan, surplus dan defisit komoditas pangan,
2. Law enforcement illegal fishing dengan memperkuat penegakan hukum dalam praktek ilegal fishing melalui pengawasan dan pemantauan secara rutin oleh penegak hukum.
3. Peningkatan hasil produksi peternakan melalui pengembangan kapasitas SDM peternakan melalui pelatihan dan bantuan teknis.
4. Penjajakan pendirian pasar baru dan/atau revitalisasi pasar exiting serta pasar induk melalui studi maupun koordinasi dan komunikasi antar instansi.

5. Optimalisasi toko tani dan tempat pelelangan ikan dengan mengoptimalkan pemanfaatan toko tanu untuk mengefisienkan jalur distribusi komoditas pangan dan perikanan.
6. Inspeksi dan pemantauan stok pangan di distributor dengan melakukan koordinasi dan tinjauan lapangan/sidak ke distributor untuk mengawasi cadangan pangan.
7. Penyaluran raskin.
8. Operasi pasar dan pasar murah (Bazaar).
9. Edukasi kepada distributor bahan pangan mengenai persaingan usaha yang tidak sehat, termasuk kegiatan yang dilarang dan perjanjian kemitraan yang dilarang.
10. Meningkatkan perdagangan antar daerah.
11. Optimalisasi jalur distribusi di pelabuhan dan bandara.
12. Perbaikan dan peningkatan kualitas [elabuhan khusus angkutan barang dari daerah lain.
13. Pembangunan sarana irigasi.
14. Program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP).
15. Edukasi kepada masyarakat mengenai inflasi terkait belanja bijak dan budaya tawar menawar saat berbelanja.
16. Penguatan akurasi data stok komoditas, produksi, dan wilayah sumber distribusi komoditas.
17. Pemantauan dan diseminasi harga komoditas strategis.
18. Pengembangan pusat harga pangan strategis.
19. Pemantauan harga jelang hari raya.
20. Penguatan program kerja TPID.
21. Meningkatkan koordinasi pengendalian inflasi melalui TPID
22. Sinkronisasi program kerja TPID

j. Misi Kesatu

Meningkatkan Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah

Tujuan Kedua :Meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat

Sasaran Strategis

Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

Indikator Kinerja Utama :

persentase laju pertumbuhan penduduk

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut

Tabel 3.41
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	persentase laju pertumbuhan penduduk	N.A	2,09	2,11	2,08*	-	100,5

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan target indikator kinerja capaian persentase laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,09 terealisasi sebesar 2,08 atau tercapai capaian sebesar 100,5%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis menurunnya kemiskinan dengan indikator persentase penduduk miskin dikategorikan **"sangat berhasil"**

Tabel 3.42

Realisasi Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		
		2016	2017	2018
1	2			
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	persentase laju pertumbuhan penduduk	1,45	1,45	2,08

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019

Tabel 3.43

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (persen)
1	2	3	4	5
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	persentase laju pertumbuhan penduduk	2,08	2,08	100

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 3.44

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	persentase laju pertumbuhan penduduk	2,08	1,48	belum ada

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sebagai provinsi kelima termuda di Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah penduduk yang tidak begitu banyak. Kota Pangkalpinang yang menjadi ibukota provinsi merupakan wilayah dengan penduduk terpadat, sementara Kabupaten Belitung Timur merupakan wilayah dengan penduduk paling jarang.

k. Misi Kedua

Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas

Tujuan Ketiga :Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas

Sasaran Strategis

meningkatkan konektivitas antar wilayah

Indikator Kinerja Utama :

1. Rasio ketersediaan transportasi layak jalan
2. Indeks konektiviti kabupaten/kota
3. Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps.

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut

Tabel 3.45
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Rasio ketersediaan transportasi layak jalan	N.A	0,000038	0,00817	0,0136	-	3578,9
	Indeks konektiviti kabupaten/kota	N.A	12,16	11,43	11,43	-	93,99
	Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan target indikator kinerja capaian rasio ketersediaan transportasi layak jalan sebesar 0,00038 terealisasi sebesar 0,0136 atau tercapai capaian sebesar 100%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan target indikator kinerja capaian rasio ketersediaan transportasi layak jalan dikategorikan "**sangat berhasil**"

Sasaran strategis meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan target indikator kinerja capaian indeks konektiviti kabupaten/kota sebesar 12,16 terealisasi sebesar 11,43 atau tercapai capaian sebesar 100%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan target indikator kinerja capaian indeks konektiviti kabupaten/kota dikategorikan "**berhasil**"

Sasaran strategis meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan target indikator kinerja capaian persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps sebesar 0,20 tidak tersedia data realisasi. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan target indikator kinerja capaian persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps dikategorikan "**kurang berhasil**"

Tabel 3.46
Realisasi Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		
		2016	2017	2018
1	2			
meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Rasio ketersediaan transportasi layak jalan	N.A	0,00817	0,0136
	Indeks konektiviti kabupaten/kota	N.A	11,43	11,43
	Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps.	N.A	N.A	N.A

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019

Tabel 3.47

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (persen)
1	2	3	4	5
meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Rasio ketersediaan transportasi layak jalan	N.A	0,0136	Tidak bisa dihitung
	Indeks konektiviti kabupaten/kota	N.A	11,43	tidak bisa dihitung
	Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps.	92	N.A	N.A

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 3.48

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Rasio ketersediaan transportasi layak jalan	0,0136	N.A	N.A
	Indeks konektiviti kabupaten/kota	11,43	N.A	N.A
	Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps.	N.A	N.A	N.A

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Transportasi dan ekonomi memiliki hubungan yang erat. Transportasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen dan meniadakan jarak diantara keduanya. Transportasi yang menggambarkan tingkat kemudahan suatu daerah dicapai atau diakses dari daerah lainnya. daerah

yang memiliki tingkat aksesibilitas tinggi, akan memiliki pergerakan ekonomi lebih cepat, baik untuk aktivitas produksi maupun konsumsi.

Untuk memfasilitasi kelancaran transportasi darat, pemerintah terus berusaha meningkatkan pembangunan jalan aspal dan memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Semua jalan sudah diaspal. Beberapa wilayah yang terpisahkan sungai dihubungkan oleh beberapa jembatan dengan total panjang 5.862 km. Semua jembatan sudah berjenis konstruksi beton bertulang dan rangka baja. Tidak ada jembatan dengan konstruksi kayu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, masyarakat sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi. Kepemilikan sepeda motor dan mobil pribadi meningkat setiap tahunnya. Tingkat penggunaan transportasi publik memang masih rendah. Dari tujuh kabupaten/kota, transportasi umum jenis angkutan kota hanya beroperasi di 2 wilayah, yaitu Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang. Meskipun demikian, rute bus yang melayani penumpang antar kabupaten sudah tersedia cukup baik.

I. Misi Ketiga

Meningkatnya sumber daya manusia unggul dan handal

Tujuan Keempat : Meningkatkan lama sekolah masyarakat

Sasaran Strategis

Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat

Indikator Kinerja Utama :

1. Harapan Lama Sekolah
2. Rata-rata lama sekolah

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut

Tabel 3.49
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah	11,71	11,84	11,71	11,83	100	99,9
	Rata-rata lama sekolah	7,85	7,85	7,62	7,78	97,07	99,1

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat dengan target indikator kinerja capaian Harapan Lama Sekolah sebesar 11,84 terealisasi sebesar 11,83 atau tercapai capaian sebesar 99,9%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat dengan target indikator kinerja capaian Harapan Lama Sekolah dikategorikan "**berhasil**".

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat dengan target indikator kinerja capaian Rata-rata lama sekolah sebesar 7,85 terealisasi sebesar 7,78 atau tercapai capaian sebesar 99,1%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat dengan target indikator kinerja capaian Rata-rata lama sekolah dikategorikan "**berhasil**".

Tabel 3.50
Realisasi Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahunan		
		2016	2017	2018
1	2			
Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah	11,71	11,83	11,83*
	Rata-rata lama sekolah	7,62	7,78	7,78*

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019

Tabel 3.51

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (persen)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah	12	11,83	98,58
	Rata-rata lama sekolah	N.A	7,78	-

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Tabel 3.52

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah	11,83	12,85	-1,02
	Rata-rata lama sekolah	7,78	7,65	0,13

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Analisa capaian indikator kinerja Rata-rata lama sekolah :

Dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 menekankan 11 program unggulan prioritas, diantaranya adalah pengembangan pendidikan demi terciptanya misi pembangunan ketiga yaitu peningkatan sumber daya manusia unggul dan handal.

Dibutuhkan usaha keras untuk mewujudkan misi ini. Beberapa indikator pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih tercatat dibawah rata-rata nasional. Sekitar 21,01 % penduduk usia 15 tahun keatas pada tahun 2017 tidak mempunyai ijazah alias tidak tamat SD, atau memang tidak pernah bersekolah sama sekali. Padahal kondisi rata-rata Nasional saat ini hanya 17 % penduduk usia 15 tahun keatas yang tidak mempunyai ijazah.

Kepemilikan Ijazah SD dan Ijazah SMA masih di kisaran rata-rata Nasional, masing-masing 28,25 persen dan 19 persen. Sedangkan untuk kepemilikan ijazah setara Sarjana ke atas masih di bawah lima persen, padahal rata-rata Nasional sudah mencapai 5,98 persen.

Partisipasi sekolah usia 19-24 tahun masih rendah, tercatat sekitar 84,45 persen penduduk usia ini sudah tidak bersekolah lagi. Banyak faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jarak tempat tinggal terhadap sekolah yang jauh, sementara ketersediaan kendaraan umum yang terjangkau masih sangat terbatas, salah satu kendala yang menghambat keterlibatan anak untuk melanjutkan pendidikan. Tidak mengherankan jika Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMP dan SMA di bawah 100. Padahal ketersediaan jumlah tenaga pendidik di Kepulauan Bangka Belitung saat ini sudah cukup baik. Rasio murid-guru secara total Tahun 2017 1 : 19.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di tiap kabupaten/Kota belum terlihat adanya pemerataan. Jika dilihat dari tahun 2010-2015 terlihat masih tingginya disparitas rata-rata lama sekolah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Selatan. Bahkan perkembangan di Kabupaten Bangka Selatan relatif lambat dibandingkan kabupaten/kota lain.

Jika dikaji menurut kabupaten/kota, penduduk Kota Pangkalpinang memiliki kualitas pendidikan paling baik. Rata-rata penduduknya diasumsikan tamat SMP, dimana rata-rata lama sekolah mencapai 9,77 tahun. Sementara itu enam kabupaten lainnya harus berusaha lebih keras lagi meningkatkan semangat masyarakat untuk mengakses pendidikan, terutama kabupaten Bangka Selatan.

Program yang menunjang terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan dan Program Pendidikan Menengah dan Tinggi.

✓ Faktor penyumbang kegagalan :

1. Jumlah Ruang Kelas Baru terbatas;

2. Masih ada pemukiman pendidikan yang jaraknya cukup jauh dari satuan pendidikan menengah terdekat;
 3. Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat terbatas;
 4. Masih ada anak berkebutuhan khusus yang belum teridentifikasi;
- ✓ Faktor penunjang keberhasilan :
1. Penambahan ruang kelas baru;
 2. Pembangunan unit sekolah baru di daerah yang lulusan SMP tidak tertampung;
 3. Penambahan jumlah Guru atau Tenaga Kependidikan sesuai dengan analisis kebutuhan GTK;
 4. Perbaikan sistem penerimaan siswa baru;
 5. Pembangunan asrama siswa;
 6. Penerapan pendidikan keluarga di satuan pendidikan;
 7. Revitalisasi guru BK;
 8. Penerapan pendidikan inklusi;
 9. Optimalisasi fungsi PLA (Autis);
 10. Mendeteksi dini siswa berkebutuhan khusus.

m. Misi keempat

Meningkatnya kesehatan bagi masyarakat

Tujuan Kelima: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran Strategis

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Indikator Kinerja Utama :

1. Angka Harapan Hidup
2. Angka Kematian Ibu
3. Angka Kematian Bayi
4. Angka Stunting

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut

Tabel 3.53
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	N.A	71,59	69,55	69,55	-	97,7
	Angka Kematian Ibu	N.A	89,85 (39/KH)	82,49/ KH	167,24 (44/KH)	-	53,72
	Angka Kematian Bayi	N.A	7,2/ 1000 KH	6,25/ KH	6,31/ KH	-	114,10
	Angka Stunting	N.A	26,5	Tidak ada data	10,65	-	248,8

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan tabel diatas, sasaran Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan target indikator kinerja capaian Angka Harapan Hidup sebesar 71,59 terealisasi sebesar 69,55 atau tercapai capaian sebesar 97,7%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan target indikator kinerja capaian Angka Harapan Hidup dikategorikan "**berhasil**".

Berdasarkan tabel diatas, sasaran Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan target indikator kinerja capaian Angka Kematian Ibu sebesar 89,85 terealisasi sebesar **167,24** atau tercapai capaian sebesar 53,72%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan target indikator kinerja capaian Angka Kematian Ibu dikategorikan "**cukup berhasil**".

Berdasarkan tabel diatas, sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan target indikator kinerja capaian Angka Kematian Bayi sebesar 7,2 terealisasi sebesar 6,31 atau tercapai capaian sebesar 114,10%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan target indikator kinerja capaian Angka Kematian Bayi dikategorikan "**sangat berhasil**".

Berdasarkan tabel diatas, sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan target indikator kinerja capaian Angka Stunting sebesar 26,5 terealisasi sebesar **10,62** atau tercapai capaian sebesar 248,8%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan target indikator kinerja capaian Angka Stunting dikategorikan "**sangat berhasil**".

Tabel 3.54
Realisasi Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		
		2016	2017	2018
<i>1</i>	<i>2</i>			
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	N.A	69,55	69,55
	Angka Kematian Ibu	N.A	82,49/KH	167,24 (44/KH)
	Angka Kematian Bayi	N.A	6,25/KH	6,31/KH
	Angka Stunting	N.A	Tidak ada data	10,65

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019
*) data tahun 2018

Tabel 3.55

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (persen)
1	2	3	4	5
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	N.A	69,55	-
	Angka Kematian Ibu	N.A	167,24 (44/KH)	-
	Angka Kematian Bayi	N.A	6,31/KH	-
	Angka Stunting	N.A	10,65	-

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

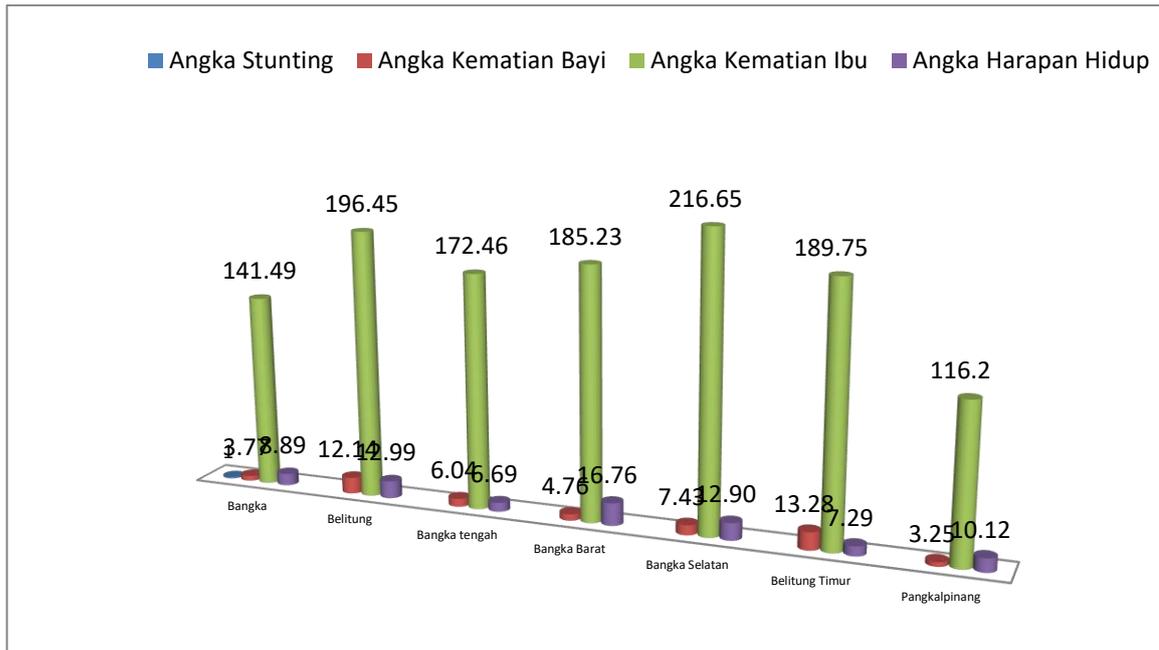
Tabel 3.56

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,55	71,06	-1,51
	Angka Kematian Ibu	167,24 (44/KH)	N.A	N.A
	Angka Kematian Bayi	6,31/KH	N.A	N.A
	Angka Stunting	10,65	N.A	N.A

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar 3.8
Capaian Usia Harapan Hidup se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2018



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019

1. Analisis penunjang keberhasilan pencapaian tahun 2018

a. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi". Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Cara untuk menentukan usia harapan hidup ialah dengan menunjukkan dan meratakan semua umur dari seluruh kematian pada waktu tertentu". Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun.

Angka harapan hidup biasanya dikeluarkan oleh BPS, tetapi sampai laporan ini dibuat BPS belum mengeluarkan angka harapan hidup untuk tahun 2018, sehingga belum dapat dilakukan analisisnya. Target AHH Prov. Kep. Babel tahun 2018 adalah 71,59 tahun dan pencapaian untuk tahun 2017 sudah 69,95 tahun, sehingga diharapkan target tahun 2018 akan tercapai

b. Angka Kematian Ibu Perkelahiran Hidup

Kematian ibu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan yang signifikan dari 21 orang tahun 2017 menjadi 44 orang pada tahun 2018. Penyebab kematian ibu adalah 11 orang (25%) karena perdarahan, 15 orang (34%) karena hipertensi dalam kehamilan, 6 orang (13,63%) karena gangguan sistem peredaran darah (jantung, emboli paru, dll) sebanyak 6 orang (13,63%), 1 orang karena Diabetes Mellitus (2,2%), dan 11 orang disebabkan karena penyakit lain-lain (abses mandibula, morbili, penyakit empedu, post SC dengan aspirasi, *abortus iminens* dan kanker otak). Tempat kejadian kematian ibu 89% di Rumah sakit, 9% di rumah dan 2% di perjalanan.

Bila dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 Angka Kematian Ibu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 82,49/100.000 kelahiran hidup (KH) meningkat menjadi 167,24/100.000 KH pada tahun 2018. Berdasarkan jumlah, kasus kematian ibu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan menjadi 44/26.309 KH dari 21/25.459 KH tahun 2017.

Kasus kematian ibu paling banyak terjadi di Kabupaten Bangka sebanyak 9 orang (20,45 %) dari total kematian ibu, dan kasus kematian ibu terendah terdapat di Kabupaten Belitung Timur 4 orang (9,09%) dari total kematian ibu. Bila dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) paling tinggi di Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 216,65/100.000 KH dan terendah di Kota Pangkalpinang sebanyak 116,20/100.000 KH.

c. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup

Kematian bayi (0–12 bulan) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 berjumlah 166 kasus meningkat dari tahun 2017 sejumlah... Jumlah kematian bayi pada tahun 2018 terbanyak terdapat di Kabupaten Belitung (22,28% dari total kematian bayi) dan paling sedikit terdapat di Kota Pangkalpinang (8,4% dari total kematian bayi). Tertinggi terjadi pada usia neonatal (0-28 hari) sebanyak 126 kasus (75,90%). Penyebab medis kematian bayi antara lain karena BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah), asfiksia, sepsis, kelainan kongenital dan lain-lain.

Penyebab kematian bayi paling banyak disebabkan karena BBLR (32,53% dari total kematian neonatus). Kematian neonatus karena BBLR paling banyak terdapat di Kabupaten Belitung (48,78% dari total kematian neonatus karena BBLR). Kemudian kematian neonatus yang disebabkan karena asfiksia (22,22% dari total kematian neonatus), kelainan kongenital (11,90% dari total kematian neonatus), lain-lain (30,95% dari total kematian neonatus).

d. Angka Stunting

Angka stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 adalah sebesar 10,65. Angka ini masih berada dibawah target tahun 2018 yaitu sebesar 26,5. Angka ini bila dibandingkan dengan angka nasional sebesar 30,8, maka capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada jauh dibawah angka nasional. Maka dapat dikatakan bahwa Capaian Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah baik.

Penyebab secara langsung kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita dipengaruhi tiga hal : anak tidak cukup mendapat makanan bergizi seimbang, anak tidak mendapat asupan gizi yang memadai, dan anak menderita penyakit infeksi.

Balita dengan kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan. Kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita merupakan dampak dari berbagai macam penyebab,

seperti sanitasi yang buruk, rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, ketersediaan pangan, transportasi, adat istiadat (sosial budaya), dan sebagainya. Oleh karena itu, pemecahannyapun harus secara komprehensif. Perawatan anak balita dengan kekurangan gizi (*underweight*) dapat dilaksanakan di Puskesmas Perawatan atau Rumah Sakit setempat dengan Tim Asuhan Gizi yang terdiri dari dokter, nutrisionis/dietisien dan perawat.

2. Analisis Penyumbang kegagalan/keberhasilan Pencapaian dan langkah-langkah mengatasi kegagalan

a. Angka Kematian Ibu Perkelahiran Hidup

Terjadinya kematian ibu ini diduga berhubungan dengan belum optimalnya kualitas ANC terpadu, deteksi faktor risiko ibu hamil dan kunjungan rumah ibu hamil risiko tinggi yang belum maksimal serta penanganan kegawatdaruratan maternal yang belum maksimal di unit pelayanan. Deteksi sedini mungkin faktor risiko maupun komplikasi selama kehamilan secara integrasi dengan program terkait antara program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), gizi, imunisasi dan P2M (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular) dan PTM (Penyakit Tidak Menular). Adanya dukungan Puskesmas PONEC dan RS PONEK di kabupaten/kota dengan total puskesmas mampu PONEC 35 puskesmas (35,93%) dari 64 puskesmas. Untuk itu perlu dioptimalkan keterfungsian puskesmas PONEC dan RS PONEK yang didukung dengan tenaga yang sudah dilatih serta ketersediaan alat dan sarana yang memadai.

Audit Maternal Perinatal telah dilaksanakan di 7 kabupaten/kota tetapi masih belum optimal dalam pelaksanaannya baik dari sisi frekuensi maupun proses pelaksanaan termasuk keterfungsian tim pengkaji dan rekomendasi hasil belum ditindaklanjuti serta belum dibentuknya tim AMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi kegagalan tersebut adalah :

1. Advokasi ke stakeholder terkait; koordinasi lintas program dan lintas sektor, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, LSM dan mitra terkait lainnya;
 2. Meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan,
 3. Mengembangkan sistem rujukan di semua fasyankes baik fasyankes pemerintah maupun swasta;
 4. Audit Maternal Perinatal Terintegrasi dalam Surveilans Kematian Ibu dan optimalisasi penggunaan aplikasi *Maternal Death Notification* (MDN).
 5. Optimalisasi dukungan dan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan dalam implementasi upaya peningkatan kesehatan keluarga antara lain melalui dukungan kebijakan penganggaran, perencanaan program dan kegiatan lintas sektor
 6. Penguatan sumber daya manusia (SDM) dan penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) juga diperlukan.
- b. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup
- Ada beberapa hal yang patut diduga menjadi penyebab kematian neonatus yaitu belum semua tenaga kesehatan di unit pelayanan polindes/poskesdes, puskesmas pembantu, puskesmas rawat inap/non rawat inap kompeten dalam penanganan kasus-kasus pada bayi baru lahir. Untuk itu perlunya pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan baik di unit pelayanan dasar maupun rujukan guna meningkatkan kompetensi mereka di tempat tugas. Selain itu sarana yang belum memadai di beberapa unit pelayanan dalam menangani bayi baru lahir yang mengalami komplikasi. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja ini adalah :
1. Advokasi ke stakeholder terkait;
 2. Koordinasi lintas program dan lintas sektor;

3. Meningkatkan kapasitas teknis SDM kesehatan, mengembangkan sistem rujukan di semua fasyankes baik fasyankes pemerintah maupun swasta;
4. Audit Maternal Perinatal terintegrasi dalam SKI; optimalisasi penerapan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) pada bayi muda dan usia 2 bulan sampai dengan 5 tahun.
5. Peningkatan fungsi posyandu terintegrasi;
6. Koordinasi lintas program dan lintas sektor;
7. Pembinaan kader;
8. Meningkatkan kapasitas teknis SDM gizi,
9. Penundaan usia kehamilan.
10. Optimalisasi dukungan dan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan dalam implementasi upaya peningkatan kesehatan keluarga antara lain melalui dukungan kebijakan penganggaran, perencanaan program dan kegiatan lintas sektor (transportasi, listrik, air bersih, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat)
11. Penguatan sumber daya manusia (SDM) dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

c. Angka Stunting

Balita dengan kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan. Kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita merupakan dampak dari berbagai macam penyebab, seperti sanitasi yang buruk, rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, ketersediaan pangan, transportasi, adat istiadat (sosial budaya), dan sebagainya. Oleh karena itu, pemecahannya harus secara komprehensif. Perawatan anak balita dengan kekurangan gizi (*underweight*) dapat dilaksanakan di Puskesmas Perawatan atau Rumah Sakit setempat dengan Tim Asuhan Gizi yang terdiri dari dokter, nutrisionis/dietisien dan perawat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan indikator ini melalui peningkatan fungsi posyandu terintegrasi; meningkatkan komitmen kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam mengedukasi, menggerakkan peran serta masyarakat sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing dalam upaya penguatan pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak dasar hidup penduduk sesuai siklus hidup, khususnya pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); pembinaan kader; meningkatkan kapasitas teknis SDM gizi, penundaan usia kehamilan. Secara terperinci Intervensi Gizi Spesifik yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Pelayanan gizi bagi anak balita :
 - 1) Meningkatkan pelayanan bagi anak balita di Posyandu dengan melakukan pengukuran rutin status gizi anak balita (BB/TB/PB),
 - 2) Konseling gizi bagi anak balita,
 - 3) Merujuk anak yang tidak naik dua kali berat badannya, menangani anak dengan gizi buruk yang dirujuk dan diberikan PMT.
- b. Pelayanan gizi remaja putri
 - 1) Meningkatkan pelayanan gizi remaja putri di sekolah (usia 12-18 tahun) melalui pemberian tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu (52 tablet/tahun)
 - 2) Konseling gizi bagi remaja dan Pemberian Makan Tambahan Anak Sekolah (PMT AS).
- c. Pelayanan gizi bagi ibu hamil
 - 1) Meningkatkan pelayanan gizi ibu hamil dengan melakukan pemeriksaan antropometri ibu hamil
 - 2) Pemberian tablet Fe 90 tablet
 - 3) Konseling ibu hamil
 - 4) Kelas edukasi bagi ibu hamil
 - 5) Penanganan ibu hamil KEK melalui pemberian PMT

3. Rumus Indikator :

- a. Angka harapan hidup (data dari BPS)
Angka harapan hidup dihitung dari jumlah tahun hidup dibagi jumlah orang
- b. Angka kematian ibu Perkelahiran Hidup
Jumlah kematian karena kehamilan, persalinan masa nifas atau komplikasi-komplikasinya selama satu periode dibagi jumlah kelahiran hidup selama periode yang sama dikali 100.000
- c. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup
Jumlah seluruh kematian bayi dalam 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama dikali 1000
- d. Angka stunting
Cara pengukuran : Membandingkan pengukuran anak dengan median dan nilai Z score untuk usia dan jenis kelamin yang sama.
Z score : nilai individu dibagi standar deviasi populasi rujukan

n. Misi Kelima

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi

Tujuan keenam :

Terwujudnya reformasi birokras yang berkualitas

Sasaran Strategis

meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik.

Indikator Kinerja Utama :

1. Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
2. Indeks Reformasi Birokrasi

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut

Tabel 3.57
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WDP	WTP	tidak tercapai	100
	Indeks Reformasi Birokrasi	65	67,5	65.49	65,49*	100,7	97,02

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

*Data tahun 2017, karena ketersediaan data 2018 belum dikeluarkan KEMENPAN-RB

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator opini audit BPK atas Laporan Keuangan, target tahun 2018 memperoleh WTP terealisasi WTP atau tercapai capaian sebesar 100%. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2017 hanya memperoleh WDP. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator opini audit BPK atas Laporan Keuangan tahun 2018 dikategorikan "**berhasil**".

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, Sebagaimana target tahun 2018 indikator indikator Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 67,5 terealisasi sebesar 65,49 atau tercapai capaian sebesar 97,02%. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2017 sebesar 65,49. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2018 "**berhasil**".

Tabel 3.58
Realisasi Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun realisasi		
		2016	2017	2018
1	2			
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WDP	WDP	WTP
	Indeks Reformasi Birokrasi	67,5	65,49	65,49*

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Tabel 3.59
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (persen)
1	2	3	4	5
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
	Indeks Reformasi Birokrasi	69,50	65,49*	94,09

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 3.60
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan Realisasi Nasional

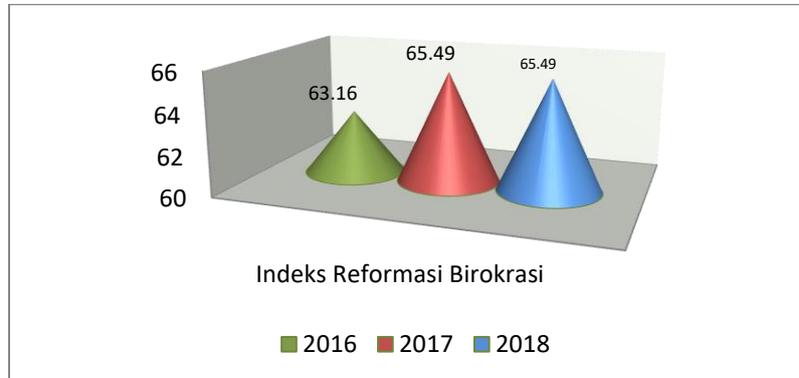
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP	N.A	belum ada
	Indeks Reformasi Birokrasi	65,49*	N.A	belum ada

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

*Realisasi data tahun 2017

Gambar 3.9

Realisasi tahunan kinerja Indeks Reformasi Birokrasi



Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

- ✓ Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis indeks reformasi birokrasi adalah :
 1. Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membenahi dokumen pendukung reformasi birokrasi dan pentingnya pemanfaatan dokumen tersebut bagi peningkatan kinerja perangkat daerah.
 2. Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah untuk mengimplementasikan penguatan reformasi birokrasi dalam melaksanakan kinerja organisasinya.
 3. Masih terbatasnya jumlah Sumber Daya pegawai di perangkat daerah yang benar-benar memahami tentang reformasi birokrasi.
- ✓ Usulan upaya pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :
 1. Membangun sistem pengumpulan data dan informasi kinerja dan data pendukung penguatan reformasi birokrasi secara sistematis. (tanggal 26 Maret 2019 telah di Launching aplikasi SI-MOLEK RB yaitu Aplikasi Monitoring Lembar Kinerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga dengan aplikasi tersebut, memudahkan untuk mengumpulkan dan mengumumkan kepada publik mengenai kemajuan kinerja reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

2. Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis ini adalah program/kegiatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

o. Misi Kelima

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi

Tujuan ketujuh: Terwujudnya pembangunan demokrasi

Sasaran Strategis

meningkatnya aspek kebebasan sipil.

Indikator Kinerja Utama :

skor aspek kebebasan sipil.

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut

Tabel 3.61
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya aspek kebebasan sipil	skor aspek kebebasan sipil	81,70	87,75	81,70	83,07	100	94,66

Sumber : Badan Keatuan Bangsa dan Politik, 2019

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis meningkatnya aspek kebebasan sipil memiliki indikator kinerja skor aspek kebebasan sipil. sebagaimana target tahun 2018 indikator kinerja skor aspek kebebasan sipil adalah 87,75 terealisasi sebesar 83,07 atau capaian realisasi tahun 2018 sebesar 94,66 4%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis meningkatnya aspek kebebasan sipil memiliki indikator kinerja skor aspek kebebasan sipil tahun 2018 dikategorikan "**berhasil**".



Tabel 3.62

Realisasi Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		
		2016	2017	2018
1	2			
meningkatnya aspek kebebasan sipil	skor aspek kebebasan sipil	87,65	83,07	83,07*

Sumber : Badan Keatuan Bangsa dan Politik, 2019

Tabel 3.63

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (persen)
1	2	3	4	5
meningkatnya aspek kebebasan sipil	skor aspek kebebasan sipil	87,82	83,07*	94,6

Sumber : Badan Keatuan Bangsa dan Politik, 2019

Tabel 3.64

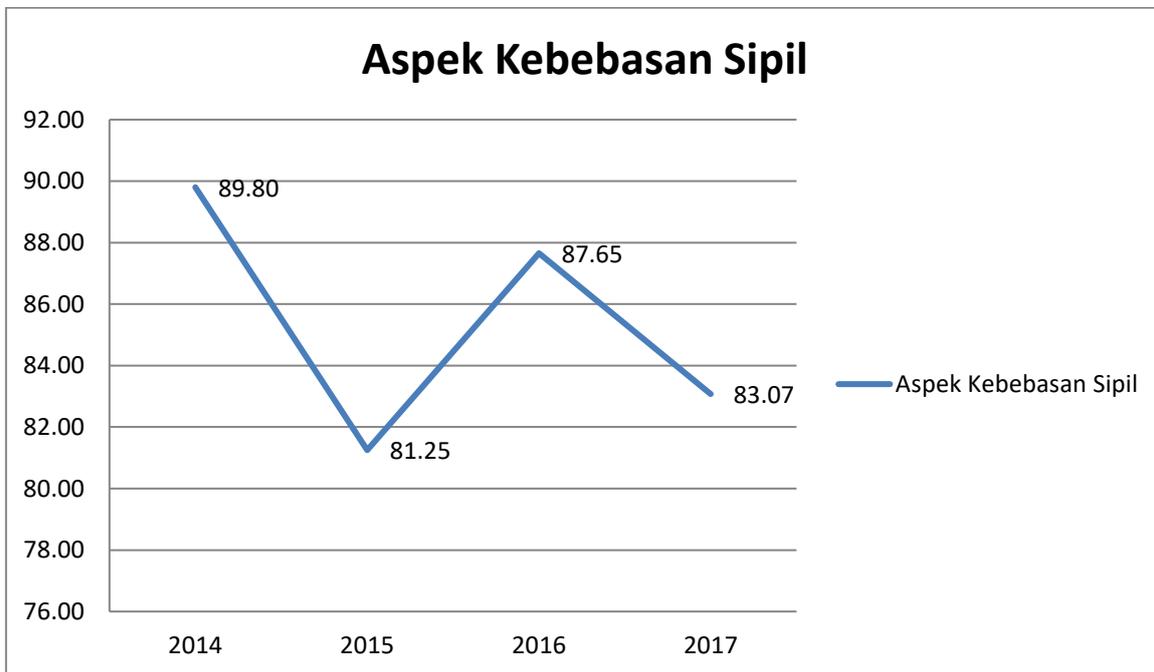
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2017 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatnya aspek kebebasan sipil	skor aspek kebebasan sipil	83,07	78,75	+ 4,32

Sumber : Badan Keatuan Bangsa dan Politik, 2019

Untuk mengetahui perkembangan skor aspek kebebasan sipil disajikan pada Gambar berikut :

Gambar 3.10
Perkembangan skor aspek kebebasan sipil Kepulauan Bangka Belitung



Analisa capaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia :

Pada tahun 2016 aspek kebebasan sipil masih bertahan pada kategori baik. Pada tahun 2017 aspek kebebasan sipil turun sebesar 4,58 poin, dari 87,65 pada tahun 2016 menjadi 83,07 pada tahun 2017. Jika dilihat dari tahun 2009 hingga 2017, aspek kebebasan sipil selalu berada di posisi yang lebih tinggi dibandingkan kedua aspek IDI lainnya. walaupun berfluktuasi, namun nilainya stabil pada kategori "baik".

- ✓ Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis ini adalah :
 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat saling menghargai pendapat dan pikiran yang disampaikan dalam menanggapi isu atau permasalahan politik.
 2. Masih kurangnya peran keluarga, sekolah maupun perguruan tinggi dalam memberikan pendidikan politik.
- ✓ Usulan upaya pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Membiasakan diri untuk berperilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
 2. Menyadari sepenuhnya sebagai manusia madani, yaitu :
 - Kenyataan adanya keragaman budaya Indonesia yang merupakan dasar pengembangan identitas bangsa Indonesia dan kebudayaan nasional.
 - Pentingnya saling pengertian di antara sesama anggota masyarakat.
 - Adanya toleransi yang tinggi.
 - Adanya kepastian hukum.
 - Membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun.
- ✓ Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis ini adalah program/kegiatan yang menunjang kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah program pengembangan wawasan kebangsaan, program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, dan program pendidikan politik masyarakat.

p. Misi Kelima

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi

Tujuan ketujuh: Terwujudnya pembangunan demokrasi

Sasaran Strategis

terpenuhinya hak-hak politik masyarakat.

Indikator Kinerja Utama :

skor aspek hak-hak politik.

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut

Tabel 3.65
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	skor aspek hak-hak politik	80,25	81,72	82,30	82,30*	102,5	100,7

Sumber : Badan Keatuan Bangsa dan Politik, 2019

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis terpenuhinya hak-hak politik masyarakat memiliki indikator kinerja skor aspek hak-hak politik. sebagaimana target tahun 2018 indikator kinerja skor aspek hak-hak politik adalah 81,72 terealisasi sebesar 82,30* atau capaian realisasi tahun 2018 sebesar 100,7 %. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis terpenuhinya hak-hak politik masyarakat memiliki indikator kinerja skor aspek hak-hak politik tahun 2018 dikategorikan "**sangat berhasil**".

Tabel 3.66
Realisasi Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		
		2016	2017	2018
1	2			
terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	skor aspek hak-hak politik	81,09	82,30	82,30*

Sumber : Badan Keatuan Bangsa dan Politik, 2019

Tabel 3.67

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (persen)
1	2	3	4	5
terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	skor aspek hak-hak politik	81,85	82,30*	100,54

Sumber : Badan Keatuan Bangsa dan Politik, 2019

Tabel 3.68

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2017 dengan Target Nasional

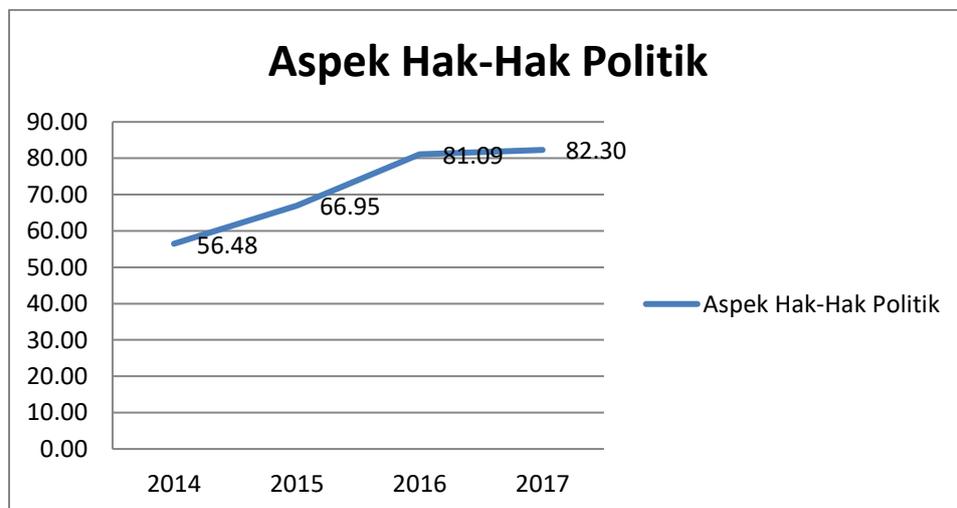
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	skor aspek hak-hak politik	82,30*	66,63	+ 15,67

Sumber : Badan Keatuan Bangsa dan Politik, 2019

Untuk mengetahui perkembangan skor aspek hak-hak politik disajikan pada Gambar berikut :

Gambar 3.11

Perkembangan skor aspek hak-hak politik Kepulauan Bangka Belitung



Analisa capaian indikator Hak-hak politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Pada tahun 2016 seluruh aspek IDI Kepulauan Bangka Belitung sudah berada pada kategori baik. Aspek hak-hak politik masih bertahan pada kategori baik. Aspek hak-hak politik mengalami peningkatan sebesar 1,21 poin dari 81,09 pada tahun 2016 menjadi 82,30 pada tahun 2017.

Jika dilihat dari tahun 2009 hingga 2017, aspek hak-hak politik memiliki kecenderungan yang terus meningkat, dari 48,29 (kategori "buruk") pada 2009 menjadi 82,30 (kategori "baik") pada 2017. Aspek hak-hak politik yang sebelumnya selalu berada di posisi terendah, mulai tahun 2016 nilainya berada di atas aspek Lembaga Demokrasi.

q. Misi Kelima

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi

Tujuan ketujuh: Terwujudnya pembangunan demokrasi

Sasaran Strategis

meningkatnya kualitas lembaga demokrasi.

Indikator Kinerja Utama :

skor aspek lembaga demokrasi.

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut

Tabel 3.69
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya kualitas lembaga demokrasi.	skor aspek lembaga demokrasi	N.A	80,30	72,89	72,89*	N.A	90,77

Sumber : Badan Keatuan Bangsa dan Politik, 2019



Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis meningkatnya kualitas lembaga demokrasi memiliki indikator kinerja skor aspek lembaga demokrasi. sebagaimana target tahun 2018 indikator kinerja skor aspek hak-hak politik adalah 80,30 terealisasi sebesar 72,89* atau capaian realisasi tahun 2018 sebesar 90,7%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas lembaga demokrasi memiliki indikator kinerja skor aspek lembaga demokrasi tahun 2018 dikategorikan “berhasil”.

Tabel 3.70
Realisasi Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		
		2016	2017	2018
<i>1</i>	<i>2</i>			
meningkatnya kualitas lembaga demokrasi.	skor aspek lembaga demokrasi	80,20	72,89	72,89*

Sumber : Badan Keatuan Bangsa dan Politik, 2019

Tabel 3.71
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (persen)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
meningkatnya kualitas lembaga demokrasi.	skor aspek lembaga demokrasi	80,54	72,89*	90,5

Sumber : Badan Keatuan Bangsa dan Politik, 2019

Tabel 3.72

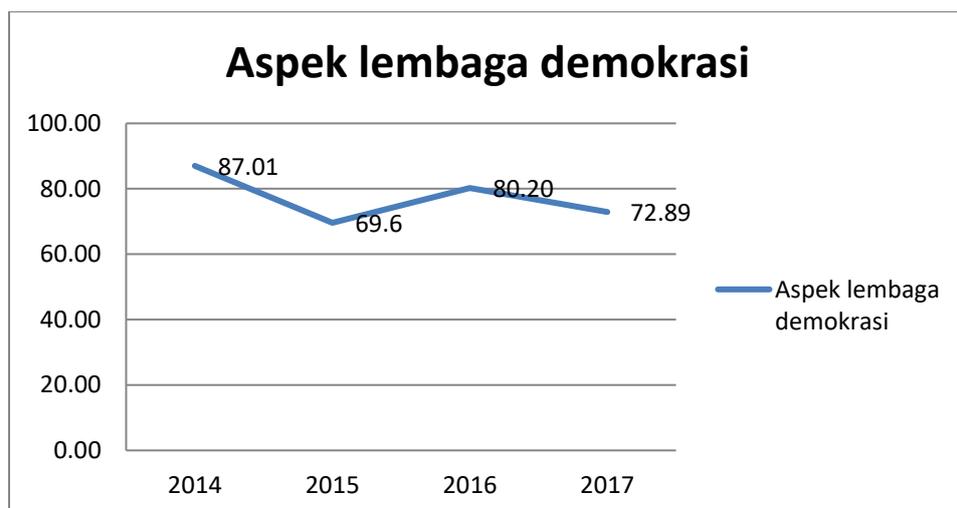
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2017 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatnya kualitas lembaga demokrasi.	skor aspek lembaga demokrasi	72,89	72,49	+ 0,40

Sumber : Badan Keatuan Bangsa dan Politik, 2019

Untuk mengetahui perkembangan skor aspek lembaga demokrasi disajikan pada Gambar berikut :

Gambar 3.12
Perkembangan skor aspek Lembaga demokrasi Kepulauan Bangka Belitung



Analisa capaian indikator Hak-hak politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Pada tahun 2016 seluruh aspek IDI Kepulauan Bangka Belitung sudah berada pada kategori baik. Namun, pada tahun 2017 aspek lembaga demokrasi kembali mengalami penurunan menjadi kategori "sedang". Penurunan nilai IDI Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 disebabkan oleh penurunan dua aspek IDI, yaitu aspek kebebasan sipil dan aspek lembaga demokrasi. Aspek lembaga demokrasi mengalami penurunan tertinggi sebesar 7,31 poin, dari 80,20 pada tahun 2016 menjadi 72,89 pada tahun 2017.

Nilai dari aspek lembaga demokrasi paling berfluktuatif dibandingkan dua aspek lainnya. Aspek lembaga demokratis mengalami penurunan tertinggi pada periode 2014-2015 yaitu sebesar 17,41 poin. Sementara itu pada periode berikutnya yaitu 2015-2016, aspek ini mengalami kenaikan tertinggi yaitu sebesar 10,60 poin.

r. Misi Kelima

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi

Tujuan keenam: Terwujudnya pembangunan demokrasi

Sasaran Strategis

birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator Kinerja Utama :

indeks integritas pelayanan publik.

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut

Tabel 3.73
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Indeks integritas pelayanan publik	N.A	8,0	7,85	8,10*	N.A	101,25

Sumber data : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas memiliki indikator kinerja Indeks integritas pelayanan publik sebagaimana target tahun 2018 adalah 8,0 terealisasi target sebesar 8,10 atau capaian realisasi tahun 2018 sebesar 101,25%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis birokrasi yang memiliki

pelayanan publik yang berkualitas memiliki indikator kinerja Indeks integritas pelayanan publik tahun 2018 dikategorikan **"sangat berhasil"**.

Tabel 3.74
Realisasi Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Indeks integritas pelayanan publik	N.A	8,10	8,10*

Sumber data : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel 3.75
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (persen)
1	2	3	4	5
birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Indeks integritas pelayanan publik	N.A	8,10	N.A

Sumber data : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel 3.76
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Indeks integritas pelayanan publik	8,10	N.A	belum ada

Sumber data : Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

s. Misi Keenam

pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Tujuan : Meningkatnya tata kelola kebencanaan

Sasaran Strategis

meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana.

Indikator Kinerja Utama :

Indeks Kapasitas bencana daerah

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut

Tabel 3.77
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola kebencanaan	Indeks Kapasitas Bencana daerah	N.A	0,15	0,10	0,26	N.A	173,3

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis meningkatnya tata kelola kebencanaan dengan indikator kapasitas bencana daerah, sebagaimana target tahun 2018 indikator kinerja Indeks resiko bencana sebesar 0,15 terealisasi sebesar 0,26 atau tercapai capaian sebesar 173,3. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2018 sebesar 0,26 dan capaian realisasi tahun 2017 sebesar 0,10 %. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis meningkatnya tata kelola kebencanaan dengan indikator Indeks kapasitas bencana tahun 2018 **“sangat berhasil”**.

Tabel 3.78
Realisasi Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018
1	2	
Meningkatnya tata kelola kebencanaan	Indeks Kapasitas Bencana daerah	0,26

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Tabel 3.79
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (persen)
1	2	3	4	5
Meningkatnya tata kelola kebencanaan	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	0,35	0,26	74,28

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

Tabel 3.80
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
Meningkatnya tata kelola kebencanaan	Indeks Kapasitas Bencana daerah	0,26	N.A	belum ada

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2019

- ✓ Faktor pendorong tercapainya realisasi indikator Indeks Kapasitas Bencana Daerah :
 1. Adanya dasar hukum peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana;

2. Adanya dukungan kajian risiko bencana yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baik dokumen maupun peta kajian;
 3. Adanya dukungan fasilitasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- ✓ Hambatan dan kendala yang dihadapi :
1. Belum terbentuknya badan penanggulangan bencana daerah di tiap kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 2. Dengan belum terbentuknya BPBD Kabupaten/Kota sulit untuk berkoordinasi baik dalam hal penyaluran logistik dan peralatan, kegiatan/anggaran maupun pendidikan dan pelatihan;
 3. Belum terkoordinirnya penyampaian informasi kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terintegrasi.

t. Misi Keenam

Pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Tujuan : meningkatnya tata kelola lingkungan hidup

Sasaran Strategis
peningkatan kualitas Lingkungan Hidup.

Indikator Kinerja Utama :
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut



Tabel 3.81
Pencapaian Target Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (RPJMD)		Realisasi		Capaian (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,00 (RPJMD lama)	59,76	62,53	62,63	96,2	104,8

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Sebagaimana target tahun 2018 indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 59,76 terealisasi sebesar 62,63 atau tercapai capaian sebesar 104,8%. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2018 sebesar 104,8% dan capaian realisasi tahun 2017 sebesar 96,2 %. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2018 "sangat **berhasil**".

Tabel 3.82
Realisasi Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,29	60,21	60,56	57,44	62,53	62,63

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Tabel 3.83
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD (2022)	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan (persen)
1	2	3	4	5
meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,69	62,63	96,8

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Tabel 3.84
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional

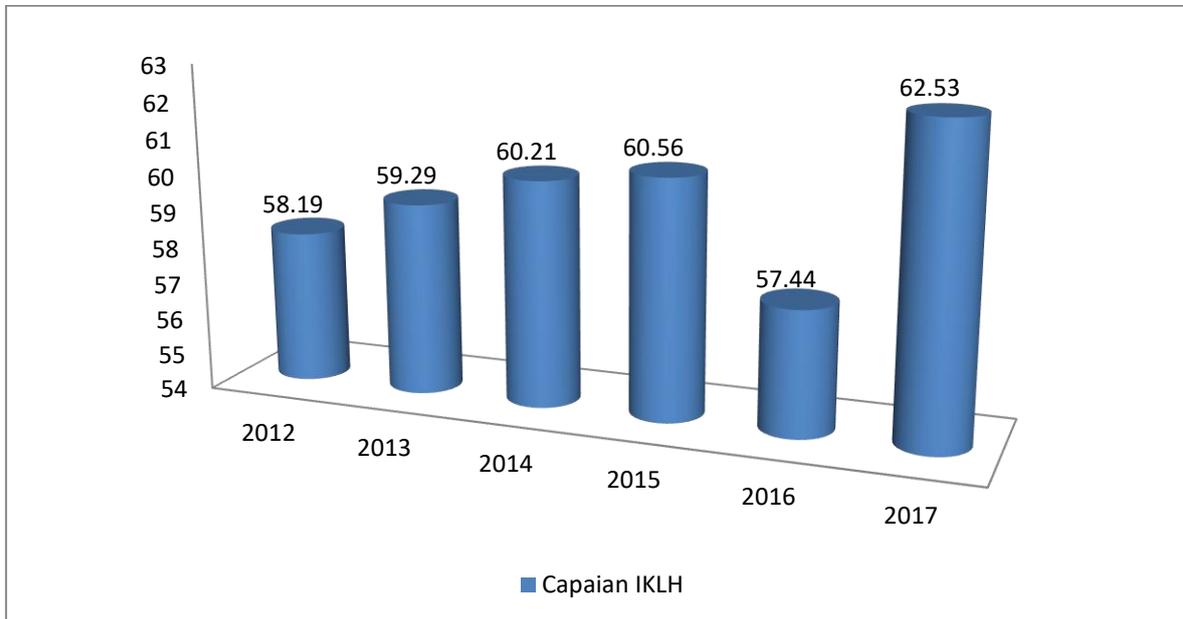
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5
meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,63	-	belum ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Untuk mengetahui realisasi kinerja tahunan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun ke tahun, disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 3.13

Realisasi kinerja tahunan



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di tingkat nasional dan daerah khususnya tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Indikator dari IKLH terdiri dari kualitas air sungai atau Indeks Air (IPA), kualitas udara atau indeks udara (IPU) dan kualitas tutupan lahan atau Indeks Tutupan Hutan (ITH).

Potensi yang mempengaruhi kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : Industri peleburan dan pemurnian biji timah, CPO, pengolahan kayu, minuman, asphalt mixing plant, perkebunan, permukiman, pertambangan, pertanian, peternakan, industri pariwisata, jumlah kendaraan, limbah padat sarana transportasi, beban limbah cair, dan limbah B3 dari sarana penginapan serta rumah sakit, keterbatasan fasilitas buang air besar dan timbulan sampah.

Realisasi capaian IKLH tahun 2017 sebesar 62,53, sedangkan IKLH tahun 2016 sebesar 57,44, bila dibandingkan maka kenaikan IKLH tahun 2017 sebesar 8,1%. Peningkatan IKLH tahun 2017 disebabkan adanya kontribusi dari indeks pencemaran air

(IPA) sebesar 66,25, indeks pencemaran udara (IPU) sebesar 94,97 dan indeks tutupan lahan (ITH) sebesar 35,40.

Sedangkan penurunan IKLH tahun 2016 didorong oleh adanya Penurunan nilai indeks pencemaran air sebesar 1,3. Hal ini disebabkan beberapa parameter hasil pemantauan kualitas air berada diatas baku mutu diantaranya COD, BOD untuk beberapa titik pemantau yang disebabkan oleh pencemaran dari sumber domestik maupun *point source* dari industri.

- ✓ Hambatan dan kendala yang dihadapi karena belum tercapainya target yang ditetapkan adalah :
 4. Peningkatan beban pencemaran yang masuk ke sungai.
 5. Meningkatnya aktifitas didaerah aliran sungai (DAS) seperti aktivitas tambang, perkebunan serta pertambahan jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 6. Peningkatan beban pencemaran udara ambien akibat meningkatnya aktivitas transportasi, industri dan masyarakat yang menghasilkan emisi udara baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak.
 7. Pembukaan lahan yang semakin meluas baik untuk kepentingan pelaku usaha maupun kepentingan masyarakat.
 8. Tidak tercapainya target beberapa kegiatan strategis dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran.
- ✓ Usulan upaya pemecahan masalah mengatasi belum tercapainya realisasi adalah:
 1. Mengoptimalkan upaya pengawasan terhadap aktivitas yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air sungai.
 2. Mengoptimalkan upaya koordinasi dengan berbagai sektor terkait dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 3. Mengoptimalkan peran kemitraan dengan pelaku usaha dan masyarakat untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 4. Mengoptimalkan peran UPT Laboratorium dalam pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan.

5. Mengoptimalkan sumberdaya manusia yang berkompeten dan terampil bidang lingkungan hidup.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi anggaran program efisien terhadap pencapaian sasaran staretgis terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup.

Program yang mendukung terhadap indeks kualitas lingkungan hidup adalah Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dan Program peningkatan pengendalian polusi.

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 11 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap daerah mempunyai hak untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dalam kerangka otonomi daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan

manfaat untuk masyarakat serta dilakukan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Didalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri dari atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sedangkan didalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pajak Daerah Provinsi diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun yang masih perlu diintensifkan pemungutannya meliputi:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
- c) Pajak Air Permukaan (PAP);
- d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

Dengan adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000), potensi pajak daerah provinsi yang mengalami perubahan juga akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain:

- a) Adanya penambahan objek pajak baru yang dikelola Pemerintah Provinsi yaitu Pajak Rokok;
- b) Dikenakannya Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Dinas;
- c) Adanya pengalihan pengelolaan terhadap Pajak Air Bawah Tanah, maka Pemerintah Provinsi hanya mengelola Pajak Air Permukaan saja;
- d) Penyerahan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat/Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian juga dengan retribusi daerah, mengingat potensinya yang besar, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan ekstensifikasi, karena itu instansi pemungut dapat mengajukan Peraturan Daerah tentang Retribusi. Strategi yang tepat yang diimplementasikan melalui sebuah kebijakan yang efektif akan sangat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dan retribusi untuk memenuhi kewajibannya selaku warga negara yang baik.

a. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018

✚ Pendapatan Daerah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menganggarkan pendapatan dan belanja untuk pelaksanaan kegiatannya dalam APBD Tahun 2018. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp2.487.065.640.565,87 dan realisasi sebesar Rp2.564.417.524.733,35 atau 103,11%. dibandingkan dengan tahun 2017, terjadi peningkatan realisasi pendapatan daerah sebanyak Rp77.351.884.167,48 atau meningkat 3,11%.

Perincian terhadap anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2018, sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Rp789.629.819.565,87. Realisasi anggaran Rp850.705.473.042,00 atau 107,70% dengan perincian:

- 1). Pajak daerah ditargetkan Rp669.996.399.762,00, terealisasi Rp787.235.519.038,83 atau 117,50%;
- 2). Restribusi daerah ditargetkan Rp16.438.195.604,87, terealisasi Rp7.605.377.047,00 atau 46,26%;
- 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan Rp8.500.000.000,00, terealisasi Rp5.114.092.291,88 atau 60,17%;
- 4). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan Rp94.695.224.199,00, terealisasi Rp50.525.857.953,64 atau 53,36%;

b. Dana Perimbangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan ditargetkan Rp1.685.118.643.150,00 dari target tersebut terealisasi Rp1.701.620.949.552,00 atau 100,98% dengan perincian :

- 1) Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebanyak Rp215.555.879.603,00
- 2) Dana Alokasi Umum sebanyak Rp1.018.435.174.809,00;
- 3) Dana Alokasi Khusus sebanyak Rp467.629.895.140,00;

Secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Dana perimbangan mengalami kenaikan dari Rp1.539.972.252.502,00 pada tahun anggaran 2017 menjadi Rp1.694.218.759.243,00 dalam tahun anggaran 2018 atau meningkat 10,02%.

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain Pendapatan yang Sah ditargetkan Rp12.317.177.850,00. Dari target tersebut terealisasi Rp12.317.177.850,00 atau 100,00% yaitu dari Sumbangan Pihak Ketiga sebanyak Rp12.317.177.850,00;

Dibanding dengan tahun anggaran 2017, realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan dari Rp2.251.036.902.420,48 Pada tahun 2017 menjadi Rp12.317.177.850,00 pada tahun 2018 atau meningkat 999,39%.

 **Belanja Daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam satu tahun anggaran yang menjadi pengeluaran daerah.

Pada tahun anggaran 2018 dialokasikan anggaran sebanyak Rp2.596.704.155.898,11. Dari anggaran tersebut terealisasi Rp2.370.446.858.191,80 atau 91,29% dengan perincian sebagai berikut :

a) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dianggarkan Rp1.461.192.937.319,86 Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja Pegawai, belanja hibah, belanja Bantuan Sosial, belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan belanja tidak terduga dst. Dari anggaran tersebut terealisasi Rp1.360.255.859.776,02 Atau 93,09%;

b) Belanja Langsung

Belanja Langsung dianggarkan Rp1.135.511.218.578,25 . Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja Pegawai, belanja

barang/jasa, dan belanja. Dari anggaran tersebut terealisasi Rp1.010.184.299.315,78 atau 88,96%.

Secara keseluruhan diketahui bahwa realisasi belanja tahun anggaran 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun anggaran 2017,

b. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Aspek kinerja pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 77.351.884.167,48 atau meningkat 3,11%, sehingga secara kumulatif realisasinya lebih dari target yang telah ditetapkan atau terdapat pelampauan sebesar 2 triliun 487 milyar 065 juta 640 ribu 565 rupiah 87 sen, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.85
Laporan Realisasi APBD TA. 2018

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		bertambah/(berkurang)	
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1.	PENDAPATAN DAERAH	RP2.487.065.640.565,87	Rp2.564.417.524.733,33	Rp77.351.884.167,48	103,11%
1.1	PAD	Rp789.629.819.565,87	Rp850.479.397.331,35	Rp60.849.577.765,48	107,50%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp669.996.399.762,00	Rp787.235.420.038,83	Rp117.239.020.276,83	117,50%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	Rp16.438.195.604,87	Rp7.604.027.047,00	Rp8.834.168.557,87	46,26%

1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp8.500.000.000,00	Rp5.114.092.291,00	Rp3.385.907.708,12	60,17%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp94.695.224.199,00	Rp50.525.857.953,64	Rp44.240.933.505,36	53,36%
1.2	DANA PERIMBANGAN	Rp1.685.118.643.150,00	Rp1.701.620.949.552,00	Rp16.502.306.402,00	99,03%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp188.486.286.150,00	Rp215.555.879.603,00	Rp27.069.593.453,00	114,36%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	Rp1.018.673.218.000,00	Rp1.018.673.218.000,00	(Rp238.043.191)	99,98%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	Rp477.959.139.000,00	Rp467.629.895.140,00	(Rp17.731.434.169)	96,29%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp12.317.177.850,00	Rp12.317.177.850,00	-	100%
1.3.1	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp12.317.177.850,00	Rp12.317.177.850,00	-	100%
Jumlah pendapatan daerah		RP2.487.065.640.565,87			

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Komposisi realiasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun anggaran 2014 s.d 2018 seperti tampak dalam grafik di bawah, menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih merupakan pendapatan yang berkontribusi paling besar rata-rata 66,4%, Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih tergantung pada transfer dari pemerintah Pusat. Di urutan kedua adalah Pendapatan Asli Daerah rata-rata 33, 15 % dan yang ketiga Lain-lain Pendapatan Yang Sah 0,46%.

Berdasarkan data perkembangan beberapa tahun terakhir proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih memberikan kontribusi dan memiliki peran besar untuk menunjang kemampuan belanja daerah dalam rangka mendukung tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam program kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut ini disampaikan rekapitulasi proporsi dan kontribusi PAD terhadap kekuatan APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.86
Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

NO	TAHUN	PAD	Pendapatan Daerah	Proporsi PAD thd Pendapatan Daerah (%)
1	2014	Rp563.108.840.861,42	Rp1.719.774.423.456,42	32,74%
2	2015	Rp571.802.890.055,14	Rp1.886.998.635.504,14	30,30%
3	2016	Rp574.258.443.819,77	Rp1.949.866.524.266,77	29,45%
4	2017	Rp709.832.181.818,48	Rp2.250.952.975.872,48	31,53%
5	2018	Rp850.479.397.331,35	Rp2.564.417.524.733,35	33,17%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Khusus terkait dengan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 mengalami peningkatan 5% dari tahun 2017. Sedangkan untuk pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 4,3 & per tahun dengan asumsi bahwa kondisi sosial, politik dan perekonomian baik internasional, nasional maupun regional stabil dan tidak adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur tentang pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah yang sebagian diserahkan kepada Kabupaten/Kota, antara lain Pajak Air Bawah Tanah, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Retribusi Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.87
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD TA. 2018

NO	TAHUN	PAD	Pajak Daerah	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (%)
1	2014	Rp563.108.840.861,42	Rp502.262.616.895,88	90,26%
2	2015	Rp571.802.890.055,14	Rp506.3944.936.060,22	88,66%
3	2016	Rp574.258.443.819,77	Rp507.983.460.531,72	88,46%
4	2017	Rp701.447.982.673,55	Rp629.136.457.212,39	88,63%
5	2018	Rp850.479.397.331,35	Rp787.235.420.038,83	92,56%

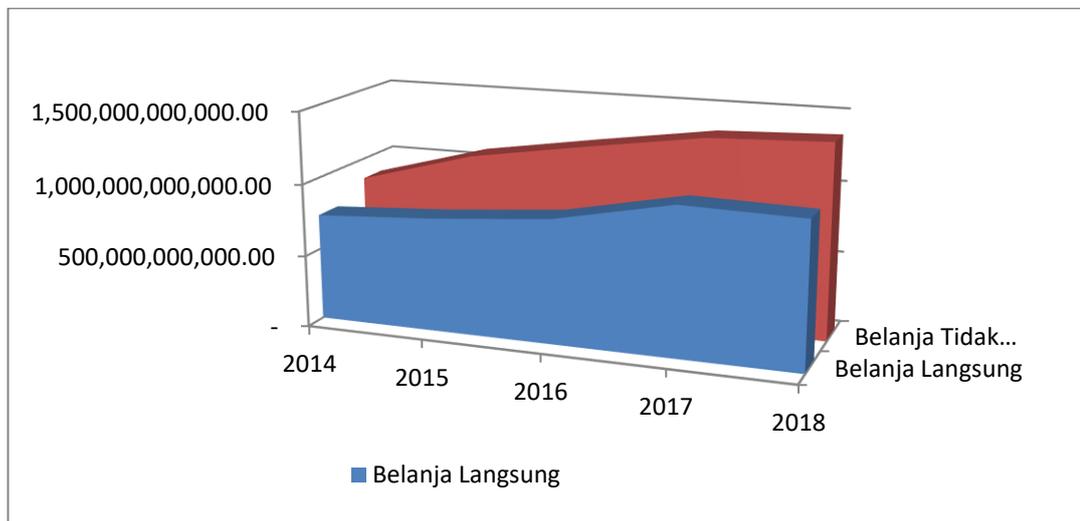
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

c. Kinerja Pendapatan Daerah

Selanjutnya, dari sisi Belanja Daerah, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 1 triliun 461 milyar 192 juta 937 ribu 319 rupiah 86 sen terealisasi sebesar 1 triliun 360 milyar 255 juta 859 ribu 776 rupiah 02 sen atau 93,09 persen dan Belanja Langsung dari alokasi sebesar 1 triliun 135 milyar 511 juta 218 ribu 578 rupiah 25 sen terealisasi sebesar 1 triliun 010 milyar 184 juta 299 ribu 315 rupiah 78 sen atau 88,96 %.

Gambar 3.14

Struktur Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

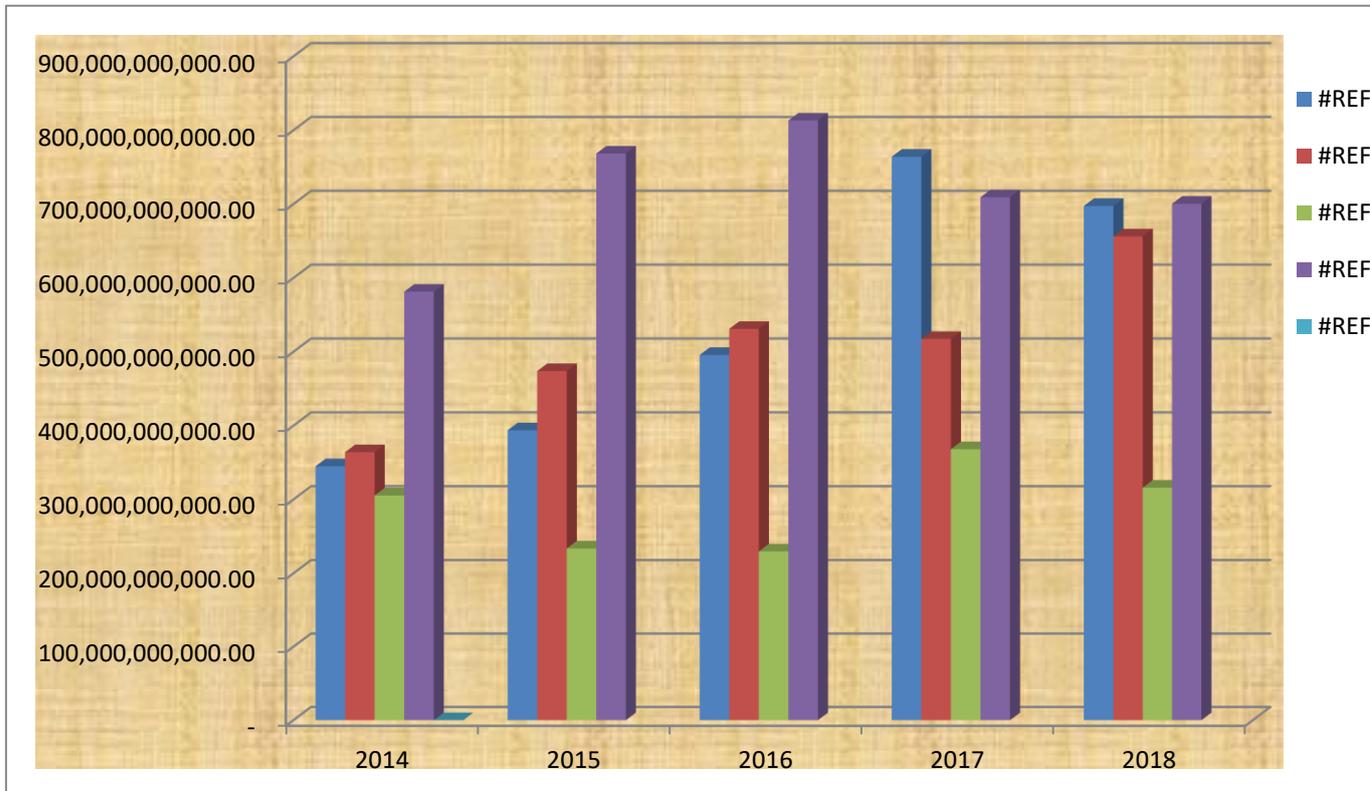


Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Grafik di atas menggambarkan bahwa struktur belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar realisasinya adalah Belanja tidak langsung jika dibandingkan dengan belanja langsungnya. Adapun komposisi belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh belanja lain-lain selanjutnya diikuti oleh belanja Pegawai lalu Belanja Belanja Barang dan Jasa rata-rata dan ditutup oleh Belanja Modal, sebagaimana terlihat dalam grafik berikut :

Gambar 3.15

Struktur Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Persentase realisasi belanja provinsi yang terbesar adalah untuk Belanja Lainnya, yaitu berupa transfer Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dan Kota. Hal ini wajar mengingat pelampauan pendapatan yang tertinggi untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dari pajak daerah, sehingga memang harus dibagihasilkan. Selain itu pada Belanja Lainnya di APBD Provinsi juga terdapat pos Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Persentase realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal memiliki tren meningkat sedangkan realisasi belanja pegawai menurun.

Realisasi Belanja Daerah merupakan realisasi penyerapan belanja daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik. Pengelolaan belanja daerah untuk

mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 dengan menganut sitem prinsip Akuntabilitas, Efektif dan Efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.

Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, Anggaran dan realisasi belanja daerah seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, Anggaran dan realisasi belanja daerah seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.88
Laporan Belanja APBD TA. 2018

KODE	URAIAN	BELANJA			
		ANGGARAN	REALISASI	SISA REALISASI	
				Rp	%
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.461.192.937.319.86	1.360.255.859.776.02	(100.937.077.543.84)	-6.91%
2.1.1	Belanja Pegawai	705.272.537.397.66	659.760.322.587.62	(45.512.214.810.04)	-6.45%
2.1.2	Belanja Bunga			-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	812.500.000.00	-	(812.500.000.00)	100.00%
2.1.4	Belanja Hibah	281.677.752.950.20	268.038.087.969.00	(13.639.664.981.20)	-4.84%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	718.910.000.00	479.075.000.00	(239.835.000.00)	-33.36%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	277.927.277.800.00	261.064.334.164.64	(16.862.943.635.36)	-6.07%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	192.487.959.172.00	170.854.282.754.76	(21.633.676.417.24)	-11.24%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.296.000.000.00	59.757.300.00	(2.236.242.700.00)	-97.40%

2.2	Belanja Langsung	1.135.511.218.578.25	1.010.184.299.315.78	(125.326.919.262.47)	-11.04%
2.2.1	Belanja Pegawai	42.759.193.600.00	37.801.916.350.00	(4.957.277.250.00)	-11.59%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	747.616.658.181.25	656.285.232.195.14	(91.331.425.986.11)	-12.22%
2.2.3	Belanja Modal	345.135.366.797.00	316.097.150.770.64	(29.038.216.026.36)	-8.41%
	Jumlah Belanja	2.596.704.155.898.11	2.370.440.159.091.80	(226.263.996.806.31)	-8.71%

d. Analisis Penggunaan Sumber daya Anggaran

a. Alokasi Per sasaran Pembangunan

Pembagian alokasi anggaran pada suatu Pemerintah Daerah disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Pada tabel di bawah ini disajikan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran ataupun urusan :

Tabel. 3.89
Persentase Alokasi Anggaran :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	(%)
<i>d</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	171.778.387.402	6,62
2	Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan	30.334.348.561	1,17
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (Tamu Asing dan Indonesia)	211.201.833.029	8,13
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	211.201.833.029	8,13
4	Meningkatnya produksi sektor pertambangan	Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalan	17.799.614.674	0,69
5	Meningkatnya produksi sektor perindustrian	Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan	205.370.844.156-	7,91
6	Terwujudnya kemandirian	Rasio Elektrifikasi	4.168.856.000	0,16

	energy			
7	Meningkatnya kemandirian fiskal	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	23.334.295.574	0,90
8	Menurunnya pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	8.671.978.673	0,33
9	Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	32.594.238.110	1,26
10	Menurunnya Inflasi	Angka Inflasi	193.728.965.481	7,46
11	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	3.049.111.912	0,12
12	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Rasio ketersediaan transportasi layak jalan	184.436.426.526	7,10
		Indeks konektiviti kabupaten/kota		
		Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	1.860.960.000	0,07
13	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	124.482.577.841	4,79
		Rata-rata lama sekolah	124.482.577.841	4,79
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	168.974.732.569	6,51
		Angka Kematian Ibu	168.974.732.569	6,51
		Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	168.974.732.569	6,51
		Angka Stunting	168.974.732.569	6,51
15	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	5.570.236.980	0,21
		Indeks Reformasi Birokrasi	245.199.827.452	9,44
16	Meningkatnya aspek kebebasan sipil	skor aspek kebebasan sipil	4.016.038.990	0,15
17	Terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	skor aspek hak-hak politik	755.944.360	0,03
18	meningkatkan kualitas lembaga demokrasi	skor aspek lembaga demokrasi	231.344.000	0,01
19	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Integritas Pelayanan publik	577.472.547.030	22,24
20	Meningkatkan kapasitas	Indeks kapasitas bencana	51.534.547.030	1,98

	terhadap penanggulangan bencana	daerah		
21	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	8.719.278.716	0,34

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat beberapa urusan yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akan tetapi belum bisa diambil kesimpulan secara langsung, karena masing-masing kinerja utama dan indikator kinerja utama merupakan hasil dari multiplier effect yang diakibatkan oleh penganggaran untuk kinerja lainnya.

b. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Tabel 3.90

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	4,80	1,07*	22,29	171.778.387.402	143.812.120.003	83,71	-61,42
Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan	3,80	-3,24*	-85,26	30.334.348.561	23.521.499.426	77,54	-7,68
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (Tamu Asing dan Indonesia)	400.050	369.422	92,34	211.201.833.029	203.499.751.027,40	96,35	-4,01
	Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,09	0,09	100	211.201.833.029	203.499.751.027,40	96,35	3,65



Meningkatnya produksi sektor pertambangan	Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalan	0,53	2,22*	418,0	17.799.614.674	16.750.049.740	94,10	323,90
Meningkatnya produksi sektor perindustrian	Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan	2,63	6,22*	236,5	205.370.844.156	200.853.979.129,99	97,80	138,70
Terwujudnya kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi	100,%	100%	100	3.981.988.000	3.308.395.011,40	83,08	16,92
Meningkatnya kemandirian fiskal	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	0,27	0,33	122,2	23.334.295.574	19.895.908.969,23	85,26	36,94
Menurunnya pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	3,70	3,65	101,40	8.671.978.673	8.071.024.021	93,07	8,33
Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	5,10	5,25	97,14	32.594.238.110	30.739.128.452	94,30	2,80
Menurunnya Inflasi	Angka Inflasi	6,42	3,18	201,8	193.728.965.481	189.142.606.527,99	97,63	104,17
Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	2,09	2,08	100,48	3.049.111.912	2.791.420.346	91,54	8,94
Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Rasio ketersediaan transportasi layak jalan	0,00038	0,0136	3578,9	184.436.426.526	181.686.592.043,99	71,29	3,48



	Indeks konektiviti kabupaten/kota	12,16	11,43	93,99	184.436.426.526,00	181.686.592.043,99	98,50	-4,51
	Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,20	0,20	100	1.860.960.000	1.847.313.000	99,26	0,74
Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	11,84	11,83*	99	124.482.577.841	103.887.602.540	83,45	15,55
	Rata-rata lama sekolah	7,85	7,78*	99,10	124.482.577.841	103.887.602.540	83,45	15,65
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,59	69,95*	97,7	168.974.732.569	147.536.837.200,80	87,31	10,32
	Angka Kematian Ibu	89,85 (39/KH)	167,24	53,72	168.974.732.569	147.536.837.200,80	87,31	-33,9
	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	7,2/1000 KH	6,31	114,10	168.974.732.569	147.536.837.200,80	87,31	26,79
	Angka Stunting	26,5	10,65	248,8	168.974.732.569	147.536.837.200,80	87,31	161,49
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP*	100	5.570.236.980	4.307.309.886	77,32	22,68



	Indeks Reformasi Birokrasi	67,5	65,49*	97,02	245.199.827.452	209.628.943.740	85,49	11,53
Meningkatnya aspek kebebasan sipil	skor aspek kebebasan sipil	87,75	83,07*	94,66	4.016.038.990	3.698.052.831	92,08	2,58
Terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	skor aspek hak-hak politik	81,72	82,30*	100,7	755.944.360	637.892.170	84,38	16,32
meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	skor aspek lembaga demokrasi	80,30	72,89*	90,7	231.344.000	215.054.600	92,95	-2,25
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Integritas Pelayanan publik	8,0	8,10*	101,2	577.472.547.030	508.759.680.997,40	88,10	13,1
Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	Rendah (0,15)	0,26	173,3	51.534.547.030	46.600.348.026	90,42	82,88
Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,60	62,53	91,15	8.719.278.716	6.192.537.658	57,98	33,17

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berdampak positif terhadap hak dan kewajiban daerah dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua Undang-Undang tersebut, juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan lebih dahulu, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Dalam paket peraturan perundang-undangan keuangan negara nampak bahwa terdapat perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengelolaan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (performance planing) yang sudah disusun dengan sebaik-baiknya, anggaran kinerja (performance

budget) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan diseiap periode entitas pemerinahan harus menyajikan laporan kinerja (performance report) dan laporan keuangan (financial statement). Anggaran kinerja sangat memperhatikan time value of money, yang mengandung arti bahwa sumber daya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja penetapan target kinerja dari setiap aktifitas pengelolaan sumber daya keuangan merupakan suatu keharusan yang terdiri dari input, output, dan outcomes.

Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi tersebut, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara transparan dan akuntabel, maka pengelolaan keuangan daerah mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus mengacu dan memperhatikan beberapa undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari berbagai undang-undang tersebut, dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan daerah yang memiliki tujuan mempermudah dalam pelaksanaan dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam implementasinya.

Berdasarkan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Noor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk menjelaskan teknis dan guide line pengelolaan keuangan daerah Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Untuk mensinkronkan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan karakter dan kebutuhan daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57) serta Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 42 Seri A) yang mengatur antara lain Sistem dan prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kode rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sistem dan prosedur penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan APBD, sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan pemerintah daerah serta bagan akun standar.

realisasi anggaran merupakan besarnya biaya yang diperlukan dalam upaya pencapaian kinerja organisasi. Anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja organisasi tahun 2018 sebesar 2 triliun 596 milyar 704 juta 155 ribu 898 rupiah 11 sen. Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran dan kinerja disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.91

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dan Realisasi Dukungan Program

No	Sasaran	Indikator	Realisasi Capaian	Realisasi Anggaran	Ket
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	1,07*	83,71	
2	Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan	-3,24*	77,54	
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (Tamu Asing dan Indonesia)	369.422	96,35	
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,09	96,35	
4	Meningkatnya produksi sektor pertambangan	Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalan	2,22*	94,10	
5	Meningkatnya produksi sektor perindustrian	Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan	6,22*	97,80	
6	Terwujudnya kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi	100%	83,08	
7	Meningkatnya kemandirian fiskal	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	0,33	85,26	

8	Menurunnya pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	3,65	93,07	
9	Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	5,25	94,30	
10	Menurunnya Inflasi	Angka Inflasi	3,18	97,63	
11	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	2,08	91,54	
12	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Rasio ketersediaan transportasi layak jalan	0,0136	71,29	
		Indeks konektiviti kabupaten/kota	11,43	98,50	
		Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,20	99,26	
13	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	11,83*	83,45	
		Rata-rata lama sekolah	7,78*	83,45	
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,95*	87,31	
		Angka Kematian Ibu	167,24	87,31	
		Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	6,31	87,31	
		Angka Stunting	10,65	87,31	
15	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP*	77,32	
		Indeks Reformasi Birokrasi	65,49*	85,49	

16	Meningkatnya aspek kebebasan sipil	skor aspek kebebasan sipil	83,07*	92,08	
17	Terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	skor aspek hak-hak politik	82,30*	84,38	
18	meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	skor aspek lembaga demokrasi	72,89*	92,95	
19	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Integritas Pelayanan publik	8,10*	88,10	
20	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	0,26	90,42	
21	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,53	57,98	

Realisasi belanja daerah merupakan realisasi penyerapan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik. Pengelolaan belanja daerah untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dengan menganut sistem prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi dan langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja. Untuk lebih jelasnya kesimpulan laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2016 dan langkah dimasa mendatang diuraikan sebagai berikut , yaitu :

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Tahun 2018, mulai dari pengukuran, evaluasi dan analisis capaian tujuan diukur melalui 21 sasaran strategis yang mencakup masing – masing bidang capaian.
2. Dari 21 sasaran strategis tersebut, terdapat 29 indikator kinerja sasaran.
3. Dari 10 indikator kinerja tujuan yang ditetapkan, pencapaian realisasi terhadap target, yang masuk kategori sangat berhasil sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja atau sebesar 77,7 %, dan 2 (dua) indikator kinerja berhasil atau 22,3% dari keseluruhan peresentase capaian.
4. Capaian indikator kinerja sasaran strategis adalah :
 - a) Sasaran Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan dengan capaian kategori **kurang Berhasil**, dengan capaian 22,29 %.
 - b) Sasaran Meningkatnya produksi sub sektor perikanan dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan dengan capaian kategori **Kurang Berhasil** dengan capaian -85,26 %
 - c) Sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan dengan indikator kinerja diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan dengan capaian kategori **Berhasil** dan Persentase peningkatan jumlah wisatawan capaian kategori **berhasil**,

- d) Sasaran meningkatnya produksi sektor pertambangan dengan Indikator Kinerja persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian dengan capaian kategori **sangat Berhasil**,
- e) Sasaran Meningkatnya produksi sektor perindustrian dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan dengan capaian kategori **Sangat Berhasil**,
- f) Sasaran terwujudnya kemandirian energi dengan indikator kinerja rasio elektrifikasi dengan capaian kategori **Berhasil**,
- g) Sasaran meningkatnya kemandirian fiskal dengan indikator kinerja rasio pendapatan asli daerah terhadap APBD dengan capaian kategori **Sangat Berhasil**,
- h) Sasaran menurunnya pengangguran dengan indikator kinerja persentase tingkat pengangguran terbuka dengan capaian kategori sangat berhasil,
- i) Sasaran menurunnya kemiskinan dengan indikator kinerja persentase penduduk miskin dengan capaian kategori **Berhasil**,
- j) Sasaran menurunnya inflasi dengan indikator kinerja angka inflasi dengan target capaian kategori **sangat Berhasil**,
- k) Sasaran terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan indikator kinerja persentase laju pertumbuhan penduduk dengan capaian kategori **sangat Berhasil**,
- l) Sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan tiga indikator kinerja rasio ketersediaan transportasi layak jalan dengan kategori sangat berhasil, indeks konektiviti kabupaten/kota dengan kategori berhasil dan persentase desa dengan konektivitas kecepatan 12 Mbps dengan capaian kategori **Berhasil**,
- m) Sasaran meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dengan dua indikator kinerja yaitu harapan lama sekolah dengan kategori capaian

- berhasil, indikator rata-rata lama sekolah dengan kategori capaian berhasil.
- n) Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan 4 indikator kinerja, yaitu angka harapan hidup dengan kategori capaian berhasil, indikator angka kematian ibu dengan kategori capaian cukup berhasil, angka kematian bayi perseribu kelahiran hidup dengan kategori capaian "sangat berhasil" dan angka stunting dengan kategori capaian sangat berhasil.
 - o) Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan dua indikator kinerja yaitu opini audit BPK atas laporan keuangan dengan kategori capaian berhasil, dan indeks RB dengan kategori berhasil
 - p) Sasaran meningkatnya aspek kebebasan sipil dengan indikator kinerja skor aspek kebebasan sipil dengan kategori capaian berhasil,
 - q) Sasaran terpenuhinya hak-hak politik masyarakat dengan indikator kinerja skor aspek hak-hak politik dengan capaian kategori sangat berhasil,
 - r) Sasaran meningkatnya kualitas lembaga demokrasi dengan indikator kinerja skor aspek lembaga demokrasi dengan capaian kategori berhasil,
 - s) Sasaran birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja indeks integritas layanan publik dengan kategori capaian sangat berhasil,
 - t) Sasaran meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana dengan indikator kinerja indeks kapasitas bencana daerah dengan capaian kategori sangat berhasil,
 - u) Sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup dengan capaian kategori berhasil.
5. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menganggarkan pendapatan dan belanja untuk pelaksanaan kegiatannya dalam APBD Tahun 2018. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp2.487.065.640.565,87 dan realisasi sebesar Rp.2.564.417.524.733,35 atau 103,11%. Dibandingkan dengan

tahun 2017, terjadi peningkatan realisasi pendapatan daerah sebanyak Rp. 77.351.884.167,48 atau meningkat 3,11%.

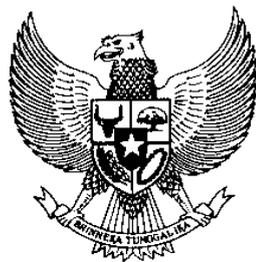
6. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam satu tahun anggaran yang menjadi pengeluaran daerah. Pada tahun anggaran 2018 dialokasikan sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11 terealisasi sebesar Rp. 2.370.446.858.191,80 atau 91,29 %.

B. Langkah Dimasa Yang Akan Datang

Langkah dimasa yang akan datang merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk melakukan upaya perbaikan terhadap kinerja pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah ke publik. Adapun langkah-langkah yang diperlukan adalah

1. Mendorong program-program prioritas pelaksanaan anggaran dan kegiatan diarahkan pada skala prioritas berdasarkan indikator kinerja utama.
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan target indikator kinerja utama satu bulan sekali.
3. Melakukan upaya pemberlakuan indikator kinerja utama berbasis digital.
4. Membentuk tim terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk melakukan evaluasi tingkat capaian dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan target capaian indikator kinerja utama.
5. Perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja utama, perlu menyampaikan laporan perkembangan realisasi perbulan ke penanggungjawab atau tim terpadu pengendalian indikator kinerja utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

LAMPIRAN



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR:188.44/ 725.a /VII/ 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017 - 2022

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018-2022 dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2018-2022.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menetapkan rencana kinerja, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Perangkat Daerah disampaikan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Pengawasan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum pada Diktum Kedua, dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mempunyai tugas :
- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja

dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja; dan

- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan melaporkan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diPangkalpinang
Pada Tanggal Juli 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop that starts from the right, goes down, then left, then up, and finally right, ending with a small hook.

ERZALDI ROSMAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 TAHUN 2017-2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PD
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	$Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$ <p>dengan Y :Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan. X_t : Nilai produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan pada tahun ini X_{t-1} : Nilai produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan pada tahun lalu</p>	Dinas Petanian
2	Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan	$Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$ <p>dengan Y :Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan. X_t : Nilai produksi sub sektor perikanan pada tahun ini X_{t-1} : Nilai produksi produksi sub sektor perikanan pada tahun lalu</p>	Dinas Kelautan dan Perikanan

3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (Tamu Asing dan Indonesia)	Jumlah orang yang datang dengan tujuan untuk menginap di hotel dan atau mempergunakan fasilitas atau jasa-jasa hotel yang telah disediakan. (RUMUS)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan tahun ini dikurangi jumlah wisatawan tahun lalu dibagi jumlah wisatawan tahun lalu dikali 100%	
4	Meningkatnya produksi sektor pertambangan	Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian	$Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$ <p>dengan Y :Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian X_t : Nilai produksi sektor pertambangan dan penggalian pada tahun ini X_{t-1} : Nilai produksi sektor pertambangan dan penggalian pada tahun lalu</p>	ESDM
5	Meningkatnya produksi sector perindustrian	Persentase pertumbuhan produksisektor industri pengolahan	$Y = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$ <p>dengan Y :Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan X_t : Nilai produksi sektor industri pengolahan pada tahun ini X_{t-1} : Nilai produksi sektor industri pengolahan pada tahun lalu</p>	PERINDAG
6	Terwujudnya kemandirian energi	RasioElektrifitas	$\frac{\text{Jumlah pelanggan}}{\text{jumlah rumah tangga}} \times 100 \%$	ESDM
7	Meningkatnya kemandirian fiskal	RasioPendapatanAsli (PAD) Daerah terhadap APBD	Total PendapatanAsli Daerah dibandingkandengan Total AnggaranPendapatanBelanja Daerah (APBD)	BAKUDA
8	Menurunnya pengangguran	PersentaseTingkat Pengangguran Terbuka	Persentase penduduk yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dari sejumlah angkatan kerja yang ada.	DISNAKER

			$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	
9	Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	<p><i>Headcount Index</i> (HCI – P₀) yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan. <i>Headcount index</i> secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin.</p> $P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$ <p>Dimana: P₀ = Persentase penduduk miskin (<i>head count index</i>) z = Garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3, ..., q); y_i < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk</p>	DINSOS
10	Menurunnya Inflasi	Angka Inflasi	<p>Merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Hitungan perubahan harga tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau <i>Consumer Price Index (CPI)</i>. Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi.</p> <p>Rumusnya:</p> $\text{INF}_n = \frac{(\text{IHK}_n - \text{IHK}_{n-1})}{\text{IHK}_{n-1}} \times 100$ <p>Dimana: INF_n : inflasi atau deflasi pada waktu (bulan atau tahun) (n) IHK_n : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n) IHK_{n-1} : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n-1)</p>	DISPERINDA G

11	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	<p>Angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>Rumus:</p> $r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$ <p>Metode Geometri r : laju pertumbuhan penduduk P_t : jumlah penduduk pada tahun t P₀ : jumlah penduduk pada tahun awal t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)</p>	PEREMPUAN
12	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Rasio ketersediaan transportasi jalan	Jumlah ketersediaan angkutan dibagi jumlah penduduk	DISHUB
		Persentase kabupaten/kota yang telah terkoneksi	$\frac{\text{Jumlah jaringan jalan provinsi} \times 100\%}{\text{jumlah kab/kota}}$	PU
		Persentase desadengankonektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	$\frac{\text{Jumlah Desadengankonektivitas dengan kecepatan 12 Mbps} \times 100\%}{\text{Jumlah desa}}$	KOMINFO
13	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	<p>Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.</p> $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Dimana: HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t FK = Faktorkoreksipesan tren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (a, a+1, ..., n)</p>	DISDIK
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	DISDIK

			$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$ <p>dengan:</p> <p>P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas Lama sekolah penduduk ke-i =</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak pernah sekolah = 0 Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 	
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	AngkaHarapanHidup	rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu	DINKES
		AngkaKematianIbu	jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun Jumlha kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama	x 100.000
		AngkaKematianBayi	$AKB = \frac{D_{0-\leq 1th}}{\Sigma \text{ Lahir Hidup}} \times 1000$ <p>Dimana :</p> <p>$D_{0-\leq 1th}$ = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. ΣLahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu</p>	
		Angka Stunting	Angka Stunting = $(\Sigma \text{Balita sangat pendek} / \Sigma \text{Balita}) \times 100\% + (\Sigma \text{ Balita pendek} / \Sigma \text{Balita}) \times 100\%$ Dimana :	

			<p>ΣBalita sangat pendek = jumlah balita sangat pendek pada waktu tertentu</p> <p>ΣBalita pendek = jumlah balita sangat pendek pada waktu tertentu</p> <p>ΣBalita = Jumlah balita pada waktu tertentu</p>	
15	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	
		Indek Reformasi Birokrasi	Penilaian Nilai Indeks yang dikeluarkan oleh KEMENPANRB terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
16	Meningkatnya aspek kebebasan sipil	Skor aspek kebebasan sipil	Nilai skor aspek kebebasan sipil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang terdiri dari variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan anti diskriminasi	KESBANG
17	terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	Skor aspek hak-hak politik	Nilai skor aspek hak-hak politik Indeks Demokrasi Indonesia yang terdiri dari variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	KESBANG
18	meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Skor aspek lembaga demokrasi	Nilai skor aspek lembaga demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia yang terdiri dari variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peran peradilan yang independen	KESBANG
19	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	<p>$C = V \times H / R$</p> <p>$R = H \times V / C$</p> <p>R= Risiko</p> <p>V= vulnerability (kerentanan)</p> <p>H= Hazard (bahaya)</p> <p>C= Kapasitas (kemampuan)</p> <p>Risiko (kerugian) berbanding lurus dengan besarnya ancaman (bahaya) dan kerentanan</p> <p>Kerentanan berbanding terbalik dengan kemampuan (kapasitas)</p>	BPBD

20	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH Provinsi = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL) IKLH = indeks kualitas Lingkungan Hidup IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	BLHD
----	---------------------------------------	----------------------------------	---	------

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



ERZALDI ROSMAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERZALDI ROSMAN
Jabatan : GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 13 Juli 2018

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

ERZALDI ROSMAN

Lampiran
Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

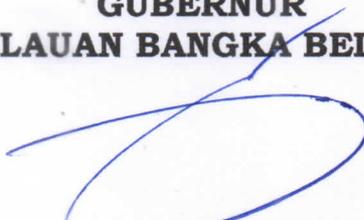
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	4,80
2	Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase pertumbuhan produksi sub sektor perikanan	3,80
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan (Tamud Asing dan Indonesia)	400.050
		Persentase peningkatan jumlah wisatawan	0,09
4	Meningkatnya produksi sektor pertambangan	Persentase pertumbuhan produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,53
5	Meningkatnya produksi sektor perindustrian	Persentase pertumbuhan produksi sektor industri pengolahan	2,63
6	Terwujudnya kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi	100,%
7	Meningkatnya kemandirian fiskal	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	0,27
8	Menurunnya pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	3,70
9	Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	5,10
10	Menurunnya Inflasi	Angka Inflasi	6,42
11	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	2,09
12	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Rasio ketersediaan transportasi layak jalan	0,00038
		Indeks konektiviti kabupaten/kota	12,16
		Persentase desa dengan konektivitas dengan kecepatan 12 Mbps	0,20
13	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	11,84
		Rata-rata lama sekolah	7,85
14	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,59
		Angka Kematian Ibu	89,85 (39/KH)
		Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	7,2/1000 KH

		Angka Stunting	26,5
15	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	67,5
16	Meningkatnya aspek kebebasan sipil	skor aspek kebebasan sipil	87,75
17	Terpenuhinya hak-hak politik masyarakat	skor aspek hak-hak politik	81,72
18	meningkatkan kualitas lembaga demokrasi	skor aspek lembaga demokrasi	80,30
19	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Integritas Pelayanan publik	8,0
20	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	Rendah (0,15)
21	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,60

Rincian Anggaran :

Anggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar	: Rp. 1.083.860.749.132,45
Anggaran Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar	: Rp. 204.833.953.152,41
Anggaran Urusan Pilihan	: Rp. 193.182.033.308,50
Anggaran Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	: Rp. 1.393.037.005.685,98
Total Anggaran Tahun 2018	: Rp. 2.874.913.741.279,34

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



ERZALDI ROSMAN